jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
b. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan, perlu adanya perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan RKPD adalah perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan:
    a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
    b. pedoman penyusunan KUA serta PPAS Perubahan APBD.
(2) KUA serta PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : PENDAHULUAN
    b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
    c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
    d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
    e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
    f. BAB VI : PENUTUP
(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2023 meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perubahan RKPD;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RPD.
(2) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

jdih.salatiga.go.id

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 16 Agustus 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-6
1.4. Hubungan Antar Dokumen I-7
1.5. Maksud dan Tujuan I-8
1.6. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2023 ..... I-8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... II-1
2.1. Realisasi Kinerja II-1
2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar II-22
2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar II-25
2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan II-31
2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-33
2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II-34
2.1.3.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintah II-36
2.2. Kendala dan Permasalahan II-123
2.3. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2023 .. II-128
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2023 ..... III-1
3.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2023 ..... III-5
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-13
3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan III-17
3.5. Kerangka Pendanaan Keuangan III-18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan IV-9
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar V-62
1. Pendidikan V-62
2. Kesehatan V-64
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V-66
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman V-68
5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat V-69
6. Sosial V-70
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar V-71
1. Tenaga Kerja V-71
2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak V-72
3. Pangan V-73
4. Pertanahan V-74

5. Lingkungan Hidup V-75
6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil V-76
7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana V-77
8. Perhubungan V-78
9. Komunikasi Dan Informatika V-78
10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah V-79
11. Penanaman Modal V-80
12. Kepemudaan Dan Olahraga V-80
13. Statistik V-81
14. Persandian V-81
15. Kebudayaan V-81
16. Perpustakaan V-82
17. Kearsipan V-82

C. Urusan Pilihan V-82
1. Kelautan Dan Perikanan V-82
2. Pariwisata V-83
3. Pertanian V-83
4. Perdagangan V-84
5. Perindustrian V-85
6. Transmigrasi V-86

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan V-86
1. Sekretariat Daerah V-86
2. Sekretariat DPRD V-88

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan V-88
1. Perencanaan V-88
2. Keuangan V-89
3. Kepegawaian V-90
4. Pendidikan dan Pelatihan V-90
5. Penelitian Dan Pengembangan V-90
6. Kecamatan V-90

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan V-91
1. Inspektorat Daerah V-91

G. Unsur Pemerintahan Umum V-92
1. Kesatuan Bangsa Dan Politik V-92

LAMPIRAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 ..... V-93

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-7

Gambar 3. 1 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen) III-2
Gambar 3. 2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen) III-3
Gambar 3. 3 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen) III-3
Gambar 3. 4 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (Persen) III-4
Gambar 3. 5 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Wilayah (persen) III-4
Gambar 3. 6 Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (y-on-y) (persen) III-5
Gambar 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (y-on-y), 2020-2023 ..... III-6
Gambar 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (q-to-q), 2020-2023 ..... III-7
Gambar 3. 9 Sumber Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha (q-to-q) Triwulan II-2023 (Persen) III-8
Gambar 3. 10 Pertumbuhan PDRB Beberaa Lapangan Usaha (y-on-y) Triwulan II-2023 ..... III-9
Gambar 3. 11 Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Triwulan II-2023 q-to-q III-10
Gambar 3. 12 Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Triwulan II-2023 (q-to-q) III-11
Gambar 3. 13 Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Triwulan II-2023 (y-on-y) III-11
Gambar 3. 14 Sumber Pertumbuhan menurut Pengeluaran Triwulan II-2023 (y-on-y) III-12

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2023 ..... II-2
Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2023 ..... II-7
Tabel 2. 3 Evaluasi Kinerja Urusan Pendidikan II-40
Tabel 2. 4 Evaluasi Kinerja Urusan Kesehatan II-44
Tabel 2. 5 Evaluasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-49
Tabel 2. 6 Evaluasi Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman II-51
Tabel 2. 7 Evaluasi Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat : SATPOL PP II-53
Tabel 2. 8 Evaluasi Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat : BPBD II-54
Tabel 2. 9 Evaluasi Kinerja Urusan Sosial II-56
Tabel 2. 10 Evaluasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja II-58
Tabel 2. 11 Evaluasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-60
Tabel 2. 12 Evaluasi Kinerja Urusan Pangan II-62
Tabel 2. 13 Evaluasi Kinerja Urusan Pertanahan II-64
Tabel 2. 14 Evaluasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup II-65
Tabel 2. 15 Evaluasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil II-66
Tabel 2. 16 Evaluasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-67
Tabel 2. 17 Evaluasi Kinerja Urusan Perhubungan II-70
Tabel 2. 18 Evaluasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika II-71
Tabel 2. 19 Evaluasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM II-73
Tabel 2. 20 Evaluasi Kinerja Urusan Penanaman Modal II-75
Tabel 2. 21 Evaluasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-77
Tabel 2. 22 Evaluasi Kinerja Urusan Statistik II-79
Tabel 2. 23 Evaluasi Kinerja Urusan Persandian II-80
Tabel 2. 24 Evaluasi Kinerja Urusan Kebudayaan II-81
Tabel 2. 25 Evaluasi Kinerja Urusan Perpustakaan II-83
Tabel 2. 26 Evaluasi Kinerja Urusan Kearsipan II-85
Tabel 2. 27 Evaluasi Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan II-87
Tabel 2. 28 Evaluasi Kinerja Urusan Pariwisata II-87
Tabel 2. 29 Evaluasi Kinerja Urusan Pertanian II-90
Tabel 2. 30 Evaluasi Kinerja Urusan Perdagangan II-92
Tabel 2. 31 Evaluasi Kinerja Urusan Perindustrian II-94
Tabel 2. 32 Evaluasi Kinerja Urusan Transmigrasi II-96
Tabel 2. 33 Evaluasi Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah II-97
Tabel 2. 34 Evaluasi Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan : Sekretariat DPRD II-99
Tabel 2. 35 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Perencanaan II-101
Tabel 2. 36 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Keuangan II-103

Tabel 2. 37 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Kepegawaian II-105
Tabel 2. 38 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Penelitian dan Pengembangan II-107
Tabel 2. 39 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Pendidikan dan Pelatihan II-108
Tabel 2. 40 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-109
Tabel 2. 41 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan : Kec. Sidorejo II-111
Tabel 2. 42 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan : Kec. Argomulyo II-113
Tabel 2. 43 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan : Kec. Sidomukti..... II-115
Tabel 2. 44 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan : Kec. Tingkir II-117
Tabel 2. 45 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum : Kesatuan Bangsa dan Politik II-119
Tabel 2. 46 Rekap Realisasi Pelaksanaan Kegiatan s.d. Bulan Juni 2023..... II-121
Tabel 2. 47 Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Stategis II-129

Tabel 3. 1 Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2023..... III-19
Tabel 3. 2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2023 ..... III-23
Tabel 3. 3 Realisasi. Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2023 ..... III-26
Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2023 ..... III-30

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023..... IV-4
Tabel 4. 2 Sinkronisasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan serta Program pada Perubahan RKPD 2023 ..... IV-15
Tabel 4. 3 Target Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2023..... IV-30
Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2023..... IV-33
Tabel 4. 5 Target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD 2023..... IV-45

Tabel 5. 1 Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2023..... V-2
Tabel 5. 2 Penjabaran Rencana Program Prioritas Tahun 2023..... V-4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun 2023 merupakan masa transisi dokumen perencanaan pasca berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah di tahun 2022. Dasar perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. RKPD disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu semester satu tahun 2023 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Tahun 2023 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan di mana APBD Tahun 2023 telah mengalami dua kali perubahan penjabaran APBD untuk keperluan penyesuaian turunnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
b. Keadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp125.713.423.946,00 hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
c. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penambahan alokasi anggaran kegiatan, penambahan, pengurangan dan/atau penyesuaian target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar perubahan RKPD tahun 2023.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan perumusan keputusan dalam memanfaatkan sumber daya publik yang tersedia di daerah untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai dengan tahapan pembangunan berdasarkan RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025 yang merupakan perencanaan 20 tahun, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota

Salatiga tersebut menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Perubahan RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2022 yang akan akan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2023 juga disusun berpedoman pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2023 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2023. RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan dengan RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) serta menerapkan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

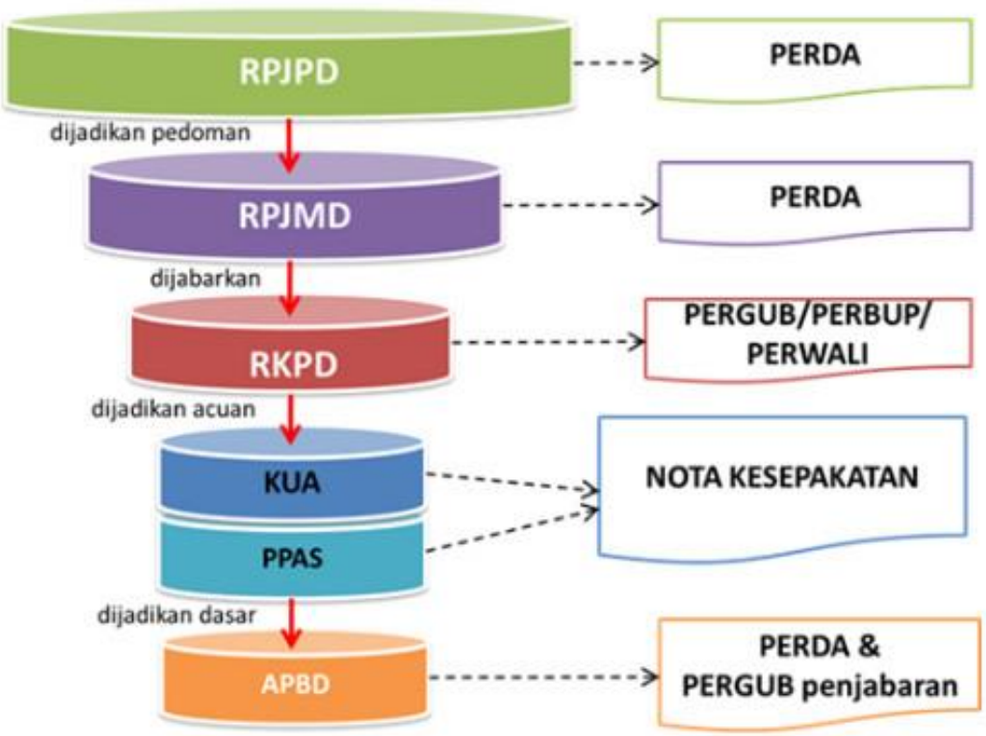
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Ineventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023;
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026.
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2023 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan Renstra. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), yang nanti menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja dan RKA serta DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan berikut.



Gambar 1. 1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD mengakomodir perubahan kondisi serta permasalahan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan yang terjadi sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2023 dan mengantisipasi terhadap perubahan perkembangan yang terjadi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 nantinya. Selain itu kerangka pendanaan untuk Perubahan RKPD 2023 mengakomodir sumber pembiayaan berdasarkan laporan SILPA tahun anggaran 2022 yang dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.

1.5. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2023 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evalusai sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023.

b) Tujuan

Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2023;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);

1.6. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2023

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Realisasi Kinerja

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan evaluasi atas realisasi kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Kinerja yang dievaluasi berupa kinerja utama, kinerja urusan pemerintahan dan kinerja program perangkat daerah. Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 menjadi acuan dalam perumusan strategi pembangunan berikutnya untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing.

2.1.1.Realisasi Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. Untuk memonitoring pencapaian indikator kinerja utama pada semester I Tahun 2023, dilakukan evaluasi kinerja dengan hasil sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2023

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,67	10,95	102,62		Disdik
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,43	15,43	100,00		Disdik
3	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	52,06	63,14	121,28		Dinpersip
4	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	19	0,00	0,00		Disbudpar
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	15	5,00	33,33		Dispora
6	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	20,59	23,2	112,68		Dispora
7	Angka harapan Hidup	Tahun	77,67	77,72	100,06		DKK
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,34	0,83	138,06		DP3APPKB
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86-5,44	5,53	86,21		
10	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	54,11	78,99	145,98		Disdag

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
11	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10	-16,61	-166,10		DPMPTSP
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,46-5,51	5,58	113,62		Dinperinaker
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,71	71	101,85		Dinperinaker
14	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	94,5	93,3	98,73		Dinsos
15	Pola Pangan Harapan	Skor	92,2	95,1	103,15		Dispangtan
16	Persentase Peminat Transmigrasi	%	3,3	0,33	10,00		Dinperinaker
17	Score Capaian KLA	Nilai	615	607,35	98,76		DP3APPKB
18	IDG	Nilai	80	79,29	99,11		DP3APPKB
19	IPG	Nilai	95,5	95,44	99,94		DP3APPKB
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65,5	66,85	102,06		Setda
21	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100,00		Satpol
22	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	100,00		Bakesbang
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,84	0	0,00		BPBD

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
24	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	52,5	50	95,24		DPUPR
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	56,2	61,34	109,15		DLH
26	Rasio Konektivitas Kota	%	0,71	0,81	114,08		Dishub
27	Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,35	0,33	94,29		Dishub
28	Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	10,2	10,36	101,57		DPKP
29	Pemukiman yang Tertata	%	6,26	0	0,00		DPKP
Rata-Rata Realisasi Kinerja			**63,76**	**58,66**	**79,85**		
Rata-Rata Capaian Kinerja				**92,00**	**125,23**		

Keterangan :

 : Tercapai ≥ 50% Target Tahun 2023

 : Akan Tercapai 50% ≤ 25% Target Tahun 2023

 : Perlu Upaya Keras < 25% Target Tahun 2023

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum pencapaian kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga pada akhir tahun 2023 akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja utama pemerintah Kota Salatiga pada semester I tahun 2023 adalah 92%.

Status tercapai sebanyak 23 Indikator atau 79,31% dan akan tercapai sebanyak 1 indikator atau 3,45%. Akan tetapi, masih ada kinerja utama yang perlu dilakukan upaya keras dalam pencapaian sampai akhir tahun 2023, yaitu sebanyak 5 indikator atau 17,24%.

Adapun jenis indikator kinerja serta alasan belum terpenuhinya target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

   Kinerja utama ini merupakan kinerja yang capaiannya hanya bisa dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada Semester I, data untuk menghitung capaian kinerja belum tersedia.
2. Pertumbuhan Nilai Investasi;

   Belum tercapainya indikator kinerja utama untuk pertumbuhan investasi yang ditargetkan tumbuh 10% dari tahun 2022 dikarenakan data dasara yang digunakan adalah data investasi akhir tahun 2022. Sedangkan data akhir tahun adalah data akumulasi nilai investasi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Dengan demikian capaian kinerja pada Triwulan I tentu saja akan negative. Jika data disandingkan per Triwulan, maka nilai kinerja yang diperoleh menjadi positif.

No	Indikator Kinerja	2022 TW I	2023 TW I	Pertumbuhan
1.	Pertumbuhan Nilai Investasi	195.584.020.000	325.489.249.852	66,42%

Sumber : DPMPTSP, diolah Bappeda 2023

Hal tersebut dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran yang mendukung realisasi kinerja utama pertumbuhan nilai investasi, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2022 TW II	2023 TW II	Capaian
1.	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	225	250	11,11%
2.	Persentase Kenaikan	49.266.900.000	25.737.400.000	91,42%

No	Indikator Kinerja	2022 TW II	2023 TW II	Capaian
	nilai investasi PMDN			
3.	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	276.222.349.852	169.846.620.000	62,63%

Sumber : DPMPTSP, diolah Bappeda 2023

3. Persentase Peminat Transmigrasi;

   Urusan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga sangat tergantung dari Kebijakan Provinsi termasuk dalam penentuan lokasi calon transmigrasi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan belum tercapainya target kinerja utama persentase peminat transmigrasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

4. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana;

   Indeks Ketahanan Daerah adalahinstrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Pengukuran IKD dilaksanakan pada akhir tahun dengan proses yang ditentukan oleh Pusat. Dengan demikian, pada Triwulan II tahun 2023, IKD belum dapat diketahui

5. Pemukiman yang Tertata.

   Data untuk mengukur kinerja Pemukiman yang tertata belum dilakukan pada Triwulan II tahun 2023.

2.1.2.Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sementara itu, ukuran keberhasilan pembangunan juga meliputi realisasi dari indikator kinerja dari setiap aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing dan layanan umum serta fokus menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaran urusan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan. Realisasi kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2023

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75	84,95	100,24		**Setda**
2	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	%	37,00	30,76	83,14		**DPKP**
3	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,42	1,24	87,32		**Dinas Pangtan**
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	84,50	84,35	99,82		**Dinas Pendidikan**
5	Angka Kemiskinan	%	4,67 - 4,59	4,73	96,95		**Dinas Sosial**
6	Pravelensi Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,09	100,00		**DKK**
B.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Indeks SPBE	Nilai	2,40	2,84	118,33		**Kominfo**
2	Wilayah dengan infrastrutur kondisi baik	%	65,00	33,83	52,05		**DPUPR**
C.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,82	86,61	102,11		**Dinas Pendidikan**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,23	99,23	100,00		
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,73	90,23	93,28		
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,96	63,92	103,16		
	Kesehatan						
5	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172	1	166,67		**Dinas Kesehatan**
6	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	12,89	16,00	130,43		
7	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,09	100,00		
8	Succes Rate TB	%	92	91,42	99,37		
9	Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia di atas 18 Tahun	%	37,76	12,62	33,42		
10	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	66	50	75,76		
11	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	100	100	100,00		**RSUD**
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
12	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	97	80,77	83,27		**DPUPR**
13	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	65	33,83	52,05		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
14	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,23	2,09	106,28		**DPKP**
15	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	37,00	30,76	83,14		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat						
16	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100,00	100	100,00		**Satpol PP**
17	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100,00	100	100,00		
18	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,72	1,24	127,91		**Badan Kesbangpol**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
19	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100,00	100	100,00		
20	KelurahanTangguh Bencana	%	17,00	7,8	45,88		**BPBD**
21	Indeks Risiko Bencana	%	90,80	90,89	100,10		
	Sosial						
22	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	70,00	40	57,14		**Dinsos**
	Urusan Pemerintahan Wajib Non pelayanan Dasar						
	Tenaga Kerja						
23	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	70,00	63,64	90,91		**Dinas Perinaker**
24	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50,00	83,33	166,66		
25	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	95,76	95,62	99,85		
26	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	53,80	25,00	46,47		
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
27	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	28,57	28,00	98,00		**DP3APPKB**
28	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	40,00	39,73	99,33		
	Pangan						
29	Ketersediaan beras (rasio cadangan beras setahun dibandingkan dengan target)	%	70,00	100	142,86		**Dinas Pangtan**
30	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita	2.487	2.542	102,21		
31	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita	108	76,76	71,07		
32	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,42	1,24	87,32		
	Pertanahan						
33	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	25,00	40,00	160,00		**DPKP**
34	Persentase luas lahan bersertifikat	%	20,00	15,3	76,50		
	Lingkungan Hidup						**DLH**
35	Indeks Kualitas Air	%	41,20	45,00	109,22		
36	Indeks Kualitas Udara	%	79,80	84,11	105,40		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
37	Indeks Kualitas Lahan	%	47,00	47,28	100,60		
	Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
38	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	98,70	98,84	100,14		**Dinas Dukcapil**
39	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	95,60	94,08	98,41		
40	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	79,20	83,01	104,81		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
41	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,40	1,84	123,33		**DP3APPKB**
42	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24,00	6,00	25,00		
	Perhubungan						
43	Rasio Ijin Trayek	%	24,37	41,20	169,06		**Dinas Perhubungan**
44	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	29,16	117,63		
45	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82,00	34,05	41,52		
	Komunikasi dan Informatika						
46	Tingkat keterbukaan informasi publik	%	96,00	25,00	26,04		**Dinas Kominfo**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
47	Indeks SPBE	%	2,40	2,84	118,33		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
48	Persentase koperasi aktif	%	70,56	53,37	75,64		**Dinas Koperasi,UKM**
49	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96,00	99,93	104,09		
	Penanaman Modal						
50	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	3,00	11,11	370,37		**DPMPTSP**
51	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	10,00	10,01	100,10		
52	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	10,00	40,20	402,00		
	Kepemudaan dan olah raga						
53	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,49	101,63		**Dispora**
54	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73	43,92	113,40		
55	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	100	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
	Statistik						
56	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	94,00	50	53,19		**Dinas Kominfo**
	Persandian						
57	Tingkat Pengamanan Informasi	%	80,00	70,85	88,56		**Dinas Kominfo**
	Kebudayaan						
58	Persentase obyek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	14,71	83,82	569,82		**Dinas Budpar**
59	Persentase cagar budayayang dilestarikan	%	24,00	20	83,33		
	Perpustakaan						
60	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,95	15,3	257,14		**Dinas Persip**
	Kearsipan						
61	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75,50	30,22	40,03		**Dinas Persip**
	Urusan Pemerintahan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan						
62	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6,00	0,3	5,00		**Dinas Pangtan**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
63	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5,00	1,00	20,00		
	Pariwisata						
64	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	107,31	-43,43	-40,47		**Dinas Budpar**
65	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	45,00	63,43	140,96		
66	Tingkat hunian akomodasi	%	20,00	3,75	18,75		
67	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8,50	4,05	47,65		
68	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,11	2,44	2218,18		
	Pertanian						
69	Produktivitas padi	%	6,50	6,1	93,85		**Dinas Pangtan**
70	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10,00	10	100,00		
71	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,02	-2,00	-10000,00		
72	Produktivitas Sapi Perah	%	0,72	11,09	1540,28		
73	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100,00	100	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
	Perdagangan						
74	Kontribusi sektor perdaganganterhadap PDRB	%	4,77	4,05	84,91		**Dinas Perdagangan**
	Perindustrian						
75	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,31	0	0,00		**Dinas Perinaker**
76	Kontribusi sektor industriterhadap PDRB	%	31,00	32,73	105,58		
	Transmigrasi						
77	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	3,30	0,33	10,00		**Dinas Perinaker**
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						
78	Indeks Inovasi	%	46,30	47,11	101,75		**BAPPEDA**
79	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	20,00	20	100,00		
80	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	75,00	100	133,33		
	Keuangan						
81	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	100,00	100	100,00		**BPKPD**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
82	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	2,50	2,44	97,60		
	Kepegawaian						
83	Indeks Profesionalitas ASN	%	55,00	73,35	133,36		**BKPSDM**
84	Nilai Sistem Merit	%	275,00	274,5	99,82		
	Fungsi Pengawasan Lainnya						
	Pengawasan						
85	Kapabilitas APIP	%	3,00	3,00	100,00		**IRDA**
86	QA SPIP	%	3,04	3,00	98,68		
87	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	%	2,94	2,97	101,12		
88	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	%	2,78	2,87	103,24		
	Sekretariat DPRD						
89	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	61,61	61,61		**Set. DPRD**
	Sekretariat Daerah						
90	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	%	81,00	90,09	111,22		**Setda**
91	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	%	34,47	32,93	95,53		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
92	Indeks PMPRB	%	71,00	74,98	105,61		
93	Nilai SAKIP	%	65,00	65,35	100,54		
94	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75	85,55	100,94		
	Kecamatan						
	Kecamatan Sidomukti						
95	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - KEC. SIDOMUKTI	%	89,20	89,18	99,98		**Sidomukti**
96	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 - KEC. SIDOMUKTI	%	60,00	52,00	86,67		
97	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang- KEC. SIDOMUKTI	%	79,75	74,00	92,79		
98	Persentase PKK Aktif - KEC. SIDOMUKTI	%	50,00	75,00	150,00		
	Kecamatan Sidorejo						
99	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - KEC. SIDOREJO	%	86,00	88,64	103,07		**Sidorejo**
100	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 - KEC. SIDOREJO	%	93,52	93,00	99,44		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
101	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang - KEC. SIDOREJO	%	58,00	20,41	35,19		
102	Persentase PKK Aktif - KEC. SIDOREJO	%	50,00	66,18	132,36		
	Kecamatan Tingkir						
103	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - KEC. TINGKIR	%	92,05	86,93	94,44		**Tingkir**
104	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 - KEC. TINGKIR	%	71,00	43,5	61,27		
105	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang - KEC. TINGKIR	%	60,00	65,59	109,32		
106	Persentase PKK Aktif - KEC. TINGKIR	%	72,00	100	138,89		
	Kecamatan Argomulyo						
107	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - KEC. ARGOMULYO	%	82,00	82,57	100,70		**Argomulyo**
108	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 - KEC. ARGOMULYO	%	60,05	35,00	58,28		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	Status	OPD
109	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang - KEC. ARGOMULYO	%	62,00	73,00	117,74		
110	Persentase PKK Aktif - KEC. ARGOMULYO	%	50,00	100,00	200,00		
Rata-Rata Realisasi Kinerja			**74,14**	**69,10**	**47,52**		
Rata-Rata Capaian Kinerja				**93,20**	**64,09**		

Keterangan :

: Tercapai ≥ 50% Target Tahun 2023

: Akan Tercapai 50% ≤ 25% Target Tahun 2023

: Perlu Upaya Keras < 25% Target Tahun 2023

Pada tabel tersebut, dari 118 indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, masih terdapat 5 indikator (4,24%) yang berstatus perlu upaya keras, 9 indikator (7,63%) bersatus akan tercapai dan 104 indikator (88,13%) berstatus sudah tercapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang masih bersatus perlu upaya keras dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)

   Belum tercapainya indikator urusan perikanan terutama untuk peningkatan produksi perikanan yang ditargetkan meningkat 6% dari tahun 2022, disebabkan oleh pengukuran indikator menggunakan data dasar produksi perikanan akhir tahun 2022. Sedangkan data akhir tahun adalah data akumulasi produksi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Dengan demikian capaian kinerja pada Triwulan I tentu saja akan negative. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya pada Triwulan II tahun 2022, maka pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi, sebesar 11,60% sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	2022 TW II	2023 TW II	Capaian Peningkatan Produksi
1.	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	253.303	282.682	11,60%

   Sumber : Dataku Salatiga, diolah Bappeda 2023

2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara

   Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara belum dapat disajikan secara akurat pada semester I tahun 2023, adalah salah satu faktor yang menyebabkan capaiannya indikator ini masih rendah.

3. Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi

   Produktivitas daging sapi yang belum memenuhi target kinerja disebabkan karena jumlah sapi pada triwulan 1 dan 2 belum memenuhi jumlah yang ditargetkan pada tahun 2023. Hal ini dipicu oleh dampak wabah PMK menyebabkan sapi yang disembelih dan daging yang dihasilkan mengalami penurunan kuantitas.

4. Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)

   Pendataan IKM dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sehingga tidak ada data capaian yang disajikan untuk mereviu setiap tahunnya

5. Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi

   Pemerintah Daerah bergantung dengan kebijakan Pemerintah Pusat berkaitan dengan kuota catrans, untuk tahun 2023, Kota Salatiga tidak mendapatkan kuota calon transmigran.

Walaupun demikian, secara umum, capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Triwulan II tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 94,07%. Walaupun demikian perlu langkah-langkah dan strategi khusus dalam merealisasikan Indikator-indikator yang berstatus perlu upaya keras dalam pencapaian akhir 2023. Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang mepengaruhi capaian kinerja menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan langkah dan strategi ke depan.

2.1.3.Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah

Sedangkan kinerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan pada pelaksanaan program oleh Perangkat Daerah. Program yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah adalah program-program yang mendukung urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Adapun realisasi kinerja, realisasi fisik dan penyerapan anggaran per urusan dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan pada tabel 2.3 dengan keterangan sebagai berikut :

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Dinas Pendidikan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pendidikan sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 166,44% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Walaupun kategori sangat tinggi, tetapi rata-rata capaian kinerja masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 99,05%.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2023 sebesar Rp196.613.385.482,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp75.106.313.254,00 atau sebesar 38,20%, sedangkan realisasi fisik sebesar 52,85%.

2. Urusan Kesehatan

a. Dinas Kesehatan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 49,07% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp244.290.070.509,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp120.122.736.112,00 atau sebesar 48,38%, sedangkan realisasi fisik sebesar 61,56%.

Pencapaian kinerja program untuk urusan Kesehatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yang masih sangat rendah disebabkan oleh :

1) Adanya kegiatan yang tertunda karena menyesuaikan dengan jadwal narasumber;
2) Adanya perubahan mekanisme keuangan dan tata usaha BOK Tahun 2023.
3) Belum terukurnya capaian kinerja sampai dengan Triwulan II.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah Rp9.570.209.422,00 sebesar 11,25% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Penyebab belum tercapainya kinerja program urusan drainase adalah :

1) Cuaca/curah hujan yang masih tinggi juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan;
2) Terkendala proses koordinasi Lintas OPD.

Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 sebesar Rp87.319.429.036,00. sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp9.570.209.422,00 atau sebesar 10,96%. sedangkan realisasi fisik sebesar 32,79%.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perumahan dan permukiman yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 92,42% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman anggaran tahun 2023 sebesar Rp25.404.522.849,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp6.981.162.879,00 atau sebesar 27,48%, sedangkan realisasi fisik sebesar 45,96%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 101,49% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 sebesar Rp12.982.850.269,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp5.398.269.142,00 atau sebesar 41,58%, sedangkan realisasi fisik sebesar 51,71%.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Program Penanggulangan Bencana sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 66,14% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.025.611.821,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp1.386.637.898,00

atau sebesar 45,83% sedangkan realisasi fisik sebesar 63,67%.

6. Urusan Sosial

a. Dinas Sosial

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan sosial yang diampu oleh Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 97,96% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

AlokasianggaranDinas Sosial tahun 2023 sebesarRp11.295.072.102,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp5.601.226.255,00 atau sebesar 49,59%. sedangkan realisasi fisik sebesar 55,91%.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan tenaga kerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 154,45% atau masuk ke dalam sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 sebesar Rp8.616.528.829,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp3.131.246.576,00 atau sebesar 36,34%. sedangkan realisasi fisik sebesar 66,40%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 123,45% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan. Pelindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana tahun 2023 sebesar Rp13.353.209.379,00. sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp5.452.115.389,00 atau sebesar 40,83%, sedangkan realisasi fisik sebesar 49,12%.

3. Urusan Pangan

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pangan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 153,77 % atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp18.547.934.239,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp7.758.600.892,00 atau sebesar 41,83%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 51,11%.

4. Urusan Pertanahan

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pertanahan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 176,09% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman anggaran tahun 2023 sebesar Rp25.404.522.849,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp6.981.162.879,00 atau sebesar 27,48%, sedangkan realisasi fisik sebesar 45,96%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Dinas Lingkungan Hidup.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan lingkungan hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 82,51% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

Alokasi Dinas Lingkungan Hidup anggaran tahun 2023 sebesar Rp39.966.775.666,00 sampai dengan Triwulan II

realisasi keuangan adalah Rp19.359.906.133,00 atau sebesar 48,44%, sedangkan realisasi fisik sebesar 55,01%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 100,30% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil anggaran tahun 2023 adalah Rp5.720.883.231,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp2.634.466.728,00 atau sebesar 46,05%, sedangkan realisasi fisik sebesar 63,00%.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2023 adalah sebesar 93,85% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan. Pelindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 sebesar Rp13.353.209.379,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp5.452.115.389,00 sebesar 40,83%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 49,12%.

8. Urusan Perhubungan

a. Dinas Perhubungan.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023

adalah sebesar 99,36% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebesar Rp11.842.082.140,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp4.984.332.373,00 atau sebesar 42,09%, sedangkan realisasi fisik sebesar 65,83%.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 52,46% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun menjadi salah satu penyebab, kinerja indikator program urusan komunikasi dan informatika masuk kategori rendah.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebesar Rp11.978.553.607,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp4.372.172.067,00 sebesar 36,50%, sedangkan realisasi fisik sebesar 56,99%.

10. Urusan Koperasi dan UKM

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan II/Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 124,51% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Tahun 2023 sebesar Rp6.377.929.981,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp2.486.117.107,00 atau sebesar 38,98%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 50,53%.

11. Urusan Penanaman Modal

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan investasi yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II/Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 145,06% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

AlokasianggaranDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 sebesarRp4.939.307.589,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp2.231.085.238,00 atau sebesar 45,17%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 56,08%.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kepemudaan dan olahraga yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 95,85% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2023 sebesar Rp16.434.946.715,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp9.931.638.300,00 atau sebesar 60,43%, sedangkan realisasi fisik sebesar 69,19%.

13. Urusan Statistik

a. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2023 adalah sebesar 53,25% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja urusan statistik, karena ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebesar Rp11.978.553.607,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah

Rp4.372.172.067,00atau sebesar 36,50%, sedangkan realisasi fisik sebesar 56,99%.

14. Urusan Persandian

a. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2023 adalah sebesar 53,85% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Tingkat pengamanan informasi daerah yang menjadi indikator minerja urusan persandian diukur melalui mekanisme yang dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga pada TW II tahun 2023, indikator tersebut belum bisa dinilai.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebesar Rp11.978.553.607,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp4.372.172.067,00 atau sebesar 36,50%, sedangkan realisasi fisik sebesar 56,99%

15. Urusan Kebudayaan

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2023 adalah sebesar 194,66% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2023 sebesar Rp10.670.272.483,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp2.732.656.783,00atau sebesar 25,61%, sedangkan realisasi fisik sebesar 66,17%.

16. Urusan Perpustakaan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I

Tahun 2023 adalah sebesar 91,26% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

AlokasianggaranDinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 sebesarRp10.075.135.802,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp3.709.665.002,00atau sebesar 36,82%, sedangkan realisasi fisik sebesar 52,34%.

17. Urusan Kearsipan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 148,51% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

AlokasianggaranDinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 sebesarRp10.075.135.802,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp3.709.665.002,00 atau sebesar 36,82%, sedangkan realisasi fisik sebesar 52,34%.

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kelautan dan perikanan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 100,00% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp18.547.934.239,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp7.758.600.892,00atau sebesar 41,82%, sedangkan realisasi fisik sebesar 51,11%.

2. Urusan Pariwisata

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pariwisata yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun

2023 adalah sebesar 64,16% atau masuk ke dalam kategori rendah. Rendahnya capaian kinerja urusan pariwisata dipengaruhi oleh rendahnya obyek wisata yang ditingkatkan dan kurangnya fasilitasi pemasaran pariwisata

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2023 sebesar Rp10.670.272.483,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp2.732.656.783,00atau sebesar 25,61%, sedangkan realisasi fisik sebesar 66,17%.

3. Urusan Pertanian

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pertanian yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 89,46% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 sebesar Rp18.547.934.239,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp7.758.600.892,00atau sebesar 41,82%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 51,11%.

4. Urusan Perdagangan

a. Dinas Perdagangan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perdagangan yang diampu oleh Dinas Perdagangan sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 67,86% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasianggaran untuk Dinas Perdagangan Tahun 2023 sebesar Rp.15.907.485.988,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp6.770.226.036,00 atau sebesar 42,56%, sedangkan realisasi fisik sebesar 49,54%.

5. Urusan Perindustrian

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 154,45% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 sebesar Rp8.616.528.829,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp3.131.246.576,00 atau sebesar 36,34% dan realisasi fisik sebesar 66,40%.

6. Urusan Transmigrasi

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 54,51% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 sebesar Rp8.616.528.829,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp3.131.246.576,00 atau sebesar 36,34% dan realisasi fisik sebesar 66,40%.

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan sekretariat Daerah yang diampu oleh Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 27,38% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Pelaksanaan kegiatan untuk urusan kesekretariatan daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, akan tetapi karena ada beberpa kinerja yang penilaiannya hanya yang bisa dilaksanakan pada akhir tahun, maka berpengaruh pada capaian kinerja di TW II tahun 2023.

Selain itu, rendahnya capaian kinerja disebabkan oleh karena masih kurangnya koordinasi antar asisten dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi serta belum tersedianya data untuk pengukuran kinerja pada TW II tahun 2023.

Alokasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.846.813.750,00. Sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan adalah Rp16.481.109.285,00 atau sebesar 46,74% dan realisasi fisik 53,21%.

2. Sekretariat DPRD

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan sekretariat DPRD yang diampu oleh Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 19,79% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Capaian target kinerja urusan kesekretariatan DPRD yang masih sangat rendah disebabkan beberapa indikator hanya bisa diukur pada akhir tahun anggaran, selain itu kinerja DPRD juga dipengaruhi secara langsung oleh realisasi keuangan/anggaran.

Sedangkan realiasi keuangan dipengaruhi beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

1) Realisasi keuangan sampai dengan TW II belum optimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
2) Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan namun administrasi SPJ dari pengelola kegiatan belum maksimal;

Alokasi anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.341.290.510,00. Sampai dengan Triwulan II/Semester I realisasi keuangan adalah Rp22.160.236.083,00 sebesar 44,02% dan realisasi fisik 53,81%.

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Unsur Penunjang Perencanaan

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan

Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 105,1% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

AlokasianggaranBadanPerencanaan.Penelitiandan Pengembangan Daerah sebesar Rp9.998.006.857,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp3.391.323.926,00 atau sebesar 33,92%, sedangkan realisasi fisik sebesar 60,00%.

2. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 102,82% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi

AlokasianggaranBadanPerencanaan.Penelitiandan Pengembangan Daerah sebesar Rp.9.998.006.857,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuanganadalah Rp3.391.323.926,00atau sebesar 33,92%, sedangkan realisasi fisik sebesar 60,00%.

3. Unsur Penunjang Keuangan

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan keuangan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2023 adalah sebesar 68,30% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp41.086.577.116,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi adalah Rp10.033.342.132,00 atau sebesar 24,42% dan realisasi fisik sebesar 62,70%.

Pencapaian kinerja indikator program yang terdiri dari peningkatan PAD dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah sampai dengan TW II tahun 2023 masih

belum bisa dinilai karena proses penilaian kinerja dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Walaupun demikian, untuk program yang mendukung pelaksanaan peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan optimal dengan merealisasikan anggaran yang tersedia untuk mendukung pelayanan keuangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4. Unsur Penunjang Kepegawaian

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 127,48% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 sebesar Rp9.833.274.571,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp4.431.856.849,00 atau sebesar 45,07% dan realisasi fisik sebesar 51,68%.

2.1.3.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintah

1. Inspektorat

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan inspektorat yang diampu oleh Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 73,18% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja program adalah :

1) Kurang optimalnya penyerapan anggaran di triwulan 1 karenapelaksanaan kegiatan di triwulan 1 masih terkendala persiapan kegiatan sehingga perencanaan yang sudah di tetapkan dalam anggaran kas belum terlaksana secara optimal;
2) Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaam Negeri, Pihak Kepolisian RI dan

Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya serta para pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi tergantung rencana dari instansi tersebut.

Alokasi anggaran Inspektoratsebesar Rp9.513.078.208,00 sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp3.621.628.874,00 atau sebesar 38,07%, sedangkan realisasi fisik sebesar 61,72%.

2.1.3.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Sidomukti

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa untuk Kecamatan Sidomukti sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 67,94% atau masuk kategori sedang. Hal ini disebabkan karena berdasarkan anggaran kas, kegiatan belum dapat berjalan pada triwulan tersebut.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti tahun 2023 sebesar Rp12.985.975.971,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp6.768.290.676,00atau sebesar 52,12%, sedangkan realisasi fisik sebesar 65,06%.

2. Kecamatan Sidorejo

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa untuk Kecamatan Sidorejo sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 18,109% atau masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena berdasarkan anggaran kas, kegiatan belum dapat berjalan pada triwulan tersebut.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo tahun 2023 sebesar Rp16.928.290.962,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp8.655.435.169,00atau sebesar 51,13%, sedangkan realisasi fisik sebesar 61,75%.

3. Kecamatan Tingkir

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa untuk Kecamatan Tingkir

sampai dengan Triwulan II/Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 64,56% atau masuk kategori sedang.

Beberapa hal yang menyebabkan kinerja belum optimal adalah :

1. Pelaksanaan pembuatan SKM pada TW II;
2. Belum bisa dilakukan penghitungan SPPT PBB yang disebarkan ke warga;
3. Pelaksanaan usulan prioritas belum semua terakomodir di DPA Kecamatan;
4. Pelaksanaan forkompincam baru akan di laksanakan 1 kali tiap triwulan.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir tahun 2023 sebesar Rp17.752.285.238,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp9.754.880.738,00 atau sebesar 54,95%, sedangkan realisasi fisik sebesar 69,76%.

4. Kecamatan Argomulyo

Rata- rata capaian kinerja program untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa untuk Kecamatan Argomulyo sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 64,77% atau masuk kategori sedang.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo tahun 2023 sebesar Rp17.117.826.688,00. Sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan adalah Rp9.217.949.671,00atau sebesar 53,85%, sedangkan realisasi fisik sebesar 60,41%

2.1.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun 2023 adalah sebesar 122,44% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sebesar Rp8.117.374.254,00 sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan adalah

Rp2.823.675.836,00 sebesar 28,40% sedangkan realisasi fisik sebesar 53,10%.

Adapun realisasi kinerja program, realisasi keuangan dan fisik tersaji pada lampiran hasil kinerja sebagaimana terlampir.

Tabel 2. 3 Evaluasi Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
A	**Urusan Pendidikan**					
	Dinas Pendidikan					
	Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Dinas Pendidikan
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	NA	NA	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					Dinas Pendidikan
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	100	113,46	113,46	
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	100	130,81	130,81	
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,01	0,00	
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,43	0,44	97,67	
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	87,29	87,28	99,99	
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,71	97,70	99,99	
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,96	NA	NA	
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen	%	1,78	NA	NA	
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,04	NA	NA	
	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,85	NA	NA	
	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI	%	20	NA	NA	
	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria	%	20	NA	NA	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	minimun AKM Jenjang SMP/MTs					
	APK PAUD	%	38,34	38,33	99,97	
	Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	0,12	NA	NA	
	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,34	87,33	99,99	
	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	33,33	NA	NA	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					Dinas Pendidikan
	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	20	NA	NA	
	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	16	NA	NA	
	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	50,00	NA	NA	
3	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**					Dinas Pendidikan
	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	30	NA	NA	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	40	NA	NA	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	50	NA	NA	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	84,96	86,91	102,30	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,31	97,39	100,08	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi		96,44	97,63	101,23	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Minimal S1 jenjang SMP					
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**					Dinas Pendidikan
	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	86,10	85,47	99,27	
	Persentase Pusat Kegiatandan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	58,34	83,33	142,84	
	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	28,57	NA	NA	
	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	97	NA	NA	
	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	97,00	NA	NA	
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**					Dinas Pendidikan
	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	10	NA	NA	
	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	10	NA	NA	
	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	17	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**46,50**	**77,39**	**99,05**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**166,44**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kemudahan akses dan kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya bantuan operasional serta Beasiswa kurang mampu				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pengampu kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
		ditetapkan				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melakukan evaluasi berkala dan mencermati schedule yang telah disusun				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan SDM yang ada				

Tabel 2. 4 Evaluasi Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
B	**Urusan Kesehatan**					
	Dinas Kesehatan					
1	**Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	NA	NA	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	85	NA	NA	
	Cost Recovery	%	100	NA	NA	
	Persentase Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	NA	NA	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					Dinas Kesehatan
	Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13	3,1	23,85	
	Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	130	97	74,62	
	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	54	41,16	76,22	
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	<1	0,02	100	
	Cakupankelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	26,1	4,34	16,63	
	Cakupanrumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	72	42	58,43	
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100,00	
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	85	94,74	111,46	
	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	75	17,40	23,20	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	98	NA	NA	
	Cakupan BIAS DT/Td	%	98	NA	NA	
	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	NA	NA	
	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	98	23,00	23,47	
	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100	20,15	20,15	
	Cakupan kepesertaan JKN	%	100	96	96,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	29,80	29,80	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	24,40	24,40	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	20,15	20,15	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	22,02	22,02	
	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	100	19,13	19,13	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	24,83	24,83	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	30,73	30,73	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	30,90	30,90	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	25,23	25,23	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	23	23,23	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	26,98	26,98	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	27,25	27,25	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	13,44	13,44	
	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	25	25,00	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100	100,00	
	cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan	%	100	100	100,00	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	kesehatan tradisional					
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100	100,00	
	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	64	84,78	132,47	
	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	80	87	108,75	
	Cakupan UCI kelurahan	%	100	NA	NA	
	Deteksi Dini Hepatitis	%	75	21,47	28,63	
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95	18,5	19,47	
	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	<10	11	98,00	
	Kasus HIV/ AIDSbaru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	65	100	153,85	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	82	30	36,59	
	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	80	66,67	83,34	
	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	12	18	150,00	
	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	1	50,00	
	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,5	11	233,33	
	Persentase Ibu hamil KEK	%	9	11,11	123,44	
	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12	13,04	108,67	
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100	100,00	
	Prevalensi Stunting pada Balita	%	10	8	80,00	
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100,00	
	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	100	NA	NA	
	Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	84	NA	NA	
	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas	%	82	NA	NA	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	dan KPM					
	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100	100	100,00	
	Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	66,67	83	124,49	
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,397	0,41	103,53	
	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	NA	NA	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	55	30	54,55	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					Dinas Kesehatan
	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	56	16,67	29,77	
	Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	82	12,77	15,57	
	Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	78	16,67	21,37	
	Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	62	13,33	21,50	
	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	87	1,15	1,32	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					Dinas Kesehatan
	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	95,6	NA	NA	
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,59	NA	NA	
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	95,59	NA	NA	
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	NA	NA	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	95,5	NA	NA	
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,43	19,1	20,44	
Rata - Rata Kinerja			**79,90**	**39,20**	**63,02**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**49,07**		
Predikat				**SANGAT RENDAH**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen para pemangku kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pecapaian SPM serta pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yang menyebabkan capaian kinerja belum bisa diukur				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan evaluasi secara berkala terkait capaian kinerja serta pengendalian oraganisasi kegiatan dengan tindak tindak lanjut yang terorganisir				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Tetap berpedoman pada target indikator kinerja urusan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditentapkan dengan melakukan perbaikan proses berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan				

Tabel 2. 5 Evaluasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
C	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta pembuangan air limbah					DPU PR
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	*78*	18,36	23,54	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					DPU PR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	*%*	*86*	6,52	7,58	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					DPU PR
	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	*%*	*86,89*	NA	NA	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					DPU PR
	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	*%*	*95,28*	5,61	5,89	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					DPU PR
	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	*%*	*76,51*	3,18	4,16	
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					DPU PR
	Rasio kepatuhan IMB	*%*	*80*	10,82	13,53	
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					DPU PR
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	*%*	*100*		-	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					DPU PR
	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	*%*	*93,9*	1,14	1,21	
	Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	*%*	*95,58*	NA	NA	
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					DPU PR
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	*%*	*75*	32,39	43,19	
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					DPU PR
	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	*%*	*97*	0,85	0,88	
Rata - Rata Kinerja			**87,65**	**9,86**	**11,11**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**11,25**		
Predikat				**SANGAT RENDAH**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1 . Pelaksanaan lelang yang tertib; 2. Terbukanya komunikasi antara dinas dengan masyarakat sehingga kerusakan dapat tertangani dengan cepat
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Terkendala proses koordinasi lintas SKPD; 2. Curah hujan yang tinggi menghambat jadwal penyelesaian proyek.
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mengawasi jalannya proyek sehingga bisa diselesaikan tepat waktu sesuai schedule
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Memaksimalkan anggaran pemeliharaan 2. Melakukan Lelang mendahului DPA untuk mempercepat pelaksanaan.

Tabel 2. 6 Evaluasi Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
D	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**					
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasara Masyarakat					DINAS PKP
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					DINAS PKP
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	25	27,78	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					DINAS PKP
	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	0	NA	NA	
	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	25	7	28,00	
	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	25	3	12,00	
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					DINAS PKP
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	4,78	NA	NA	
	terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	13,04	NA	NA	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni)	%	7,86	NA	NA	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					DINAS PKP
	cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	37	10	27,03	
	terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	17,26	NA	NA	
	cakupan lingkungan permukiman yang sehat	%	5,6	NA	NA	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	didukung PSU					
Rata - Rata Kinerja			**22,55**	**11,25**	**23,70**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**49,88**		
Predikat				**SANGAT RENDAH**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Ketersediaan anggaran dalam dokumen anggaran; 2. Ketersediaan SDM yang memadai				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih belum tersedianya data untuk melakukan pengukuran kinerja program				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan sesuai perencanaan anggaran				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD				

Tabel 2. 7 Evaluasi Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat : SATPOL PP

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
E	**Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	88	87,23	99,13	Satpol PP
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Satpol PP
	Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	%	95	100	105,26	
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00	
Rata - Rata Kinerja			**94,33**	**95,74**	**101,46**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**101,49**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Sesuai dengan KAK yang sudah dibuat; 2. Tersedianya Anggaran				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kurang Sarpras (Mobil Ransus Damkar); 2. Kurangnya data untuk dijadikan target operasi dari instansi terkait maupun unsurkewilayahan				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Sudah ada pengajuan Nodin untuk Ransus; 2. Menjalin koordinasi dengan unsur kewilayahan (kelurahan/kecamatan) serta dinas/opd terkait untuk dijadikan sasaran operasi				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati kembali pencapaian kinerja untuk melakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan hasil evaluasi				

Tabel 2. 8 Evaluasi Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat : BPBD

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
						BPBD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Nilai	85	NA	NA	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					BPBD
	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	30	30,00	
	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	30	30,00	
	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	30	30,00	
	Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	32	10	31,25	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
	Presentaseketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	65	75	115,38	
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	66	100	151,52	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100,00	
Rata - Rata Kinerja			**81,00**	**53,57**	**69,74**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**66,14**		
Predikat				**SEDANG**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Cepat Tanggap; 2. Peran serta Relawan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Penyusunan rencana program; 2. Kegiatan belum sesuai				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Rencana Strategi kinerja 2. Pengajuan perubahan APBD				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Rencana Kegiatan 2. Evaluasi target kinerja				

Tabel 2. 9 Evaluasi Kinerja Urusan Sosial

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
F	**Urusan Sosial**					
	Dinas Sosial					
	Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS					Dinsos
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89	88,15	99,04	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					Dinsos
	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	45,3	50	110,38	
	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	34,61	24	69,34	
	Persentase PSKS yang dibina	%	70	60	85,71	
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					Dinsos
	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100,00	
	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100,00	
	Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100,00	
	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100,00	
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					Dinsos
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**%**	97	NA	NA	
	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	**%**	94,5	100	105,82	
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					Dinsos
	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan	%	100	100	100,00	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota					
	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100,00	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					Dinsos
	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100,00	
Rata - Rata Kinerja			**86,95**	**85,18**	**97,52**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**97,96**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen dan kerjasama pengampu kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi belum dilakukan pencairan				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Perhitungan perencanaan dengan lebih cermat				

Tabel 2. 10 Evaluasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar					
G	**Urusan Tenaga Kerja**					
	Dinas Perindustrian danTenaga Kerja					
	Meningkatnya Kuantitas dan Daya Saing UMKM, Koperasi dan Industri					Disperinaker
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,98	91	103,43	
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					Disperinaker
	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	20	15	75,00	
	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,03	0,21	700,00	
3	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					Disperinaker
	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	57,14	137,14	240,01	
4	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					Disperinaker
	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	30	NA	NA	
	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25	40	160,00	
Rata - Rata Kinerja			**36,69**	**56,67**	**255,69**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**154,45**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen para pemangku kebijakan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih adanya kegiatan yang belum dilaksanakan pada Triwulan I yang menyebabkan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
		data untuk pengukuran kinerja belum bisa terpenuhi				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan evaluasi secara berkala dan POK yang terjadwal disertai dengan tindak lanjut yang selalu terpantau untuk pencapaian target kinerja				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati hasil evaluasi kinerja untuk mendukung tercapainya target kinerja berdasarkan dokumen perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek				

Tabel 2. 11 Evaluasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
H	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Meningkatnyan Cakupan Hak-Hak Anak, Kesetaraan dan Keberdayaan Perempuan					DP3AP2KP
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					DP3AP2KP
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	NA	NA	
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					DP3AP2KP
	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%	100	100	100,00	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,6	31,59	877,50	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100,00	
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	24	24	100,00	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					DP3AP2KP
	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	100,00	
	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	15,1426437	NA	NA	
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					DP3AP2KP
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	25	100,00	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					DP3AP2KP
	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100	100,00	
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					DP3AP2KP

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	57	NA	NA	
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					DP3AP2KP
	Persentase anak korban kekerasan	%	0,02	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**55,61**	**68,66**	**211,07**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**123,45**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan; 2. Dilakukan POK setiap bulan guna memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Masih terdapat keterlambatan dalam proses administrasi setelah pelaksanaan kegiatan; 2. Masih terdapat kendala dalam memahami petunjuk pelaksanaan untuk DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mencermati rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan DPA dan mencermati lagi kegiatan yang belum bisa dilaksanakan				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran berjalan sebagai evaluasi untuk perencanaan kegiatan di tahun berikutnya 2. membuat inovasi-inovasi kegiatan yang lebih efektif untuk pelayanan kepada masyarakat				

Tabel 2. 12 Evaluasi Kinerja Urusan Pangan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
I	**Urusan Pangan**					
	Dinas Pangan dan Pertanian					
	Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman					Dispangtan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Dispangtan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,836	89	103,69	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**					Dispangtan
	Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	0	80	100,00	
3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					Dispangtan
	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	70	NA	NA	
	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	6,2	6,89	111,13	
4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					Dispangtan
	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	7,14	NA	NA	
5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					
	Persentase Pangan segar aman	%	98	98	100,00	
Rata - Rata Kinerja			**44,53**	**68,47**	**103,70**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**153,77**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Tersedianya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen pimpinan dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Belum tersedianya data yang akurat untuk mengukur capaian kinerja pada TW II tahun 2023 serta belum patuhnya pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang telah ditentukan				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melakukan pengendalian kegiatan dan evaluasi secara berkala dan terorganisir agar setiap kendala bisa terdeteksi sejak dini				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati hasil evaluasi capaian kinerja serta komitmen terhadap target yang telah ditentukan pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek				

Tabel 2. 13 Evaluasi Kinerja Urusan Pertanahan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
J	**Pertanahan**					
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasara Masyarakat					Dinas PKP
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**					Dinas PKP
	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	25	NA	NA	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**					Dinas PKP
	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	40	NA	NA	
	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	25	NA	NA	
	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	20	6	30,00	
3	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**					Dinas PKP
	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	3	75	2.500,00	
	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	25	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**23,00**	**40,50**	**1265,00**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**176,09**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Ketersediaan anggaran dalam dokumen anggaran; 2. Ketersediaan SDM yang memadai
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih belum tersedianya data untuk melakukan pengukuran kinerja program
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan sesuai perencanaan anggaran
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD

Tabel 2. 14 Evaluasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
K	**Lingkungan Hidup**					
	Dinas Lingkungan Hidup					
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					DLH
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					DLH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	NA	NA	
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					DLH
	IKPLHD	Dokumen	1	NA	NA	
	KLHS	Dokumen	0	NA	NA	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					DLH
	Pemantauan Status Mutu Air	%	100	40	40,00	
	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100		-	
	Presentase Konservasi Lahan	%	5	40	800,00	
	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	10	40	400,00	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					DLH
	Persentase ruang terbuka hijau	%	17,2	NA	NA	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					DLH
	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	20	NA	NA	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					DLH
	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	25	25,00	
	PersentaseKetaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	37	54	146,92	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00	
	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100	NA	NA	
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					DLH
	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100	NA	NA	
	Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100	50	50,00	
	Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	20	NA	NA	
8	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					DLH
	Persentase Pengurangan Sampah	%	27	NA	NA	
	Persentase Penanganan Sampah	%	72	20	27,78	
	Persentase Pengangkutan Sampah	%	72	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**55,96**	**46,17**	**176,63**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**82,51**		
Predikat				**TINGGI**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Ketepatan dalam mengaplikasi dan merealisasikan kinerja berdasarkan perencanaan dan anggaran kas serta Terpenuhinya sarana dan prasarana, serta kompetensi SDM dalam hal teknis terkait
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Proses pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai perencanaan
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan berdasar perencanaan

Tabel 2. 15 Evaluasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik					Disdukcapil
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Disdukcapil
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88	90,3	102,61	
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					Disdukcapil
	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	**%**	95,6	94,1	98,43	
	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	**%**	79,52	85,57	107,61	
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					Disdukcapil
	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	**%**	98,7	99,6	100,91	
	PersentaseAkta Perkawinan non muslim	**%**	100	100	100,00	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					Disdukcapil
	Ketersediaan database kependudukan	**%**	100	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**93,64**	**93,91**	**101,91**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**100,30**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Peraturan terkait Adminduk lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Dukcapil
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Terbatasnya jumlah SDM yang mempunyai keahlian tekhnologi dan masih banyak sarana dan prasarana yang sudah ketinggalan tekhnologi dan belum adanya perangkat baru yang sesuai dengan kebutuhan tekhnologi
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Merencanakan Kegiatan Pelayanan diluar jam kerja dan hari kerja
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Menginformasikan Kebijakan Adminduk di berbagai media informasi

Tabel 2. 16 Evaluasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
M	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk					DP3AP2KP
1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					DP3AP2KP
	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	**%**	53	NA	NA	
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	**%**	1,85	0,90	48,65	
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	**%**	100	100	100,00	
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	**%**	2,5	0,39	15,60	
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	**Tahun**	21,9	NA	NA	
2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					DP3AP2KP
	Rasio akseptor KB baru	**%**	70	20,63	29,47	
	Cakupan peserta KB aktif	**%**	80	64,65	80,81	
	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	**rasio**	1:2	1:2	100,00	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	**%**	78	64,65	82,88	
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	**%**	15	20,54	136,93	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**%**	25,11	NA	NA	
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	**%**	85	NA	NA	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					DP3AP2KP
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	**rasio**	1:2	1:1,96	1,67	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	(PPKBD)					
	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	90	93,18	103,53	
	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	2	0,29	14,50	
	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	80	61,66	77,08	
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	80	97,27	121,59	
	Persentase Baduta Stunting	%	28		-	
Rata - Rata Kinerja			**50,77**	**47,65**	**65,19**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**93,85**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan; 2. Dilakukan POK setiap bulan guna memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakan
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Masih terdapat keterlambatan dalam proses administrasi setelah pelaksanaan kegiatan; 2. Masih terdapat kendala dalam memahami petunjuk pelaksanaan untuk DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mencermati rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan DPA dan mencermati lagi kegiatan yang belum bisa dilaksanakan
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran berjalan sebagai evaluasi untuk perencanaan kegiatan di tahun berikutnya 2. membuat inovasi-inovasi kegiatan yang lebih efektif untuk pelayanan kepada masyarakat

Tabel 2. 17 Evaluasi Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
N	**Perhubungan**					
	Dinas Perhubungan					
	Penyediaan dan Optomalisasi Sarana Transportasi Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan					Dishub
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Dishub
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,2	84	99,76	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					Dishub
	Persentase Rambu Rambu Terpasang	%	77	76	98,70	
	Persentase layanan angkutan darat	%	27,53	27,53	100,00	
Rata - Rata Kinerja			**62,91**	**62,51**	**99,49**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**99,36**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kerja sama yang baik antar internal dan eksternal
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Menyesuaikan kegiatan dengan Organda 2. Adanya perbedaan data trayek dengan data eksisting
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal (kegiatan fisik dan pencairan anggaran yang terjadwal di bulan Juli) 2. Sinkronisasi data dan pelaksanaan uji coba hasil kajian rerouting trayek.
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Tetap berpedoman pada target kinerja yang telah ditentukan pada dokumen perencanaan dengan melakukan perbaikan proses pencapaian berdasarkan hasil evaluasi RKPD

Tabel 2. 18 Evaluasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
O	**Komunikasi dan Informatika**					
	Dinas Komunikasi dan Infomatika					
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan					Diskominfo
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Diskominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	82	103,80	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					Diskominfo
	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	**%**	92	30	32,61	
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**					Diskominfo
	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	**%**	100	40	40,00	
	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**%**	95	40	42,11	
Rata - Rata Kinerja			**91,50**	**48,00**	**54,63**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**52,46**		
Predikat				**RENDAH**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kerjasama dan koordinasi antar tim dan stakeholder 2. Memiliki SOP dan CSIRT (Computer Security Insident Respon Team) yang membantu dalam pelaksanaan program				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder 2. Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan perencanaan yang lebih baik				

Tabel 2. 19 Evaluasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
P	**Koperasi dan UKM**					
	Dinas Koperasi dan UKM					
	Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri					Dinkop UKM
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,39	80	95,93	
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					Dinkop UKM
	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	51%	45,74	8.968,63	
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					Dinkop UKM
	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	26,32	2,13	8,09	
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					Dinkop UKM
	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	36,34	NA	NA	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					Dinkop UKM
	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	25	NA	NA	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					Dinkop UKM
	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	18	8	44,64	
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					Dinkop UKM
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	30,64	6	19,58	
Rata - Rata Kinerja			**22,79**	**28,37**	**1827,38**	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
Rata-rata Capaian Kinerja%				**124,51**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Peningkatkan pemahaman pengurus dan pengawas koperasi dalam memahami kepatuhan peraturan 2. Peningkatkan pemahaman pengurus koperasi dalam memahami data isian kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi 3. Adanya Pintar UMKM sebagai portal informasi bagi UKM untuk mengakses informasi dari Dinkop UKM secara lebih mudah dan akuntabel				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kegiatan pembubaran koperasi tidak aktif belum bisa direalisasikan karena SK tim masih dalam proses 2. Kesibukan koperasi dalam mempersiapkan keperluan lebaran bagi karyawan dan anggota koperasi 3. Belum semua UKM bisa mengoperasionalkan gawai dan mengikuti perkembangan zaman dan perlu				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Cek SK Tim Pembubaran Secara aktif 2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Kemenkop UKM RI mengenai surat rekomendasi ASN untuk melaksanakan pengawasan koperasi 3. Melakukan rekonsiliasi data untuk proses pemeriksaan kesehatan koperasi 4.Mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkan kualitas pelayanan baik secara daring maupun luring				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Kunjungan lapangan ke koperasi yang tidak RAT 2 tahun berturut-turut 2. Pemeriksaan Kesehatan koperasi dillakukan setiap tahun 3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas dan mempersiapkan kelengkapan pengadaan barang/jasa yang diperlukan 4. Estimasi waktu yang tepat dalam setiap kegiatan				

Tabel 2. 20 Evaluasi Kinerja Urusan Penanaman Modal

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
Q	**Penanaman Modal**					
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
	Meningkatnya Realisasi Investasi					DPMPTSP
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87	92,74	106,60	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					DPMPTSP
	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	484,99	266,437	54,94	
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					DPMPTSP
	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10	NA	NA	
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					DPMPTSP
	Prosentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	91	97,01	106,60	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					DPMPTSP
	Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	%	10	134,55	1.345,50	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					DPMPTSP
	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10	246,98	2.469,80	
Rata - Rata Kinerja			**115,50**	**167,54**	**816,69**	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
Rata-rata Capaian Kinerja%				**145,06**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Sosialisasi atas pentingnya legalitas usaha selalu dilaksanakan 2. Pengawasan kepada pelaku usaha terus dan kontinyu dilakukan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Kondisi global dan regional seperti perang dan kekawatiran pandemi lain				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Terus melakukan sosialiasi dan pengawasan kegiatan usaha				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Menetapkan target yang lebih realistis sesuai dengan kondisi perekonomian global dan nasional				

Tabel 2. 21 Evaluasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
R	**Kepemudaan dan Olahraga**					
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga					
	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga					Dispora
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Dispora
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	77	77,56	100,73	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					Dispora
	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5	2,49	49,80	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					Dispora
	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	25	NA	NA	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					Dispora
	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60	40	66,67	
Rata - Rata Kinerja			**41,75**	**40,02**	**72,40**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**95,85**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Ketersediaan SDM Baik itu dari Internal maupun dari Eksternal				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kegiatan Olahraga banyak dengan sistem berjenjang, apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang di bawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan juga. 2. Tidak tersedianya data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan.				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Melakukan koordinasi ke Provinsi maupun Nasional apakah kegiatan yang ada akan tetap dilaksanakan 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Merencanakan kegiatan pendataan sebagai dasar perencanaan kegiatan. 2. Melakukan sinkronisasi kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai.				

Tabel 2. 22 Evaluasi Kinerja Urusan Statistik

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
S	**Statistik**					
	Dinas Komunikasi dan Infomatika					
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan					Diskominfo
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					Diskominfo
	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	80	45	56,25	
	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	80	45	56,25	
Rata - Rata Kinerja			**80,00**	**45,00**	**56,25**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**56,25**		
Predikat				**RENDAH**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kerjasama dan koordinasi antar tim dan stakeholder 2. Memiliki SOP dan CSIRT (Computer Security Insident Respon Team) yang membantu dalam pelaksanaan program
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder 2. Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan perencanaan yang lebih baik

Tabel 2. 23 Evaluasi Kinerja Urusan Persandian

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
T	**Persandian**					
	Dinas Komunikasi dan Infomatika					
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan					Diskominfo
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					Diskominfo
	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	65	35	53,85	
Rata - Rata Kinerja			**65,00**	**35,00**	**53,85**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**53,85**		
Predikat				**RENDAH**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kerjasama dan koordinasi antar tim dan stakeholder 2. Memiliki SOP dan CSIRT (Computer Security Insident Respon Team) yang membantu dalam pelaksanaan program
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder 2. Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan perencanaan yang lebih baik

Tabel 2. 24 Evaluasi Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
U	**Kebudayaan**					
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
	Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya Kota Salatiga					Disbudpar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Disbudpar
	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	83	83	100,00	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					Disbudpar
	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	20	83,82	419,10	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					Disbudpar
	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	25	41,32	165,28	
3	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					Disbudpar
	Prosentase kajian sejarah	%	25	40	160,00	
4	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					Disbudpar
	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	7	20	285,71	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**					Disbudpar
	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	5,3	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**27,55**	**53,63**	**226,02**	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
Rata-rata Capaian Kinerja%				**194,66**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya perencanaan dan jadwal kegiatan yang terstruktur 2. Adanya kesamaan komitmen antara pimpinan, staf, dan stakeholder dalam melaksanakan kegiatan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Ketergantungan terhadap kebijakan pusat/provinsi/kota; 2. Faktor cuaca sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Peningkatan koordinasi dengan pimpinan, staf, dan stakeholder maupun OPD terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan 2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Peningkatan komitmen dan koordinasi dengan pimpinan, staf, dan stakeholder maupun OPD terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan				

Tabel 2. 25 Evaluasi Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
V	**Perpustakaan**					
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan					Dinpersip
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Dinpersip
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,21	85,20	103,64	
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					Dinpersip
	nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	81,83	64,50	78,82	
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			0,00		Dinpersip
	Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	%	0	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**54,68**	**49,90**	**91,23**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**91,26**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. adanya pengembangan virtual library tour, layanan perpustakaan hari sabtu, pelaksanaan kelas literasi berbasis inklusi sosial 2. adanya pendampingan pengelolaan arsip perangkat daerah, audit kearsipan perangkat daerah, pembinaan kearsipan bagi perangkat daerah				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1.tidak adanya anggaran untuk akuisisi/alih media naskah kuno 2. belum semua OPD mempunyai arsiparis, belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi SRIKANDI oleh beberapa perangkat daerah				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. meningkatkan pembinaan bagi pustakawan, pelaksanaan rintisan perpustakaan masyarakat 2. meningkatkan pembinaan kearsipan bagi perangkat daerah				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. meningkatkan pembinaan bagi pustakawan, pelaksanaan rintisan perpustakaan masyarakat, pengadaan bahan bacaan, penambahan konten lokal 2.melaksanakan pembinaan kearsipan bagi perangkat daerah, monitoring rutin pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, pelaksanaan SIKN/JIKN				

Tabel 2. 26 Evaluasi Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
W	**Kearsipan**					
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan					Dinpersip
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					Dinpersip
	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	**%**	**82**	100,00	121,95	
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**					Dinpersip
	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	20	NA	NA	
3	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**					Dinpersip
	Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	%	100	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**67,33**	**100,00**	**121,95**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**148,51**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. adanya pengembangan virtual library tour, layanan perpustakaan hari sabtu, pelaksanaan kelas literasi berbasis inklusi sosial 2. adanya pendampingan pengelolaan arsip perangkat daerah, audit kearsipan perangkat daerah, pembinaan kearsipan bagi perangkat daerah				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1.tidak adanya anggaran untuk akuisisi/alih media naskah kuno 2. belum semua OPD mempunyai arsiparis, belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi SRIKANDI oleh beberapa perangkat daerah				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	1. meningkatkan pembinaan bagi pustakawan, pelaksanaan rintisan perpustakaan				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	berikutnya:	masyarakat 2. meningkatkan pembinaan kearsipan bagi perangkat daerah				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. meningkatkan pembinaan bagi pustakawan, pelaksanaan rintisan perpustakaan masyarakat, pengadaan bahan bacaan, penambahan konten lokal 2.melaksanakan pembinaan kearsipan bagi perangkat daerah, monitoring rutin pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, pelaksanaan SIKN/JIKN				

Tabel 2. 27 Evaluasi Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
X	**Perikanan dan Kelautan**					
	Dinas Pangan dan Pertanian					
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan Masyarakat					Dispangtan
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					Dispangtan
	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	**%**	100	100	100,00	
	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	**%**	35	35	100,00	
2	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					Dispangtan
	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100	100,00	
	Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	100,00	
Rata - Rata Kinerja			**67,50**	**67,50**	**100,00**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**100,00**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Tersedianya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen pimpinan dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Belum tersedianya data yang akurat untuk mengukur capaian kinerja pada TW II tahun 2023 serta belum patuhnya pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang telah ditentukan				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melakukan pengendalian kegiatan dan evaluasi secara berkala dan terorganisir agar setiap kendala bisa terdeteksi sejak dini				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati hasil evaluasi capaian kinerja serta komitmen terhadap target yang telah ditentukan pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek				

Tabel 2. 28 Evaluasi Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
Y	**Pariwisata**					
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
	Meningkatnya Kunjungan Wisata pada Berbagai Destinasi Unggulan					Disbudpar
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					Disbudpar
	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100	14,29	14,29	
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					
	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100	16,67	16,67	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**					Disbudpar
	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100	100	100,00	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					Disbudpar
	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	60	100	166,67	
Rata - Rata Kinerja			**90,00**	**57,74**	**74,41**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**64,16**		
Predikat				**RENDAH**		

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya perencanaan dan jadwal kegiatan yang terstruktur 2. Adanya kesamaan komitmen antara pimpinan, staf, dan stakeholder dalam melaksanakan kegiatan
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Ketergantungan terhadap kebijakan pusat/provinsi/kota; 2. Faktor cuaca sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Peningkatan koordinasi dengan pimpinan, staf, dan stakeholder maupun OPD terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
		2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Peningkatan komitmen dan koordinasi dengan pimpinan, staf, dan stakeholder maupun OPD terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan				

Tabel 2. 29 Evaluasi Kinerja Urusan Pertanian

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
Z	**Pertanian**					
	Dinas Pangan dan Pertanian					
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan Masyarakat					Dispangtan
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					Dispangtan
	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	**%**	70	20	28,57	
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					Dispangtan
	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	**%**	70	20	28,57	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					Dispangtan
	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	**%**	0	-	100	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					Dispangtan
	Persentase kejadian bencana pertanian	**%**	0	20	60,00	
5	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					Dispangtan
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani					
	- Pemula	%	44	60	136,36	
	- Lanjut	%	44	74	168,18	
	- Madya	%	11,5	22	191,30	
	- Utama	%	1,95	**-**	-	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
Rata - Rata Kinerja			**30,18**	**27,00**	**89,12**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**89,46**		
Predikat				**TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Tersedianya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen pimpinan dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Belum tersedianya data yang akurat untuk mengukur capaian kinerja pada TW II tahun 2023 serta belum patuhnya pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang telah ditentukan				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melakukan pengendalian kegiatan dan evaluasi secara berkala dan terorganisir agar setiap kendala bisa terdeteksi sejak dini				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati hasil evaluasi capaian kinerja serta komitmen terhadap target yang telah ditentukan pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek				

Tabel 2. 30 Evaluasi Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AA	**Perdagangan**					
	Dinas Perdagangan					
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan					Disdag
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Disdag
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,07	84,03	99,95	
2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					Disdag
	Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	10	33	330,00	
3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					Disdag
	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	85	40	47,06	
	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	75	30	40,00	
	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	40	16	40,00	
	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	24	10	41,67	
	Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	16	7	43,75	
4	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					Disdag
	Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	100	NA	NA	
	Ketesediaan infromasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	komoditi	26	24	92,31	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					Disdag
	Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	60	60	100,00	
6	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					Disdag
	Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	70	60	85,71	
Rata - Rata Kinerja			**53,64**	**36,40**	**92,04**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**67,86**		
Predikat				**SEDANG**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian daerah 2. Tersedianya SDM				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Belum dapat mencairkan Dana Insentif Daerah 2.Terdapat beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaanya pada Triwulan II, III dan IV				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Memaksimalkan realisasi pelaksanaan kegiatan di triwulan II, III dan IV				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Mengalokasikan anggaran kegiatan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga 2. Meningkatkan sarana prasarana perekonomian daerah, peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah, peningkatan kelancaran arus distribusi kepokmas				

Tabel 2. 31 Evaluasi Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AB	**Perindustrian**					
	Dinas Perindustrian danTenaga Kerja					
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah					Disperinaker
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					Disperinaker
	Persentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,19	1,24	653,16	
2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**					Disperinaker
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	25	2	8,00	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,7	48	6.857,14	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	4,7	2,67	56,81	
Rata - Rata Kinerja			**7,65**	**13,48**	**1893,78**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**176,24**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen para pemangku kebijakan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih adanya kegiatan yang belum dilaksanakan pada Triwulan I yang menyebabkan data untuk pengukuran kinerja belum bisa terpenuhi				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan evaluasi secara berkala dan POK yang terjadwal disertai dengan tindak lanjut yang selalu terpantau untuk pencapaian target kinerja				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati hasil evaluasi kinerja untuk mendukung tercapainya target kinerja berdasarkan dokumen perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek				

Tabel 2. 32 Evaluasi Kinerja Urusan Transmigrasi

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AC	**Transmigrasi**					
	Dinas Perindustrian danTenaga Kerja					
1	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					Disperinaker
	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	100	20	20,00	
Rata - Rata Kinerja			**100,00**	**20,00**	**20,00**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**20,00**		
Predikat				**SANGAT RENDAH**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen para pemangku kebijakan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih adanya kegiatan yang belum dilaksanakan pada Triwulan I yang menyebabkan data untuk pengukuran kinerja belum bisa terpenuhi				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan evaluasi secara berkala dan POK yang terjadwal disertai dengan tindak lanjut yang selalu terpantau untuk pencapaian target kinerja				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati hasil evaluasi kinerja untuk mendukung tercapainya target kinerja berdasarkan dokumen perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek				

Tabel 2. 33 Evaluasi Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan					
	Sekretariat Daerah					
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik					Setda
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Setda
	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	%	100	NA	NA	
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	100	30	30,24	
	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	100	31,39	31,39	
	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	9	9,00	
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					Setda
	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan dan Kesra	%	100	NA	NA	
	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100	30,2	30,20	
	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100	22,08	22,08	
	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	95	26,02	27,39	
	Skor LPPD	Nilai	3,1	NA	NA	
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	NA	NA	
	Cakupan Penyusunan Produk Hukum Daerah	%	100	NA	NA	
	Cakupan fasilitasi Bantuan Hukum	%	100	NA	NA	
	Cakupan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	%	100	NA	NA	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	100	NA	NA	
	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	NA	NA	
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					Setda
	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perekonomian dan Pembangunan	%	100	NA	NA	
	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	NA	NA	
	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	100	NA	NA	
	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BMUD/BLUD	%	100	34	33,85	
	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	NA	NA	
	Cakupan Monev Bantuan Keuangan	%	100	NA	NA	
	Cakupan Koordinasi POK	%	100	NA	NA	
	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	83,73	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**95,37**	**26,11**	**26,31**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**27,38**		
Predikat				**SANGAT RENDAH**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen pemangku kebijakan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan Anggaran yang tersedia				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih kurangnya koordinasi antar asisten dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi serta belum tersedianya data untuk pengukuran kinerja pada TW II tahun 2023				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Meningkatkan koordinasi antar bagian serta pemenuhan data untuk proses evaluasi kinerja secara berkala				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melaksanakan evaluasi kinerja organisasi dengan melibatkan seluruh bagian serta mencermati capaian kinerja pada akhir tahun untuk menentukan rencan aksi pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangkan menengah				

Tabel 2. 34 Evaluasi Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan : Sekretariat DPRD

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Sekretariat DPRD					
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik					Sek DPRD
1	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**					
	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	75	33,67	44,89	
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					Sek DPRD
	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100	16	16,00	
	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100	6	6,00	
	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**93,75**	**18,56**	**22,30**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**19,79**		
Predikat				**SANGAT RENDAH**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Komitmen pengampu kegiatan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan 2. Kerjasama tiap bagian untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Pelaksanaan sub kegiatan untukfisik sudah dilaksanakan namun untuk administrasiSPJdari pengelola 2. Ralisasi keuangan di tw 1 belum terserap dengan maksimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	1. Segera melakukan pencairan anggaran di bulan berikutnya sehingga realisasi keuangan				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	berikutnya:	bisa terserap dengan maksimal 2. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal pelaksanaan per sub kegiatan 2. Pengalokasian anggaran kas lebih tepat agar realisasi dapat terserap sesuai dengan jadwal yang telah disusun				

Tabel 2. 35 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Perencanaan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
AD	**Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**					
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
	Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah					Bappeda
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Bappeda
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,50	81,46	99,95	
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					Bappeda
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	80	76,40	95,50	
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					Bappeda
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	80	88,98	111,22	
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	80	90,14	112,68	
Rata - Rata Kinerja			**80,00**	**84,24**	**104,84**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**105,31**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen seluruh personil perangkat daerah dalam pencapaian kinerja organisasi dan penggunaan anggaran yang tersedian sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dalam pencapaian target kinerja organisasi				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
		serta belum optimalnya pelaksanaan POK				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan POK dan evaluasi kinerja secara berkala serta melakukan tindak lanjut hasil evaluasi secara terorganisir				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Komitmen pada pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan				

Tabel 2. 36 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Keuangan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AE	**Keuangan**					
	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD)					
	Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah					BPKPD
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					BPKPD
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,50	60	74,53	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					BPKPD
	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,2	61	301,98	
	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	84,82	NA	NA	
	Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	97,78	NA	NA	
	Cash managenent (Persentase anggaran)	%	15,07	NA	NA	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	NA	NA	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	NA	NA	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			25		BPKPD
	Asset Management	Laporan	4	NA	NA	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					BPKPD
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	32,22	32,22	
Rata - Rata Kinerja			**65,23**	**44,56**	**136,24**	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
Rata-rata Capaian Kinerja%				**68,30**		
Predikat				**SEDANG**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen para pemangku kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih belum tersedianya data capaian kinerja pada TW II untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai dasar evaluasi dan pengendalian internal				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan evaluasi kinerja dan pengendalian organisasi kegiatan secara berkala agar pencapaian kinerja bisa termonitor secara reguler untuk mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Komitmen pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja RKPD				

Tabel 2. 37 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Kepegawaian

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AF	**Kepegawaian**					
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah					
	Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)					BKPSDM
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					BKPSDM
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,60	NA	NA	
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					BKPSDM
	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	1.47	NA	NA	
	Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	10	1	7,50	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	235,00	252,31	107,37	
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	25.16	24,33	2.311,03	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	93,00	94,62	101,74	
Rata - Rata Kinerja			**104,90**	**93,00**	**631,91**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**88,66**		
Predikat				**TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. adanya komitmen pimpinan dengan ditetapkannya perwali management talenta				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. terbatasnya anggaran untuk assesment sehingga pembayaran dilakukan setelah pergeseran anggaran 2. ada beberapa pelatihan dengan spesifikasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan penganggaran di DPA (biaya konsumsi peserta terpisah dengan kontribusi) 3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Orientasi PPPK sehingga peserta Orientasi tidak dapat menerima penyampaian materi dengan baik				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Sosialisasi tentang Layanan Ijin belajar dan Tugas Belajar				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melanjutkan sesuai dengan perencanaan awal, dengan mempertimbangan beberapa penghambat				

Tabel 2. 38 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Penelitian dan Pengembangan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AG	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					Bappeda
	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.	%	17	17,14	102,82	
Rata - Rata Kinerja			**16,67**	**17,14**	**102,82**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**102,82**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen seluruh personil perangkat daerah dalam pencapaian kinerja organisasi dan penggunaan anggaran yang tersedian sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dalam pencapaian target kinerja organisasi serta belum optimalnya pelaksanaan POK				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan POK dan evaluasi kinerja secara berkala serta melakukan tindak lanjut hasil evaluasi secara terorganisir				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Komitmen pada pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan				

Tabel 2. 39 Evaluasi Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Pendidikan dan Pelatihan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AG	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					BKPSDM
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	4,15	NA	NA	
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	13,98	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**9,07**	**0**	**0**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**0**		
Predikat				**SANGAT RENDAH**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. adanya komitmen pimpinan dengan ditetapkannya perwali management talenta				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. terbatasnya anggaran untuk assesment sehingga pembayaran dilakukan setelah pergeseran anggaran 2. ada beberapa pelatihan dengan spesifikasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan penganggaran di DPA (biaya konsumsi peserta terpisah dengan kontribusi) 3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Orientasi PPPK sehingga peserta Orientasi tidak dapat menerima penyampaian materi dengan baik				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Sosialisasi tentang Layanan Ijin belajar dan Tugas Belajar				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melanjutkan sesuai dengan perencanaan awal, dengan mempertimbangan beberapa penghambat				

Tabel 2. 40 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AH	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					
24	**Inspektorat**					
	Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah					Inspektorat
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78	-	-	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					Inspektorat
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	79	83	105,06	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	87	96	110,34	
	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	30	30	100,00	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					Inspektorat
	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	83	NA	NA	
Rata - Rata Kinerja			**71,40**	**52,25**	**78,85**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**73,18**		
Predikat				**SEDANG**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal. 2. Adanya kerjasama yang baik dengan Instansi vertikal yang terlibat seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya 3. Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah yang terlibat				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
		4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam pelaksanaan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kurang optimalnya penyerapan anggaran di tw. 1 karenapelaksanaan kegiatan di Tw. 1 masih terkendala persiapan kegiatan sehingga perencanaan yang sudah di tetapkan dalam anggaran kas belum terlaksana secara optimal 2. Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya yang pelaksaan nya sulit di prediksi tergantung rencana dari instansi tersebut				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Mengoptimalkan anggaran yang sudah di rencanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya2. melaksanakan komunikasi dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait agar kegiatan bisa di laksanakan tepat waktu				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Merencanakan kegiatan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada agar kegiatan dapat berjalan optimal 2. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal secara lebih optimal dengan komunikasi yang lebih instensif				

Tabel 2. 41 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan : Kec. Sidorejo

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
AI	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Kecamatan					
A	**KECAMATAN SIDOREJO**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	NA	NA	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					KECAMATAN SIDOREJO
	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,82	1,64	200,00	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					KECAMATAN SIDOREJO
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	40	41,6	104,00	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					KECAMATAN SIDOREJO
	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	3,75	3,75	
	Prosentase TerlaksananyaTugasForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	NA	NA	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					KECAMATAN SIDOREJO
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidorejo	%	93,52	5,42	5,80	
Rata - Rata Kinerja			**72,39**	**13,10**	**78,39**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**18,10**		
Predikat				**SANGAT RENDAH**		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Ketersediaan anggaran pendukung program kinerja				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan anggaran				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Merencanakan program kegiatan pendukung kinerja sesuai perencanaan				

Tabel 2. 42 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan : Kec. Argomulyo

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
B	**KECAMATAN ARGOMULYO**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	NA	NA	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					KECAMATAN ARGOMULYO
	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1,4	15,26	1.090,00	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					KECAMATAN ARGOMULYO
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	40	73	182,50	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					KECAMATAN ARGOMULYO
	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	NA	NA	
	Prosentase TerlaksananyaTugasForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	NA	NA	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					KECAMATAN ARGOMULYO
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Argomulyo	%	73,29	46,04	62,82	
Rata - Rata Kinerja			**69,12**	**44,77**	**445,11**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**64,77**		
Predikat				**RENDAH**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Ketersediaan anggaran pendukung program kinerja				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Ada kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai anggaran kas karena kurangnya ketelitian dalam penyusunan anggaran kas nya				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan anggaran				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Merencanakan, mencermati dan berkoordinasi supaya kegiatan dapat tepat sesuai jadwal atau anggaran kas yang telah ditentukan				

Tabel 2. 43 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan : Kec. Sidomukti

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
D	**KECAMATAN SIDOMUKTI**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	96,9	NA	NA	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					KECAMATAN SIDOMUKTI
	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,85	1	117,65	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					KECAMATAN SIDOMUKTI
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	50	75	150,00	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					KECAMATAN SIDOMUKTI
	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	NA	NA	
	Prosentase TerlaksananyaTugasForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	30	30,00	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					KECAMATAN SIDOMUKTI
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidomukti	%	85	90	105,88	
Rata - Rata Kinerja			**72,13**	**49,00**	**100,88**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**67,94**		
Predikat				**SEDANG**		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Adanya komitmen dan koordinasi yang baik				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Kurang Cermat dalam penyusunan anggaran kas, sehingga ada kegiatan yang tidak bisa berjalan dengan semestinya				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas tiap triwulan				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Lebih meningkatkan koordinasi agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana				

Tabel 2. 44 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan : Kec. Tingkir

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
C	**KECAMATAN TINGKIR**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	NA	NA	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					KECAMATAN TINGKIR
	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,83	0,99	119,28	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					KECAMATAN TINGKIR
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	40	65,59	163,98	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					KECAMATAN TINGKIR
	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	100	100,00	
	Prosentase TerlaksananyaTugasForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	25	25,00	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					KECAMATAN TINGKIR
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Tingkir	%	71	30	42,25	
Rata - Rata Kinerja			**68,64**	**44,32**	**90,10**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**64,56**		
Predikat				**RENDAH**		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	ketersediaan anggaran, komitmen pengampu kegiatan				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Pelaksanaan pembuatan SKM pada tw2, 2. Belum bisa dilakukan penghitungan SPPT PBB yang disebarkan ke warga, 3. Pelaksanaan usulan prioritas belum semua terakomodir di DPA kecamatan, 4. Pelaksanaan forkompincam baru akan di laksanakan 1x tiap triwulan				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Meningkatkan kinerjadi triwulan berikutnya				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati kegiatan dan merencanakan anggaran				

Tabel 2. 45 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum : Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	84,75	86	101,47	
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					
	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila	%	60	70	116,67	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					KESBANG
	Persentase pendidikan Politikyang dilaksanakan	%	100	50	50,00	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					KESBANG
	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	40	10	25,00	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					KESBANG
	prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	4	50	1.250,00	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	50	NA	NA	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja RKPD s.d TW II 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja RKPD Tahun 2023	OPD
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					KESBANG
	Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	10	100	1.000,00	
Rata - Rata Kinerja			**49,82**	**61,00**	**423,86**	
Rata-rata Capaian Kinerja%				**122,44**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**		
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam menentukan kegiatan sesuai skala prioritas, Kebijakan Kepala Badan Kesbangpol Kota Salatiga dalam menyusun strategi penentuan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga dapat mencapai kualitas secara maksimal, SDM yang memadai, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak yang berhubungan baik internal maupun eksternal.				
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pengurangan pagu anggaran karena menurunnya pendapatan Pemerintah Kota Salatiga dan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam menentukan kegiatan sesuai skala prioritas.				
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Merencanakan strategi yang lebih tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan selalu mematuhi aturan yang berlaku serta kebijakan yang telah ditetapkan, lebih selektif dalam penyusunan anggaran sesuai skala prioritas, melakukan pengalihan sisa anggaran terhadap kegiatan yang capaian realisasi anggarannya tidak maksimal ke kegiatan yang masih kekurangan anggaran untuk memenuhi capaian kinerja secara maksimal.				
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Merencanakan kegiatan fokus pada kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.				

Tabel 2. 46 Rekap Realisasi Pelaksanaan Kegiatan s.d. Bulan Juni 2023

No	OPD	Pagu	Target Keuangan s.dJuni		Realisasi Keuangan s/d Juni			Target Fisik	Realisasi Fisik
			Rp.	(%)	Rp.	(%) terhadap target Juni	(%) terhadap Pagu	(%)	(%)
1.	Dinkes	129.626.581.509	78.820.622.273	60,81	60.779.067.958	77,11	46,89	60,81	61,56
2.	Disdik	196.613.385.482	106.570.686.575	54,20	75.114.026.243	70,48	38,20	54,20	52,85
3.	RSUD	118.663.489.000	66.305.399.000	55,88	47.777.339.958	72,06	40,26	55,88	45,00
4.	DPUPR	87.319.429.036	36.737.311.474	42,07	9.571.214.978	26,05	10,96	42,07	32,79
5.	Dinperkim	25.404.522.849	9.063.025.885	35,67	6.981.417.670	77,03	27,48	35,67	45,96
6.	Satpol PP	12.982.850.269	7.547.523.990	58,13	5.398.466.373	71,53	41,58	48,43	51,71
7.	BPBD	3.025.611.821	1.956.807.850	64,67	1.386.736.858	70,87	45,83	64,67	63,67
8.	Dinsos	11.295.072.102	7.260.543.906	64,28	5.601.467.732	77,15	49,59	64,28	55,91
9.	Disperinaker	8.616.528.829	4.647.403.100	53,94	3.129.362.696	67,34	36,32	53,94	66,40
10.	DP3APPKB	13.353.209.379	8.205.618.150	61,45	5.452.321.097	66,45	40,83	61,45	49,12
11.	Dispangtan	18.547.934.239	9.325.769.970	50,28	7.757.963.206	83,19	41,83	50,28	51,11
12.	DLH	39.966.775.666	27.486.152.429	68,77	19.361.550.909	70,44	48,44	68,77	55,01
13.	Disdukcapil	5.720.883.231	3.342.247.840	58,42	2.634.546.850	78,83	46,05	58,42	63,00
14.	Dishub	11.842.082.140	9.122.572.159	77,04	4.984.519.696	54,64	42,09	77,04	65,83
15.	Diskominfo	11.978.553.607	6.212.249.474	51,86	4.372.312.216	70,38	36,50	51,86	56,99
16.	Dinkop UKM	6.377.929.981	3.243.143.301	50,85	2.486.416.572	76,67	38,98	50,85	50,53
17.	DPMTPSP	4.939.307.589	3.746.608.789	75,85	1.850.818.900	49,40	37,47	75,85	56,08
18.	Dispora	16.434.946.715	11.589.162.907	70,52	9.931.068.424	85,69	60,43	70,52	69,19
19.	Disbudpar	10.670.272.483	6.779.172.136	63,53	2.730.732.906	40,28	25,59	63,53	66,17

No	OPD	Pagu	Target Keuangan s.dJuni		Realisasi Keuangan s/d Juni			Target Fisik	Realisasi Fisik
			Rp.	(%)	Rp.	(%) terhadap target Juni	(%) terhadap Pagu	(%)	(%)
20.	Dinpersip	10.075.135.802	5.435.791.203	53,95	3.710.124.510	68,25	36,82	53,95	52,34
21.	Disdag	15.907.485.988	9.861.188.294	61,99	6.770.858.052	68,66	42,56	56,14	49,54
22.	Sekretariat Daerah	35.261.252.214	26.146.809.950	74,15	16.482.769.826	63,04	46,74	74,15	53,21
23.	Sekretariat DPRD	50.341.290.510	36.482.046.190	72,47	22.160.700.946	60,74	44,02	72,47	53,81
24.	Bappeda	9.998.006.857	5.001.611.457	50,03	3.394.692.408	67,87	33,95	50,03	60,00
25.	BPKPD	19.386.581.516	15.636.994.529	80,66	8.116.248.439	51,90	41,87	80,66	62,70
26.	BKPSDM	9.833.274.571	5.721.008.050	58,18	4.432.111.012	77,47	45,07	58,18	51,68
27.	Inspektorat	9.513.078.208	5.999.384.850	63,06	3.621.631.081	60,37	38,07	63,06	61,72
28.	Kec. Sidomukti	12.985.975.971	8.966.900.400	69,05	7.838.721.301	87,42	60,36	69,05	65,06
29.	Kec. Sidorejo	16.928.290.962	10.765.745.432	63,60	8.932.202.500	82,97	52,76	63,60	61,75
30.	Kec. Tingkir	17.752.285.238	11.723.352.250	66,04	10.684.657.092	91,14	60,19	66,04	69,76
31.	Kec. Argomulyo	17.117.826.688	11.533.727.985	67,38	9.290.071.469	80,55	54,27	67,38	60,41
32.	Bakesbangpol	16.712.920.548	6.236.261.748	37,31	4.746.044.198	76,10	28,40	37,31	53,10
Total		975.192.771.000	567.472.843.546	58,19	387.482.184.076	68,28	39,73	58,19	56,69
	Capaian Rata-Rata Tingkat Kota					**69,44**	**41,89**	**60,02**	**56,69**

2.2. Kendala dan Permasalahan

Dari hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dihadapi perlu ditindaklanjuti, antara lain :

2.2.1 Kondisi Internal

Secara umum kendala dan permasalahan internal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah :

1. Proses perencanaan yang belum matang terkait dengan personil organisasi kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, penentuan sasaran/lokasi kegiatan serta pembiayaan;
2. Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik kegiatan dan serapan keuangan di Triwulan II/Semester I Tahun 2023.

Sedangkan kendala dan permasalahan per urusan yang capaian indikator program masih rendah adalah sebagai berikut :

a. Urusan Kesehatan

Masih adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yang menyebabkan capaian kinerja belum bisa diukur.

b. Urusan Pendidikan

Walaupun rata-rata capaian kinerja sudah masuk kategori tinggi, tetapi indikator kinerja urusan Pendidikan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan indikator kinerja sampai dengan TW II Tahun 2023 belum bisa diukur karena belum adanya data dukung untuk menghitung realisasi kinerja.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja program terkendala proses koordinasi lintas OPD yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhambat tidak sesuai dengan agihan waktu yang telah direncanakan.

d. Urusan Sosial

Capaian kinerja program sosial khususnya untuk pemberdayaan sosial, belum tercapai secara optimal, karena beberapa kegiatan belum dilaksanakan pada Semester I tahun 2023 dan proses assesment untuk LKS/LKSA tergantung pada kebijakan/jadwal

lembaga yang melakukan assesment walaupun kegiatan pendukung assesment tetap dilaksanakan.

e. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder;
2) Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja.

f. Pariwisata dan Kebudayaan

Rendahnya capaian kinerja urusan pariwisata dipengaruhi oleh rendahnya obyek wisata yang ditingkatkan dan kurangnya fasilitasi pemasaran pariwisata. Sedangkan pada kinerja urusan kebudayaan, walaupun secara umum sudah mencapai kinerja tinggi, akan tetapi tahapan yang dilaksanakan masih sebatas penetapan cagar budaya, belum kepada pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sehingga untuk kinerja urusan Kebudayaan belum optimal.

g. Koperasi dan UMKM

Capaian kinerja urusan UMKM yang mewakili ekonomi kerakyatan masih sangat rendah karena masih kecilnya persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan dan masih sediktnya Usaha Mikro yang dikembangkan.

h. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan Lingkungan Hidup masih belum bisa diukur karena belum tersedianya data dukung untuk menghitung kinerja. Indikator kinerja berupa ketersediaan ruang terbuka hijau serta persampahan masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena pekerjaan yang direncanakan belum dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

i. Pengawasan

Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan pengawasan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 bahwa Kabupaten/Kota dengan anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah belum dapat direalisasi karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan sehingga peran dan fungsi pengawasan belum optimal;

j. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan kegiatan untuk urusan kesekretariatan daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, akan tetapi karena ada beberapa kinerja yang penilaiannya hanya yang bisa dilaksanakan pada akhir tahun, maka berpengaruh pada capaian kinerja di TW II tahun 2023. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antar asisten dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja pada TW II Tahun 2023.

k. Sekretariat DPRD

Capaian target kinerja urusan kesekretariatan DPRD yang masih sangat rendah disebabkan sebagai berikut ;

1) Kinerja Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi dan Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD dihitung berdasarkan realisasi fisik yang telah didukung administriasi SPJ, sedangkan sampai dengan TW II kegiatan tersebut belum diajukan SPJ.
2) Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD disusun pada akhir tahun sehingga belum ada realisasi di Triwulan II.

l. Kecamatan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik masih belum dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena belum siapnya organisasi kegiatan oleh Kelurahan pelaksana.

2.2.2 Kondisi Eksternal

Secara umum kendala dan permasalahan eksternal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah :

1. Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, yang berakibat pada penyesuaian APBD 2023;
2. Keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan belum bisa sesuai waktu yang direncanakan.

Sedangkan kendala dan permasalahan per urusan yang capaian indikator program masih rendah adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Cuaca dan curah hujan yang masih tinggi serta kondisi alam yang tidak bisa diprediksi mepengaruhi pekerjaan konstruksi yang akhirnya berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan.

b. Urusan Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun menjadi salah satu penyebab, kinerja indikator program urusan komunikasi dan informatika masih sedang.

c. Urusan Statistik

Salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja urusan statistik, karena ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun.

d. Urusan Persandian

Tingkat pengamanan informasi daerah yang menjadi indikator minerja urusan persandian diukur melalui mekanisme yang dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga pada TW II tahun 2023, indikator tersebut belum bisa dinilai.

e. Urusan Transmigrasi

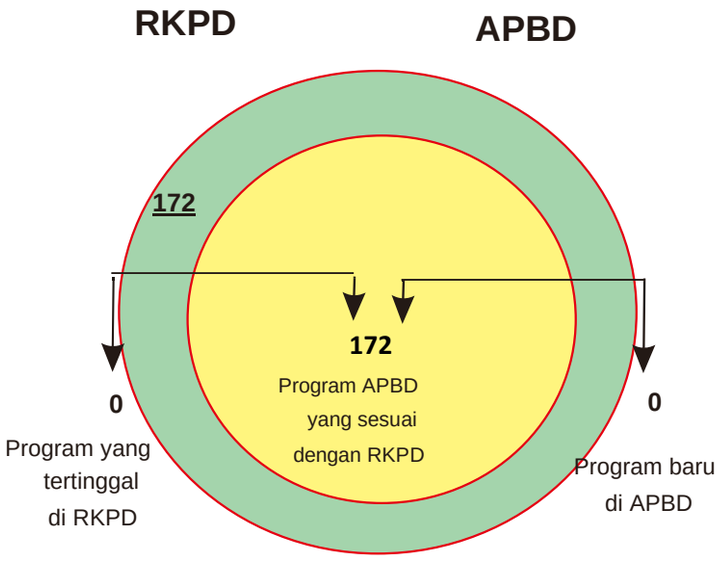
Faktor penyebab dari rendahnya capaian kinerja urusan transmigrasi adalah belum dilaksanakannya kegiatan pendukung pencapaian kinerja, serta kebijakan alokasi calon transmigrasi yang tergantung dengan kebijakan provinsi.

f. Pengawasan

Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaam Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya serta para pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi tergantung rencana dari instansi tersebut.

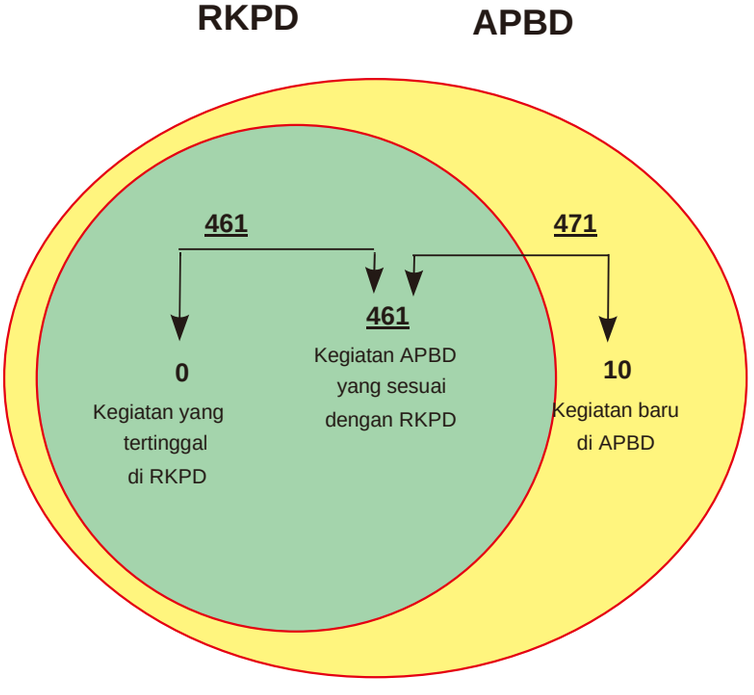
Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian Kesesuaian dokumen antara APBD dengan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

a) Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2023 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2023



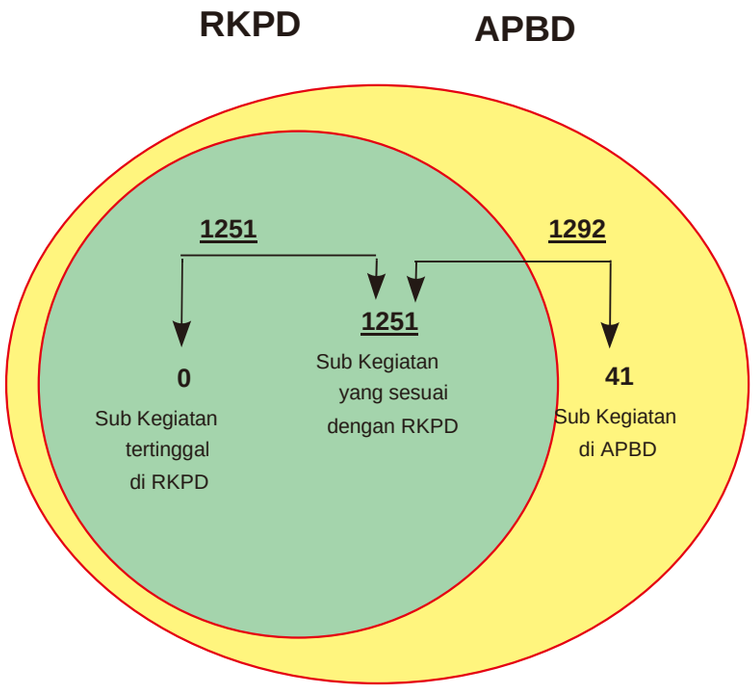
Sumber : Diolah Bappeda, 2023

b) Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2023



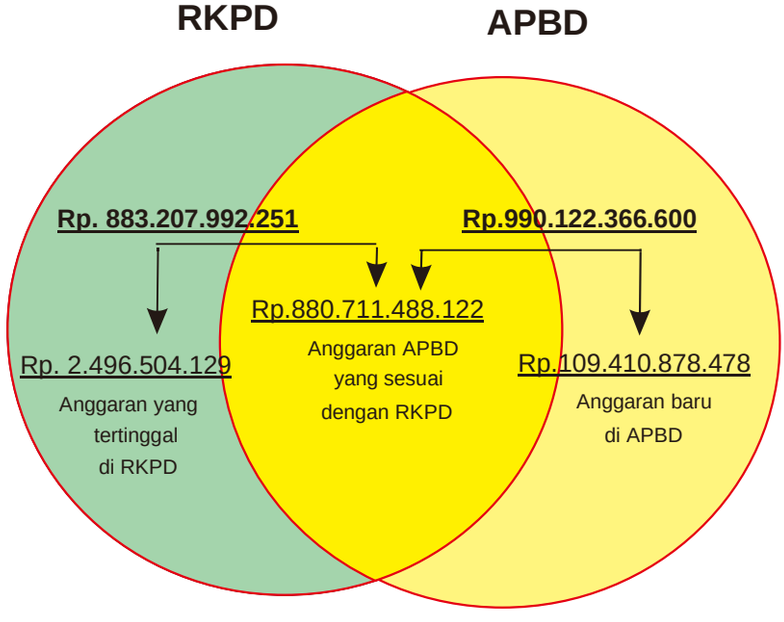
Sumber : Diolah Bappeda, 2023

c) Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 dengan Jumlah Sub Kegiatan dalam APBD Tahun 2023



Sumber : Diolah Bappeda, 2023

d) Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun 2023 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun 2023



Sumber : Diolah Bappeda, 2023

2.3. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2023

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut :

1) Masih tingginya angka pengangguran dan banyaknya penduduk miskin akibat dampak Covid-19;
2) Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3) Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk;
4) Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial;
5) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah;
6) Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur;
7) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang;
8) Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah.

Tabel 2. 47 Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Stategis

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1.	Permasalahan dampak Covid masih menjadi kebijakan Nasional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	Masih tingginya angka pengangguran dan banyaknya penduduk miskin akibat dampak Covid-19
2.	Capaian kinerja urusan UMKM yang mewakili ekonomi kerakyatan masih sangat rendah karena masih kecilnya persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan dan masih sedikitnya Usaha Mikro yang dikembangkan	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk
3.	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik masih belum dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena belum siapnya organisasi kegiatan oleh Kelurahan pelaksana.	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial
	Capaian kinerja program sosial khususnya untuk pemberdayaan sosial, belum tercapai secara optimal, karena	

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
	beberapa kegiatan belum dilaksanakan pada Semester I tahun 2023 dan proses assesment untuk LKS/LKSA tergantung pada kebijakan/jadwal lembaga yang melakukan assesment walaupun kegiatan pendukung assesment tetap dilaksanakan	
4.	Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh :	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur
	a. Capaian kinerja program karena terkendala proses koordinasi lintas OPD yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhambat tidak sesuai dengan agihan waktu yang telah direncanakan	
	b. Cuaca dan curah hujan yang masih tinggi serta kondisi alam yang tidak bisa diprediksi mepengaruhi pekerjaan konstruksi yang akhirnya berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan	
5.	Kinerja urusan Lingkungan Hidup masih belum bisa diukur karena belum tersedianya data dukung untuk menghitung kinerja. Indikator kinerja berupa ketersediaan ruang terbuka hijau serta persampahan masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena pekerjaan yang direncanakan belum dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang
6.	Kinerja urusan pendidikan dan kesehatan belum sesuai dengan target dikarenakan :	Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
	a. Walaupun rata-rata capaian kinerja sudah masuk kategori tinggi, tetapi indikator kinerja urusan Pendidikan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan indikator kinerja sampai dengan TW II Tahun 2023 belum bisa diukur karena belum adanya data dukung untuk menghitung realisasi kinerja	
	b. Masih adanya beberapa kegiatan	

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
	yang belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yang menyebabkan capaian kinerja belum bisa diukur	
7.	Rendahnya capaian kinerja urusan pariwisata dipengaruhi oleh rendahnya obyek wisata yang ditingkatkan dan kurangnya fasilitasi pemasaran pariwisata. Sedangkan pada kinerja urusan kebudayaan, walaupun secara umum sudah mencapai kinerja tinggi, akan tetapi tahapan yang dilaksanakan masih sebatas penetapan cagar budaya, belum kepada pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sehingga untuk kinerja urusan Kebudayaan belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah
8.	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan masih memiliki beberapa permasalahan antara lain :	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah
	a. Masih adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yang menyebabkan capaian kinerja belum bisa diukur	
	b. Salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja urusan statistik, karena ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun	
	c. Tingkat pengamanan informasi daerah yang menjadi indikator minerja urusan persandian diukur melalui mekanisme yang dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga pada TW II tahun 2023, indikator tersebut belum bisa dinilai	
	d. Faktor penyebab dari rendahnya capaian kinerja urusan transmigrasi adalah belum dilaksanakannya kegiatan pendukung pencapaian kinerja, serta kebijakan alokasi calon transmigrasi yang tergantung dengan kebijakan provinsi	
	e. Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaam Negeri, Pihak	

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
	Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya serta para pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi tergantung rencana dari instansi tersebut	
	f. Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder;	
	g. Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja	
	h. Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan pengawasan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 bahwa Kabupaten/Kota dengan anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah belum dapat direalisasi karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan sehingga peran dan fungsi pengawasan belum optimal	
	i. Pelaksanaan kegiatan untuk urusan kesekretariatan daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, akan tetapi karena ada beberapa kinerja yang penilaiannya hanya yang bisa dilaksanakan pada akhir tahun, maka berpengaruh pada capaian kinerja di TW II tahun 2023. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antar asisten dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja pada TW II Tahun 2023	
	j. Kinerja Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi dan Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD dihitung berdasarkan realisasi fisik yang telah didukung administriasi SPJ,	

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
	sedangkan sampai dengan TW II kegiatan tersebut belum diajukan SPJ.	
	k. Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD disusun pada akhir tahun sehingga belum ada realisasi di Triwulan II	
	l. Ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun menjadi salah satu penyebab, kinerja indikator program urusan komunikasi dan informatika masih sedang	
9.	Proses perencanaan yang belum matang terkait dengan personil organisasi kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, penentuan sasaran/lokasi kegiatan serta pembiayaan;	Permasalahan Internal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan
10.	Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik kegiatan dan serapan keuangan di Triwulan II/Semester I Tahun 2023	
11.	Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, yang berakibat pada penyesuaian APBD 2023;	Permasalahan Eksternal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan
12.	Keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan belum bisa sesuai waktu yang direncanakan	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2023.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17% (y-on-y), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh peningkatan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,23% (y-on-y), seiring dengan naiknya mobilitas, membaiknya

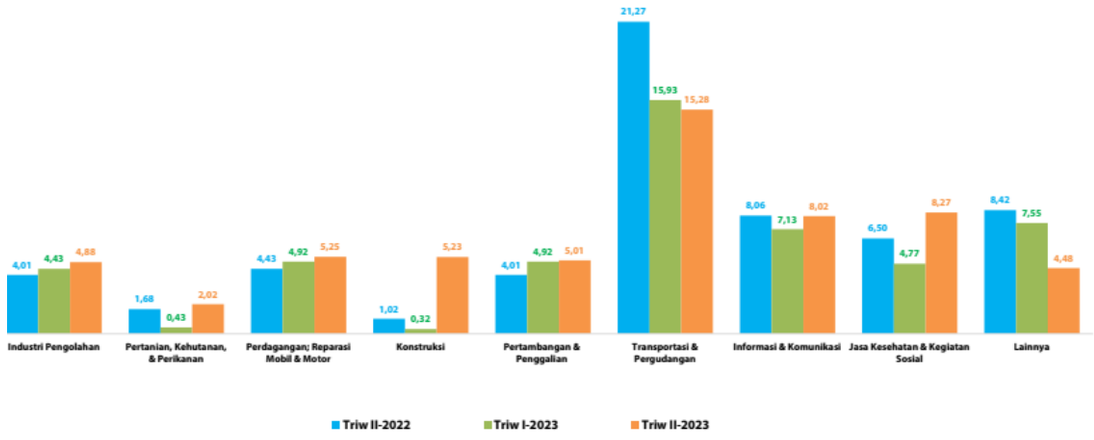
ekspektasi pendapatan, terkendalinya inflasi, dan dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara. Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi sebesar 10,62% (y-on-y), terutama didorong oleh belanja pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 4,63% (y-on-y), didorong terutama oleh perbaikan investasi nonbangunan yang tecermin dari membaiknya pertumbuhan impor barang modal. Selain itu, investasi bangunan juga tumbuh positif seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Namun demikian, ekspor secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 2,75% (y-on-y), khususnya ekspor barang sejalan dengan pelemahan ekonomi global, di tengah ekspor jasa yang tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.



Gambar 3. 1 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)

Sumber : BPS, 2023

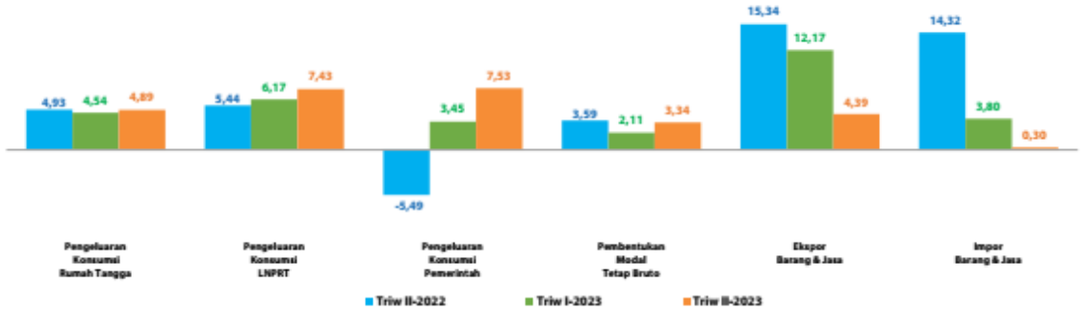
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan II 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2023 yang tinggi tercatat di sebagian besar wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).



Gambar 3. 2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

Sumber : BPS, 2023

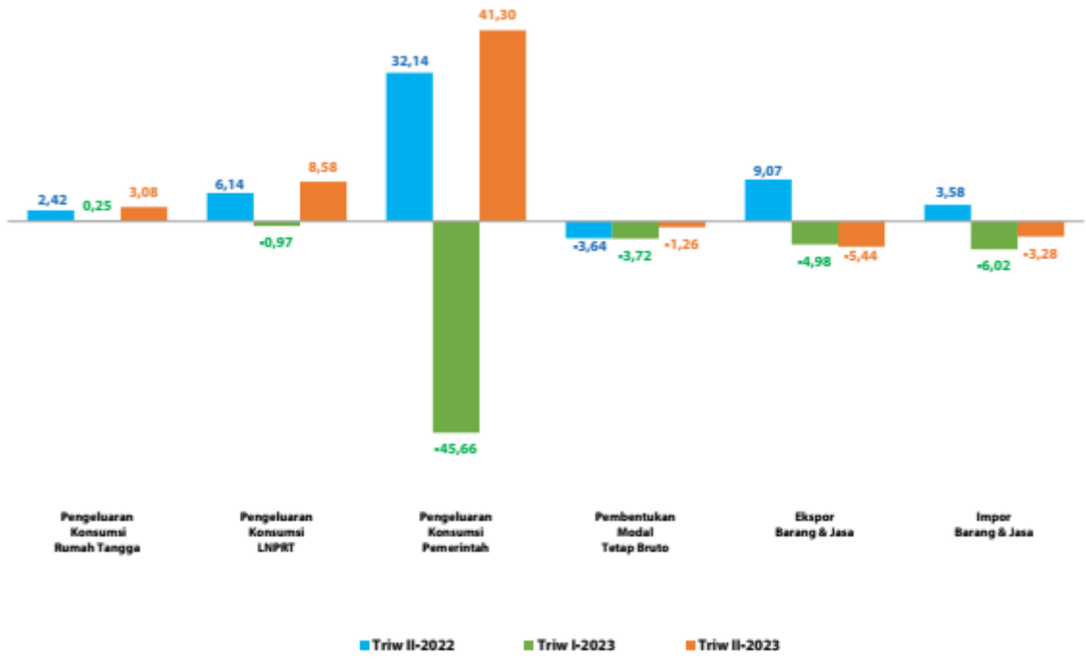
Ekonomi Indonesia semester I-2023 terhadap semester I-2022 tumbuh sebesar 5,11 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,53 persen.



Gambar 3. 3 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)

Sumber : BPS, 2023

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun.



Gambar 3. 4 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (Persen)

Sumber : BPS, 2023

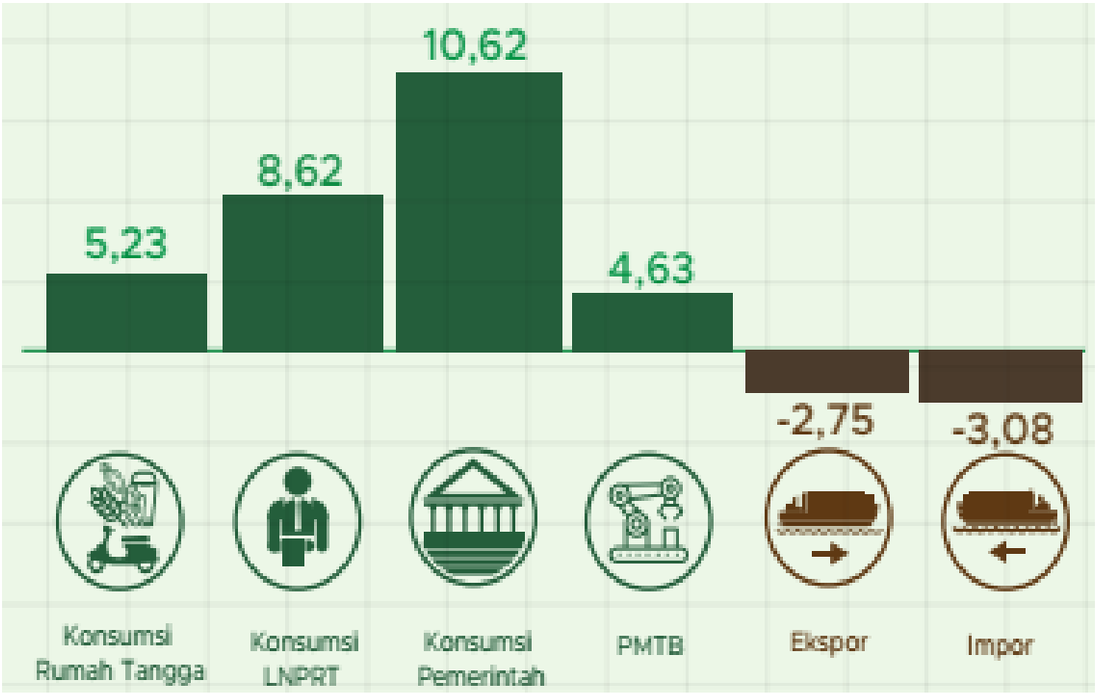
Ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen *(q-to-q)*. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,80 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen.



Gambar 3. 5 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Wilayah (persen)

Sumber : BPS, 2023

Ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.



Gambar 3. 6 Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (y-on-y) (persen)
Sumber : BPS, 2023

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang terkontraksi sebesar 2,75 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 10,62 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 8,62 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,23 persen; dan Komponen PMTB sebesar 4,63 persen; Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 3,08 persen.

3.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2023

Berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), total Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan di Jawa Tengah pada triwulan II-2023 mencapai Rp421,28 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 tercatat sebesar Rp275,01 triliun. Capaian PDB nasional ADHB pada triwulan ini tercatat sebesar Rp5.226,7 triliun, sedangkan menurut ADHK tercatat mencapai Rp3.075,7 triliun. Ekonomi Jawa Tengah secara

tahunan (*y on y*) pada triwulan II-2023 tumbuh 5,23 persen, sedikit melampaui perekonomian Indonesia yang tumbuh 5,17 persen.



	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
	2020			2021				2022*				2023**	
Jateng	-5,93	-3,74	-3,32	-0,53	5,89	2,73	5,41	5,12	5,62	5,27	5,24	5,05	5,23
Nasional	-5,32	-3,49	-2,17	-0,69	7,08	3,53	5,03	5,02	5,46	5,73	5,01	5,04	5,17

Keterangan: *= Angka Sementara
**= Angka Sangat Sementara

Gambar 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (y-on-y), 2020-2023

Sumber : BPS, 2023

Empat lapangan usaha yang memiliki peran dominan di Jawa Tengah, yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta lapangan usaha Konstruksi tumbuh secara y on y masing-masing sebesar 3,83; 2,87; 6,33; dan 5,66 persen.

Berdasarkan keterbandingan antar triwulan *(q to q),* pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif pada triwulan II-2023 sebesar 1,61 persen, meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,56 persen maupun jika dibandingkan triwulan II-2022 yang tumbuh sebesar 1,43 persen.

Empat lapangan usaha yang memiliki peran dominan di Jawa Tengah, yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta lapangan usaha Konstruksi tumbuh secara q to q masing-masing sebesar 1,52; -6,24; 1,67; dan 2,51 persen.



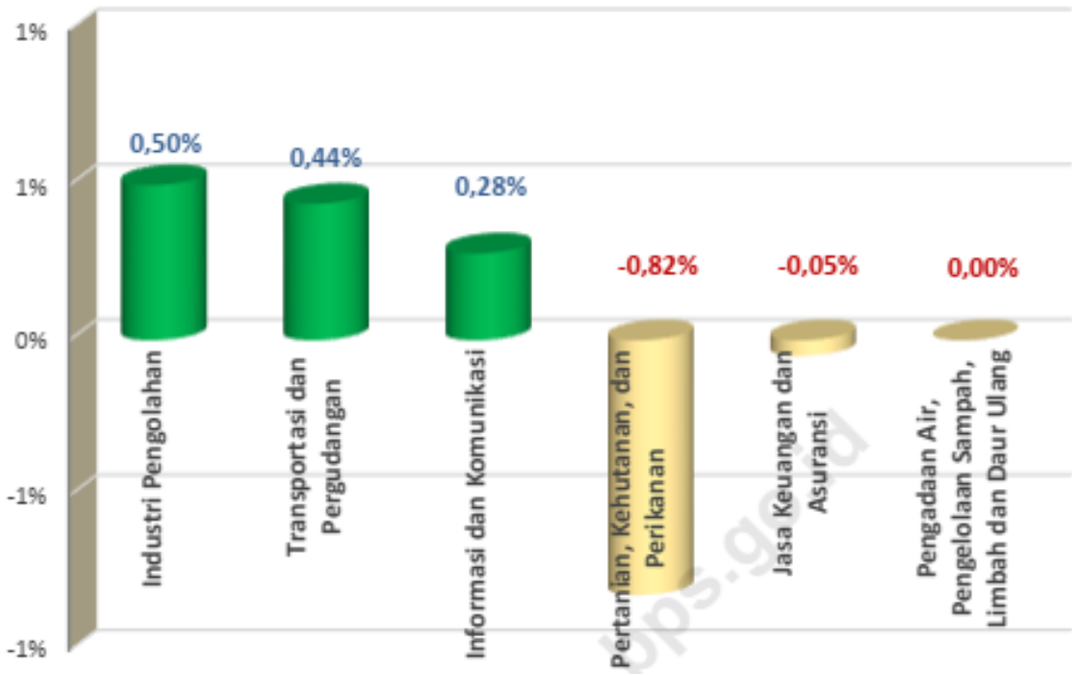
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
	2020			2021				2022*				2023**	
Jateng	-5,16	4,80	-1,90	2,02	0,96	1,67	0,66	1,74	1,43	1,34	0,63	1,56	1,61
Nasional	-4,19	5,05	-0,40	-0,93	3,30	1,57	1,05	-0,94	3,73	1,83	0,36	-0,91	3,86

Keterangan: *= Angka Sementara, **= Angka Sangat Sementara

Gambar 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (q-to-q), 2020-2023

Sumber : BPS, 2023

Tiga lapangan usaha yang tumbuh tertinggi yang mendukung kinerja ekonomi Jawa Tengah secara *q to q* pada triwulan ini adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; dan lapangan usaha Jasa lainnya dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 15,77; 11,31; dan 9,84 persen. Dari tujuh belas lapangan usaha, tiga kategori yang tumbuh terendah yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terkontraksi sebesar -6,24 persen diikuti oleh lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar -1,71 persen; serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan sebesar 0,70 persen



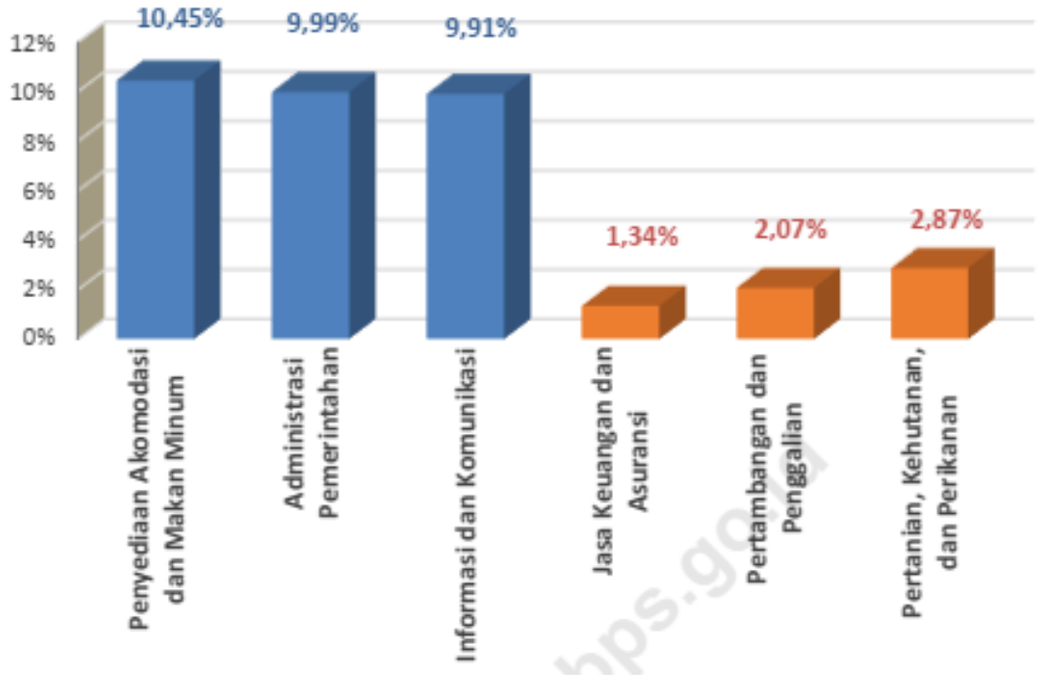
Gambar 3. 9 Sumber Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha (q-to-q) Triwulan II-2023 (Persen)

Sumber : BPS, 2023

Sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha mengandung arti peranan lapangan usaha (jika PDRB menurut lapang usaha) atau komponen (jika PDRB menurut pengeluaran) dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Secara *q to q*, tiga lapangan usaha yang menjadi sumber tertinggi pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah adalah lapangan usaha Industri Pengolahan yang menyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 0,50 persen; diikuti kategori/lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,44 persen; serta kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 0,28 persen.

Lapangan usaha dengan kontribusi terendah dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah triwulan ini adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan sumbangan kontraksi sebesar -0,82 persen; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -0,05 persen. Sedangkan sumber pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang sebesar 0,00 persen bermakna bahwa lapangan usaha tersebut tidak memiliki peran dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara q to q pada triwulan II-2023.

Berdasarkan keterbandingan antar tahun *(y on y)*, ekonomi Jawa Tengah triwulan II-2023 tumbuh sebesar 5,23 persen. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,04 persen namun lebih lambat jika dibandingkan triwulan II-2022 yang tumbuh 5,62 persen.



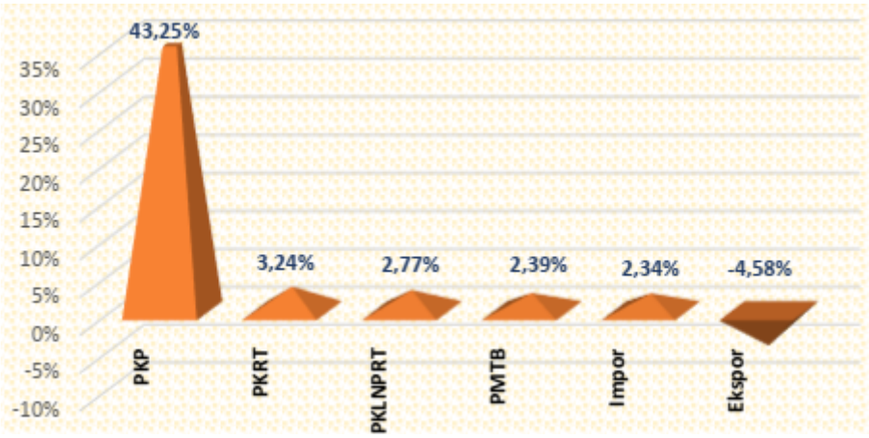
Gambar 3. 10 Pertumbuhan PDRB Beberaa Lapangan Usaha (y-on-y) Triwulan II-2023
Sumber : BPS, 2023

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi antar tahun *(y on y)* di Jawa Tengah didorong oleh semua lapangan usaha. Tiga lapangan usaha dengan pencapaian pertumbuhan tertinggi secara tahunan adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan; dan lapangan usaha Informasi Komunikasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,45; 9,99; dan 9,91 persen. Sedangkan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertambangan dan Penggalian; serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi tiga kategori dengan pertumbuhan terendah masing-masing sebesar 1,34; 2,07; serta 2,87 persen.

Secara *y on y*, tiga lapangan usaha sumber pertumbuhan tertinggi dalam menopang tumbuhnya ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,23 persen berasal dari sector Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 1,27 persen; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran,

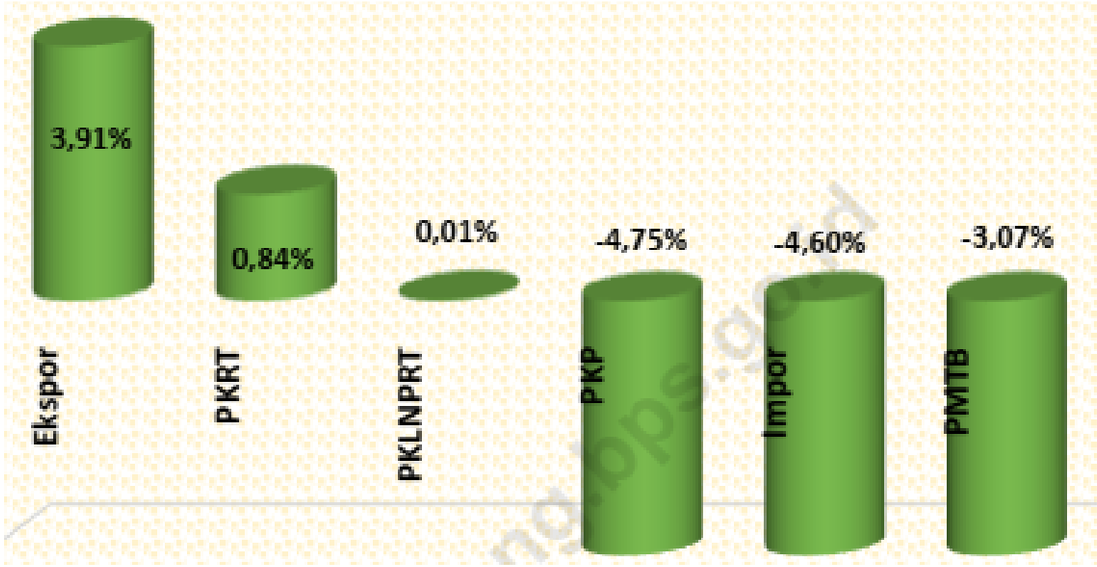
dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,92 persen; dan kategori Informasi Komunikasi sebesar 0,60 persen. Lapangan usaha dengan kontribusi terendah terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lapangan usaha Pengadaan Air; Pengadaan Listrik dan Gas; serta lapangan usaha Jasa Perusahaan; dengan peranan masing-masing sebesar 0,00; 0,01; dan 0,02 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2023 yang tercatat 1,61 persen disebabkan oleh peningkatan hampir semua komponen PDRB Pengeluaran.



Gambar 3. 11 Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Triwulan II-2023 q-to-q
Sumber : BPS, 2023

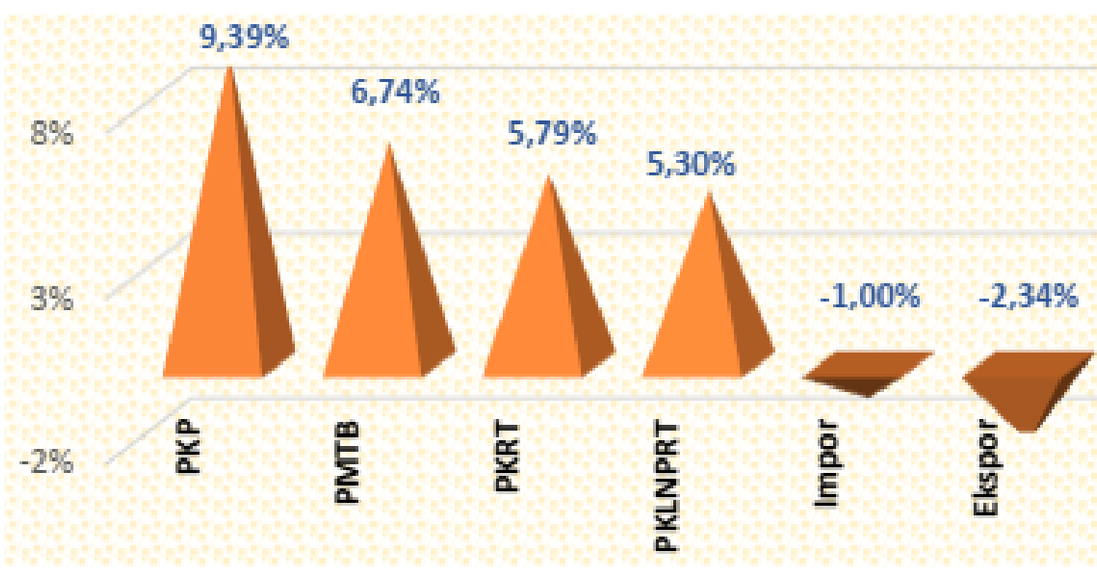
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP); Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT); dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT); komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); dan komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) tumbuh masingmasing sebesar 43,25; 3,24; 2,77; 2,39 dan 2,34 persen. Sementara itu komponen Ekspor merupakan satu-satunya komponen yang tumbuh negatif dan menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan ini.



Gambar 3. 12 Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Triwulan II-2023 (q-to-q)

Sumber : BPS, 2023

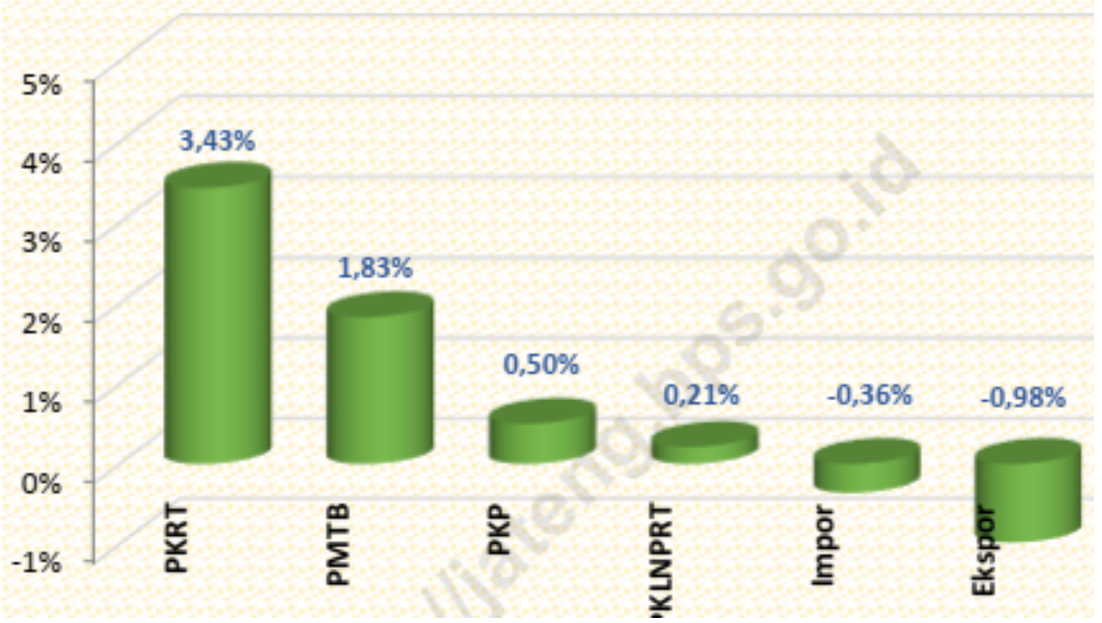
Secara q to q, hampir semua komponen berkontribusi positif dalam menyumbang pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah. Komponen PKRT dengan peranan sebesar 1,90 persen; diikuti komponen PKP sebesar 1,71 persen; komponen PMTB sebesar 0,66 persen dan komponen PKLNPRT sebesar 0,03 persen. Sementara itu komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen pengurang laju pertumbuhan Jawa Tengah dengan peranannya sebesar -1,90 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa pada triwulan ini bernilai 0,79 persen menjadi komponen pengurang laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.



Gambar 3. 13 Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Triwulan II-2023 (y-on-y)

Sumber : BPS, 2023

Apabila dibandingkan terhadap triwulan II-2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh positif sebesar 5,23 persen disebabkan oleh hampir semua komponen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PKP yang tumbuh sebesar 9,39 persen; diikuti oleh komponen PMTB (6,74 persen); komponen PKRT (5,79 persen); dan komponen PKLPRT (5,30 persen). Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran, serta komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) tumbuh negatif masing-masing sebesar -1,00 dan -2,34 persen



Gambar 3. 14 Sumber Pertumbuhan menurut Pengeluaran Triwulan II-2023 (y-on-y)

Sumber : BPS, 2023

Sumber pertumbuhan tertinggi perekonomian Jawa Tengah y on y berasal dari komponen PKRT yang menyumbang sebesar 3,43 persen diikuti komponen PMTB sebesar 1,83 persen; komponen PKP (0,50 persen); dan komponen PKLNPRT (0,06 persen).

Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen pengurang laju pertumbuhan Jawa Tengah secara y on y, dengan peranannya sebesar -0,98 persen. Sementara itu komponen Impor Barang dan Jasa yang bernilai negatif 0,36 persen sebetulnya merupakan bagian penopang laju pertumbuhan Jawa Tengah.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Triwulan II-2023 tidak menunjukkan perubahan

yang berarti. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen dominan yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah dengan besaran 61,47 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 37,26 persen, komponen PMTB sebesar 28,52 persen, komponen PKP sebesar 6,32 persen, komponen PKLNPRT sebesar 1,12 persen, dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,02 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 35,82 persen

Dengan melihat capaian Pertumbuhan Ekonomi di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka Kota Salatiga optimis dapat mencapai target Pertumbuhan Ekonomi yang telah di tetapkan.Demikian pula dengan kondisi ekonomi Salatiga yang diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi terus dilakukan pada tahun 2023 yang didukung oleh kegiatan-kegiatan untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Dengan dinamika yang ada pemerintah daerah perlu kembali memperhitungkan kemampuan keuangan daerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPD tahun 2023-2026. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang mengamanatkan agar RKPD Tahun 2023 memuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Diseae 2019* (COVID-19), maka pada Perubahan RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kota Salatiga

merencanakan program-program yang berdampak pada pemulihan perekonomian. Program-program tersebut meliputi bidang infrastruktur, bidang Sosial, bidang ketenagakerjaan dan kesehatan.

Pengalokasian program pemulihan ekonomi ini dimaksudkan untuk upaya percepatan aktivitas perekonomian yang sempat terhenti pada saat terjadi Pandemi *Corona Virus Diseae 2019* (COVID-19). Percepatan pemulihan ekonomi meliputi bidang infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha miko kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja. Namun demikian Kota Salatiga tetap mengacu pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

Perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

3.3.1. Tantangan dan Strategi

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2022 dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2023, maka perekonomian Kota Salatiga masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari masih melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan regional.

3.3.1.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang akan dihadapi:

a) Angka pengangguran terbuka Kota Salatiga Tahun 2022, 5,58% yang masih relatif lebih tinggi jika di bandingkan dengan Kota Pekalongan 4,98%, namun sudah lebih baik dibandingkan dengan kota kota yang lain dan juga peningkatan dari tahun 2021 yaitu 7,26%.

b) Prosentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 4,73% yang masih relatif lebih tinggi di bandingkan dengan Kota Semarang 4,25%. Angka ini menurun jika dibanding tahun 2021 dengan nilai 5,14%. Dengan adanya pemulihan ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota Salatiga juga akan berkurang. Harapan pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk miskin Kota Salatiga akan mengalami penurunan.

c) Bertambahnya jumlah belanja daerah karena berbagai event kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi dan juga penguatan ekonomi setelah pandemi covid-19. Peningkatan ini harus diimbangi dengan meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sumber.

d) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

   Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim berinvestasi yang kondusif dan kompetitif dengan mewujudkan mall pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menarik investor guna menggerakan roda perekonomian daerah.

e) Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang akan berpengaruh pada perekonomian Kota Salatiga.

3.3.1.2 Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi tantangan yang muncul pada semester I tahun 2023, melalui Perubahan RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) mendorong program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan juga angka kemiskinan di Kota Salatiga.

b) Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya untuk mendorong sektor ekonomi di masyarakat pasca pandemi Covid-19.
c) Untuk meningkatkan perekonomian daerah yang terdampak pandemi covid-19, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan yang berbasis padat karya, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM dengan membantu promosi usaha para pelaku UMKM.
d) Strategi yang diterapkan dalam menghadapi belanja daerah adalah dengan cara pencermatan terhadap belanja daerah dan juga intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.
e) Perlu mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro di berbagai sub sektor. Dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan.
f) Sedangkan faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen pemerintah Kota Salatiga menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu semester satu tahun 2023 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Tahun 2023 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

d. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan di mana APBD Tahun 2023 telah mengalami dua kali perubahan penjabaran APBD untuk keperluan penyesuaian turunnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
e. Keadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp125.713.423.946,00 hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
f. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD; penambahan alokasi anggaran kegiatan; penambahan, pengurangan dan/atau penyesuaian target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.5. Kerangka Pendanaan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	226.789.700.000	252.412.921.235	25.623.221.235
4.1.01	Pajak Daerah	65.509.415.000	74.009.500.000	8.500.085.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.597.916.000	14.535.218.365	2.937.302.365
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.303.718.000	21.280.674.000	976.956.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	129.378.651.000	142.587.528.870	13.208.877.870
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	691.627.221.000	693.120.002.456	1.492.781.456
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	620.331.356.000	621.185.352.000	853.996.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71.295.865.000	71.934.650.456	638.785.456
	Jumlah Pendapatan	**918.416.921.000**	**945.532.923.691**	**27.116.002.691**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	881.734.519.718	974.925.667.411	93.191.147.693
5.1.01	Belanja Pegawai	406.080.095.946	435.288.179.172	29.208.083.226
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.012.777.970	504.627.242.437	62.614.464.467
5.1.04	Belanja Subsidi	96.000.000	96.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	32.245.645.802	34.076.445.802	1.830.800.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.300.000.000	837.800.000	-462.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**	93.458.251.282	95.320.680.226	1.862.428.944
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.131.581.125	1.124.210.200	-10.007.370.925
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.110.042.097	35.885.167.262	6.775.125.165
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.569.769.745	18.408.911.431	-160.858.314
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	32.147.617.065	37.502.400.183	5.354.783.118
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.499.241.250	2.399.991.150	-99.250.100
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14.929.595.600**	**1.000.000.000**	**-13.929.595.600**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.929.595.600	1.000.000.000	-13.929.595.600
	Jumlah Belanja	**990.122.366.600**	**1.071.246.347.637**	**81.123.981.037**
	Total Surplus/(Defisit)	**-71.705.445.600**	**-125.713.423.946**	**-54.007.978.346**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	73.205.445.600	127.213.423.946	54.007.978.346
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.205.445.600	127.213.423.946	54.007.978.346
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**73.205.445.600**	**127.213.423.946**	**54.007.978.346**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	1.500.000.000	1.500.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	Pembiayaan Netto	**71.705.445.600**	**125.713.423.946**	**54.007.978.346**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	**991.622.366.600**	**1.072.746.347.637**	**81.123.981.037**

3.5.1. Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan terhadap target selama 3 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Capaian pada tahun 2020 hanya tercapai 86.09% dari target Rp884.155.045.000,00. Pada tahun 2021 pendapatan tercapai 103,22% dari target Rp916.251.265.000,00 dan pada tahun 2022 realisasi pendapatan adalah 101,41% dari target Rp905.568.012.938,00.

Realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2022 *(audited)* sebesar Rp918.353.779.916,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 (*audited*) yang sebesar Rp946.191.087.524,00, maka realisasi pendapatan tahun 2022

mengalami penurunan sebesar 27,83 milyar. Salah satu penurunan yang signifikan adalah pada penerimaan BLUD yang berasal dari pendapatan jasa pelayanan penangan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang sudah tertangani dengan baik menyebabkan penurunan PAD pada sektor ini berkurang.

Pada tahun 2023 target pendapatan semula ditetapkan sebesar Rp906.392.775.000,00 menjadi Rp918.416.921.000,00. Hal ini disebabkan oleh munculnya perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan melakukan transfer dana perimbangan pada akhir tahun 2022. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan pergeseran penjabaran APBD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua penjabaran APBD tahun 2023 dengan target pendapatan daerah berubah menjadi Rp918.416.921.000,00.

Pada perubahan RKPD tahun 2023, kerangka Pendapatan daerah mengalami beberapa perubahan proyeksi, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp25.623.221.235,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah meningkat sebesar Rp8.500.085.000,00 dengan kenaikan yang tinggi pada Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar 61,54% dari target sebelumnya atau senilai Rp4.000.000.000,00, kemudian kenaikan pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.000.000.000,00 kemudian kenaikan dari sektor Pajak Penerangan Jalan senilai Rp1.115.085.000,00.
2. Retribusi Daerah meningkat sebesar Rp2.937.302.365,00 dengan rincian Retribusi Penyewaan Tanah dan bangunan Rp3.800.224.000,00, Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp67.825.000,00 dan pada Retribusi Penyewaan Bangunan Rp60.000.000,00. Namun terdapat beberapa penurunan pendapatan dari beberapa sektor retribusi antara lain : sektor Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang turun sebesar Rp868.800.000,00 dari target pada Penetapan RKPD, sektor Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir menurun sebesar Rp105.684.000,00, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

turun hingga Rp50.000.000,00 serta Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang turun Rp20.925.000,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar Rp976.956.000,00 pada rekening Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) naik sebesar Rp1.195.359.000,00 sedangkan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) diproyeksi adanya penurunan sebesar Rp218.403.000,00.
4. Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan akan meningkat sebesar Rp13.208.877.870,00 dengan kenaikan di sektor pendapatan BLUD sebesar Rp11.634.862.000,00, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp2.060.648.000,00 dan kenaikan pada Hasil Sewa BMD yang Tidak Dipisahkan Rp500.000.000,00, serta Pendapatan Bunga kenaikan sebesar Rp240.000.000,00.

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp1.492.781.456,00 dengan rincian :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat naik sebesar Rp853.996.000,00 kenaikan tertinggi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebesar Rp793.876.000,00;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp638.785.456,00 dengan proyeksi kenaikan pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp.638.785.456,00.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada maka dalam Perubahan RKPD tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp945.532.923.691.- sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2023

NO	JENIS PENDAPATAN	APBD 2022	REALISASI 2022 (Audited)	TARGET APBD 2023	Realisasi APBD 2023 s.d Semester I	Proyeksi Perubahan RKPD 2023
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN	**905.568.012.938**	**918.353.779.916**	**918.416.921.000**	**444.655.862.268**	**945.532.923.691**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**218.644.038.938**	**240.959.878.632**	**226.789.700.000**	**143.693.511.130**	**252.412.921.235**
1	Pendapatan Pajak Daerah	69.470.000.000	75.518.553.026	65.509.415.000	39.358.321.901	74.009.500.000
2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.892.475.000	11.326.093.045	11.597.916.000	8.903.746.530	14.535.218.365
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	20.732.135.000	20.463.337.373	20.303.718.000	18.797.005.296	21.280.674.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	117.549.428.938	133.651.895.188	129.378.651.000	76.634.437.403	142.587.528.870
II	**PENDAPATAN TRANSFER**	**686.923.974.000**	**677.373.901.284**	**691.627.221.000**	**300.962.265.441**	**693.120.002.456**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.693.362.000	600.499.605.284	620.331.356.000	272.077.765.443	621.185.352.000
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.230.612.000	76.874.296.000	71.295.865.000	28.884.499.998	71.934.650.456
V	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**-**	**20.000.000**	**-**	**85.697**	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Penrudang-udangan	-	20.000.000	-	-	-
1	Lain-lain Pendapatan	-	20.000.000	-	85.697	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**905.568.012.938**	**918.353.779.916**	**918.416.921.000**	**444.655.862.268**	**945.532.923.691**

Anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp978.098.220.600,00. Dalam perjalanannya APBD tahun 2023 mengalami perubahan penjabaran sampai 2 kali sehingga belanja naik menjadi Rp990.122.366.600,00. Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 belanja diproyeksikan meningkat sebesar Rp1.071.246.347.637,00.

Proyeksi kenaikan belanja pada rekening Belanja Operasi sebesar Rp93.191.147.693,00 dengan rincian :

1. Belanja pegawai naik Rp29.208.083.226,00 sebagai pemenuhan kebutuhan Gaji dan TPP yang baru di anggarkan 10 bulan pada penetapan Tahun 2023;
2. Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp62.614.464.467,00 sebagai pemenuhan kebutuhan rutin, termasuk kenaikan honor THL, pemenuhan honor ke-13 serta THR untuk THL;
3. Belanja Subsidi tidak mengalami kenaikan;
4. Belanja Hibah naik sebesar Rp1.830.800.000,00 yang diberikan kepada lembaga vertikal, organisasi kemasyarakatan serta lembaga sosial kemasyarakatan; dan
5. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp462.200.000,00 yang dipengaruhi oleh menurunnya jumlah siswa kurang mampu yang menerima bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi terbaru. Peserta didik tersebut sudah tercover pada Program Indonesia Pintar.

Proyeksi kenaikan Belanja Modal diproyeksi akan naik sebesar Rp1.862.428.944,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah berkurang hingga sebesar Rp10.007.370.925,00, yang disebabkan oleh pengalihan belanja modal pembebasan tanah untuk pembangunan exit tol pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp6.775.125.165,00 ;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp160.858.314,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp5.354.783.118,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang sebesar Rp99.250.100,00.

Penggunaan alokasi belanja di fokuskan pada Prioritas Pembangunan Daerah, pemulihan ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan rutin yang teranggarkan pada penetapan 2023. Selain itu Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai salah satu amanat pemerintah pusat dalam pernyusunan RKPD, maka Pemerintah Kota Salatiga merencanakan belanja untuk pelaksanaan program-program yang berdampak pada pemulihan perekonomian.

Pengalokasian program pemulihan ekonomi ini dimaksudkan untuk upaya percepatan aktivitas perekonomian yang sempat terhenti pada saat terjadi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Percepatan pemulihan ekonomi meliputi bidang infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha miko kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja. Perubahan sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3. 3 Realisasi. Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022 (Audited)	APBD 2023	Realisasi APBD 2023 Semester I	Proyeksi Perubahan RKPD 2023
5	**BELANJA DAN TRANSFER**	**1.046.499.128.242,00**	**932.071.471.274.00**	**990.122.366.400.00**	**397.126.922.839.00**	**1.071.246.347.637,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**930.927.234.019,00**	**853.696.161.143.00**	**881.734.519.518.00**	**389.668.816.611.00**	**974.925.667.411**
	Belanja Pegawai	426.916.485.610,00	398.347.572.483.97	406.080.095.746.00	204.514.074.749.00	435.288.179.172
	Belanja Barang dan Jasa	479.418.328.245,00	431.031.608.280.03	442.012.777.970.00	171.670.459.990.00	504.627.242.437
	Belanja Subsidi	340.000.000,00	204.717.500.00	96.000.000.00	21.842.500.00	96.000.000
	Belanja Hibah	23.303.920.164,00	23.175.462.879.00	32.245.645.802.00	13.462.439.372.00	34.076.445.802
	Belanja Bantuan Sosial	948.500.000,00	936.800.000.00	1.300.000.000.00	-	837.800.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**80.866.448.623,00**	**75.192.210.131.00**	**93.458.251.282.00**	**7.195.006.228.00**	**95.320.680.226**
	Belanja Tanah	-	-	11.131.581.125.00	1.006.600.880.00	1.124.210.200
	Belanja Peralatan dan Mesin	21.117.207.830,00	19.089.458.206.00	29.110.042.097.00	5.031.061.500.00	35.885.167.262
	Belanja Gedung dan Bangunan	24.858.581.752,00	23.051.423.031.00	18.569.769.745.00	738.418.000.00	18.408.911.431
	Belanja jalan. Irigasi dan Jaringan	32.655.286.427,00	31.216.974.647.00	32.147.617.065.00	270.449.442.00	37.502.400.183
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.105.105.214,00	1.722.875.662.00	2.212.153.200.00	82.062.906.00	2.399.991.150
	Belanja Aset Lainnya	130.267.400,00	111.478.585.00	287.088.050.00	66.413.500.00	0

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022 (Audited)	APBD 2023	Realisasi APBD 2023 Semester I	Proyeksi Perubahan RKPD 2023
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**34.505.445.600,00**	**2.983.100.000.00**	**14.929.595.600.00**	**263.100.000.00**	**1.000.000.000.00**
	Belanja Tidak Terduga	34.505.445.600,00	2.983.100.000.00	14.929.595.600.00	263.100.000.00	1.000.000.000.00
5.4	**TRANSFER**	**200.000.000,00**	**200.000.000.00**	**-**	**-**	**-**
	Transfer / Bantuan Keuangan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000.00	7.185.000.000,00	7.185.000.000,00	7.185.000.000,00

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Salatiga pada perubahan tahun 2023 berasal dari pemanfaatan SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2023 dilakukan peyesuaian pada penyertaan modal.

Pembiayaan Netto tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp71.705.445.600,00, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 pembiayaan netto diproyeksikan Rp125.713.423.946,00 dengan memperhitungkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp127.213.423.946,00.

Adapun rincian SiLPA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kas di Kas Umum Daerah Rp97.323.820.711,00
2. Kas di BLUD (RSUD) Rp27.625.335.071,00
3. Kas di BLUD Puskesmas Rp1.530.966.213,00
4. Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp648.208.217,00
5. Kas BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Negeri Rp1.356.102,00
6. Penyesuaian Pendapatan per 31 Desember 2022 (RSUD) Rp72.166.102,00
7. Penyesuaian Pendapatan per 31 Desember 2021 Rp11.513.600,00
8. Jasa giro BNI per 31 des 2022 RSUD Rp630,00
9. Kas Lainnya (Penampungan PBB P2) 2021 Rp57.300,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang digunakan untuk menutup defisit pendapatan dan belanja serta memperhitungkan penyertaan modal kepada Bank Salatiga sebesar Rp1.500.000.000,00 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 dengan penetapan untuk tahun 2023 merujuk pada Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 500/107/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) BANK Salatiga Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya untuk proyeksi pembiayan pada perubahan tahun 2023 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	Realisasi APBD 2023 Semester I	Proyeksi Perubahan RKPD 2023
A	**Surplus/Defisit pendapatan dan belanja**	**(140.931.115.304)**	**(13.717.691.358)**	**(71.705.445.600)**	**(47.528.939.429)**	**(125.713.423.946)**
B	**PEMBIAYAAN NETTO**	**140.931.115.304**	**140.931.115.304**	**71.705.445.600**	**47.528.939.429**	**125.713.423.946**
C	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**142.431.115.304**	**142.431.115.304**	**73.205.445.600**	**29.228.468.016**	**127.213.423.946**
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	142.431.115.304	142.431.115.304	73.205.445.600	29.228.468.016	127.213.423.946
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
D	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	Realisasi APBD 2023 Semester I	Proyeksi Perubahan RKPD 2023
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
E	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan**	**-**	**127.213.423.946**	**-**	**75.257.407.445**	**-**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen RPD merupakan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Salatiga maka penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2023 harus selaras dan sinergi dengan RPD Kota Salatiga Periode Tahun 2023-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu;dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga sebagaimana RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026 disusun dengan mengacu kepada Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025. Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.
2. Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.
2. Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif
3. Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
4. Meningkatnya prestasi dalam olahraga.

5. Meningkatnya partisipasi pemuda.
6. Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
7. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
8. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
9. Meningkatnya jumlah koperasi aktif.
10. Meningkatnya jumlah UKM.
11. Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas
12. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
13. meningkatnya pendapatan daerah
14. Meningkatnya kinerja perdagangan
15. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan
16. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat
17. Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN
18. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
19. Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja
20. Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS
21. Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman
22. Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran
23. Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan
24. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
25. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif.
26. Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.
27. Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana
28. Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik.
29. Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
30. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga.
31. Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
32. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

33. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh).
34. Meningkatnya pengelolaan pertanahan.
35. Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun target capaian indikator tujuan dan saran untuk tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	10,68
	Harapan Lama Sekolah			Tahun	15,44
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	84,82
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99,23
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	96,73
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,96
	Indeks Literasi Masyarakat	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif		Nilai	52.06
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,95
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan			%	19
		Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	14,71
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	24
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			Jumlah medali	15
		Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			%	20,59
		Meningkatnya partisipasi pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Usia Harapan Hidup			Tahun	77,67
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172
			Angka Kematian Bayi	/1000 KH	12,89
			Prevalensi balita Gizi Buruk	%	0,09

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			Succes Rate TB Kota Salatiga	%	92
			Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun	%	37,76
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	66
			Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna
	Laju Pertumbuhan penduduk			%	1,34
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,4
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan per Kapita **PDRB ADHK*			%	4,71
				Juta	54,11
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	70,56
		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,31
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	31,00
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	95,76
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	2,5
		Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,81
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	4,77
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	45
			Tingkat hunian akomodasi	%	20
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8,5
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,11
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas Padi	%	6,1
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10
			Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,02
			Produktivitas Sapi Perah	%	0,72
			Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6
			Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100
			Ketersediaan beras	%	70

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi			%	10,00
		Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	3,00
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	10,00
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	10,00
	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	6,76
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	69,71
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	70
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	53,8
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS			%	94,5
		Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	70
	Skor Pola Pangan Harapan			Skor	4,54
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	92,2
			Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita	1,42
			Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita	2,487
	Prosentase Peminat Transmigrasi			%	3,3
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	3,3
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	615
			Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	28,57
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24
	IDG			Nilai	80
	IPG			Nilai	95
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	40
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	65,50
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	81,00
			Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34,47

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
		menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks PMPRB	Nilai	71
			Nilai SAKIP	Angka	65,00
			Indeks Inovasi	Nilai	46,30
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	20
			Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	75
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	%	55
			Nilai Sistem Merit	%	275
			QA SPIP	Nilai	3,04
			QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,94
			QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,78
			Kapabilitas APIP	Level	3
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75,5
			Indeks SPBE	Nilai	2,4
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	94
			Tingkat keterbukaan informasi publik	%	96
			Tingkat pengamanan informasi daerah	%	80
			Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	98,7
			Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	95,6
			Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	79,2
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,20
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,75
			Persentase PKK Aktif	%	50
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,52
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	58
			Persentase PKK Aktif	%	50
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,05
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	71

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60
			Persentase PKK Aktif	%	72
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60,05
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	62
			Persentase PKK Aktif	%	50
			Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota			%	100
		Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100
	Penanggulangan Potensi Konflik			%	100
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,72
		Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Terselesainya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.	%	100
	Indeks Risiko Bencaca			Nilai	90,80
		Meningkatnya persentase Kelurahan tanggap Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	%	17
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,84
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik (%)			%	52,5
		Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,5
		Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	97

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai	56,2
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,20
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,80
			Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47
	Rasio Konektivitas Kota	Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan		%	0,71
			Rasio Ijin Trayek	%	24,37
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79
	Kinerja lalu lintas kota				0,35
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase Rumah Yang didukung oleh PSU			%	10,2
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	37
	Pemukiman yang Tertata			%	6,26
		Meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,23
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	20
			Penyelesaian kasus tanah Negara	%	25

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-1 (pertama) RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

4.21. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2023

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan

dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2023. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada levvel sebelum pandemi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job.*

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama

mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Pembangunan tahun 2023 yang ditargetkan oleh Pemerintah pusat meliputi:

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,9%;
b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3 – 6%;
c) Indeks Gini Ratio sebesar 0,375 – 0,378;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29-73,35;
e) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27%;
f) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105;
g) Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107;
h) Tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 %.

Pemerintah telah mencanangkan strategi pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yaitu:

1. PN 1 : Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. PN 2 : Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. PN 3 : Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job;*
4. PN 4 : Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. PN 5 : Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. PN 6 : Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. PN 7 : Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. PN 8 : Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jawa tengah tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD 2018-2023, serta mengacu pada RKP Tahun Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah

Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada **"Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari"** dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
2. Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrim (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondisivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan kethanan fiskal daerah.

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. Angka Kemiskinan antara 9,51-9,29%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63-4,80%;
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-5,60%;
4. Inflasi pada angka 3,0 $\pm$ 1;
5. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104,05;
6. Indeks Pembanguna Manusia sebesar 72,75.

4.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2023 disusun dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026. Arah kebijakan Kota Salatiga berdasarkan RPD tahun 2023-2026 adalah **"Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan".**

Berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka pada tahun 2023 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada :

a. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan Daya Saing;

b. Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
c. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan & Stunting.
d. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.
e. Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik melalui transformasi teknologi.
f. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembanguan daerah. Adapun target sasaran makro pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan antara 4,67-4,59%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,46-5,51%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,86-5,44%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,56
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,00
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,20
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 10%

Selain berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga yang telah ditetapkan pada tahapan RPD tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga pada Perubahan RKPD Tahun 2023, juga berpedoman pada :

1. Penanganan isu strategis berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan Triwulan II tahun 2023;
2. Dukungan penangan isu strategis nasional tahun 2023;
3. Pedoman penyusunan RKPD tahun 2023 yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
4. Dukungan terhadap kebijakan nasional;
5. Pemenuhan pelayanan standar minimal untuk masyarakat Kota Salatiga.

4.2.3.1 Penanganan Isu Strategis berdasarkan Evaluasi Kinerja Pembangunan sampai dengan TW II tahun 2023

Isu strategis yang muncul pada saat evaluasi capaian kinerja Triwulan II tahun 2023 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pemantapan arah kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan pada RKPD 2023. Langkah yang perlu dilksanakan adalah dengan sinkronisasi

isu strategis, penetapan prioritas pembangunan dan penentuan program-program yang akan mendukung pencapaian penanganan isu strategis. Berikut disajikan sinkronisasi isu strategis dan prioritas pembangunan serta pengutan program yang dilaksanakan pada Perubahan RKPD 2023.

Tabel 4. 2 Sinkronisasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan serta Program pada Perubahan RKPD 2023

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2023	PROGRAM	OPD
1.	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk	Pemantapan usaha ekonomi kerakyatan terutama dalam mendukungUMKM, industri kecil dan menengah untuk menciptakan produk kreatif yang berdaya saing	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOP UKM
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	DINKOP UKM
			Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	DINKOP UKM
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	DINKOP UKM
			Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	DINKOP UKM
			Program pengembangan UMKM	DINKOP UKM
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPAR
			Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	DISBUDPAR
			Program pemasaran pariwisata	DISBUDPAR
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DISPERINAKER
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DISPERINAKER
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DISPERINAKER
2.	Masih tingginya angka pengangguran dan banyaknya	Pemantapan program-program penanggulangan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3APPKB

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2023	PROGRAM	OPD
	penduduk miskin akibat dampak Covid-19	kemiskinandanStunting	Program Peningkatan kualitas keluarga	DP3APPKB
3.	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
			Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DISPANGTAN
4.	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur yangmengarah pada penyelesaian penataan wajah kota dan penyediaan transportasi yang murah dan ramah lingkungan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPU PR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPU PR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPU PR
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPU PR
			Program Penyelenggaraan Jalan	DPU PR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPU PR
			Program Kawasan Permukiman	DINAS PKP
			Program Pengembangan Perumahan	DINAS PKP
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DINAS PKP
5.	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2023	PROGRAM	OPD
	belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DLH
6.	Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Pemantapan dan pemerataanpendidikan dan kesehatanserta pengembangan teknologiyang berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
			Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
			Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan	DISDIK
			Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	DISDIK
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINKES
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	DISPORA
			Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	DISPORA

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2023	PROGRAM	OPD
			Program pengembangan kapasitas kepramukaan	DISPORA
			Program pembinaan perpustakaan	PERSIPDA
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
7.	Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah		Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPAR
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISBUDPAR
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISBUDPAR
8.	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah	Pemantapan dan Pemerataankualitas pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik pemerintah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
			Program Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
			Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	KECAMATAN

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA Tahun 2023	PROGRAM	OPD
		Perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFO
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA
			Program Pengelolaan Arsip	PERSIPDA
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	IRDA
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	IRDA

4.2.3.2 Kebijakan pada Pedoman Penyusunan RKPD 2023

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang mengamanatkan agar RKPD Tahun 2023 memuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Diseae 2019* (COVID-19), maka pada Perubahan RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kota Salatiga merencanakan program-program yang berdampak pada pemulihan perekonomian. Program-program tersebut meliputi bidang infrastruktur, bidang Sosial, bidang ketenagakerjaan dan kesehatan.

Pengalokasian program pemulihan ekonomi ini dimaksudkan untuk upaya percepatan aktivitas perekonomian yang sempat terhenti pada saat terjadi Pandemi *Corona Virus Diseae 2019* (COVID-19). Percepatan pemulihan ekonomi meliputi bidang infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutaman usaha miko kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja.

Adapun beberapa program yang direncanakan untuk pemenuhan arah kebijakan tersebut antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
3. Program Penyelenggaraan Jalan;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Kawasan Permukiman;
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
12. Program Pengembangan UMKM;
13. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
14. Program Pengelolaan Persampahan;
15. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
16. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Selanjutnya, program tersebut dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan yang memuat target kinerja untuk dicapai menuju pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

4.2.2.1 Arah Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrim

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022, Kota Salatiga merupakan Kota dengan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023 – 2024 bersama 18 (delapan belas) kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Salatiga melalui Bappeda telah menerima data P3KE dari Kemenko PMK tanggal 24 November 2022 serta bimbingan teknis pemanfaatan data P3KE yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Desember 2022.

Berdasarkan Data dari Kemenko PMK,Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem(P3KE) Kota Salatiga sebanyak 92.036 jiwa, yang tersebar pada desil 1–7. Sedangkan penduduk yang masuk kriteria kemiskinan ekstrem desil 1 sebanyak 12.449 jiwa. Data tersebut, selanjutnya diidentifikasi dengan proses padu padan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga, dengan hasil sebagai berikut :

a. Data P3KE dari Kemenko PMK yang padupadan dengan NIK sejumlah 10.754 jiwa, sehingga terdapat sebanyak 1.695 jiwa yang tidak padupadan NIK, dengan berbagai sebab antara lain NIK ganda, bukan warga Salatiga, dan sebagainya.
b. Data P3KE dari Kemenko PMK yang padupadan dengan data DTKS sebanyak 8.800 jiwa, sedangkan yang tidak padupadan dengan data DTKS sebanyak 3.649 jiwa.
c. Berdasarkan data DT Provinsi Jawa Tengah (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah), Penduduk Kota Salatiga yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 176 jiwa.

Pemerintah Kota Salatiga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD teknis dalam menyelesaikan penanggulangan kemiskinan, agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan konvergen.

Selanjutnya pemerintah Kota Salatiga merumuskan program-program yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan mengacu kepada strategi nasional pengentasan kemiskinan, sebagai berikut :

1. Pengurangan Beban Pengeluaran :
   a. Program pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
2. Peningkatan Pendapatan :

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

3. Meminimalkan Kantong Kemiskinan :
   a. Program Rehabilitasi Sosial
   b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   c. Program Penanganan Bencana
   d. Program Pengembangan Perumahan
   e. Program Kawasan Permukiman
   f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem, Penyediaan Air Minum
   g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   h. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   i. Program Penanganan Kerawanan Pangan
   j. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   k. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   l. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   m. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
   n. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   o. Program Perlindungan Perempuan
   p. Program Keluarga Berencana (KB)

Pelaksanaan program pada OPD teknis untuk pengentasan kemiskinan dikoordinasikan dan disinkronkan antar OPD pelaksana program agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif fan konvergen. Koordinasi intensif antara kelembagan TKPD perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi dapat terkoordinir dengan baik.

4.2.2.2 Arah Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung Program Nasional Penurunan Stunting

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 17% di

tahun 2023 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2023. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi:

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada Perubahan RKPD tahun 2023, untuk mendukung Strategi Nasional tersebut, perencanaan pembangunan Kota Salatiga menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksusif serta kerjsama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan Inovasi SUPER TANGGUH (Satu Perangkat Daerah Bertanggung Jawab Penuh) terhadap satu wilayah kelurahan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Salatiga dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
7. Program Pemberdayaan Sosial;
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
12. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2.2.3 Arah Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang, terdapat 3 kawasan di Kota Salatiga yang masuk dalam rencana pengembangan yaitu:

1. Penataan Jl. Jendral Sudirman dengan estimasi investasi 85 milyar bersumber dana APBN. Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota

Salatiga dengan menyusun DED penataan kawasan tersebut pada tahun 2018 dan telah mendapatkan ijin lingkungan.

2. Pembangunan Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan estimasi investasi 25 milyar bersumber dari APBN. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga dengan mempersiapkan lahan yang siap dibangun untuk rusun di wilayah Noborejo dengan fasilitas air dan listrik yang telah tersedia, serta telah mendapatkan ijin lingkungan. Wilayah sekitar area pembangunan dekat dengan kawasan industri Kota Salatiga.
3. Peningkatan terminal Tipe A Tingkir yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Sebagai bentuk dukungan Kota Salatiga terhadap Program Nasional yang dimanatkan pada Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tersebut adalah dengan mengalokasikan Anggaran pada Perubahan RKPD 2023 untuk pelaksanaan program yang masuk dalam Perangkat Daerah pelaksana urusan Jalan, Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan, yaitu :

a. **Program Pengembangan Perumahan** dengan Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, Persentase rumah tinggal bersanitasi dan Persentase kawasan kumuh, untuk mendukung Pembangunan Rusunawa;

b. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dengan indikator Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) danpenerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota dan Persentase fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik, untuk mendukung pembangunan Terminal Tipe A Tingkir

c. **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan indikator Persentase jalan kondisi baik dan Panjang jalan dan jembatan yang terbangun dan meningkat kapasitas maupun konstruksinya, untuk mendukung Revitalisasi Jalan Jenderal Sudirman.

4.2.2.4 Arah Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung Kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Dukungan Pemerintah Kota Salatiga pada arah kebijakan nasional untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah dengan fasilitasi pelaksanaan Pilkada meliputi pendanaan Pilkada serentak sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang bersumber dari APBD melalui mekanisme Hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa alokasi anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk diberikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

Pada perubahan RKPD 2023, pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan program – program dan kegiatan yang mendukung persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program tersebut untuk mendukung kegiatan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Adapun program-program yang telah direncanakan untuk dukungan kegiatan tersebut pada perubahan RKPD 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.2.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada dokumen Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2023 tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2023 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pemantapan dan pemerataanpendidikan dan kesehatanserta pengembangan teknologiyang berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi prioritas pembangunan dalam mendukung penerapan SPM Pendidikan dan Kesehatan.

Pemantapan dan pemerataan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2023 akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2023 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan

ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, innformasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.2.2.6 Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Pokok Pikiran Dewan

Pada Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD Kota Salatiga yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat kota. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Kota Salatiga.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga memiliki peran yang sangat penting strategis baik dari sisi muatan substansi materi yang disampaikan kepada Wali Kota. Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga, diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Salatiga, baik dari unsur Komisi A, Komisi B dan Komisi C maupun Bapemperda dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/ akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2023, hasil reses/ serap aspirasi masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dan lain-lain.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga terhadap RKPD Tahun 2023, dokumen draft awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draft Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga. Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/harmonisasi pada perspektif Paripurna Internal DPRD

Kota Salatiga. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat Kota Salatiga melalui DPRD Kota Salatiga untuk bahan penyusunan RKPD.

Adapun pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang menjadi salah satu dasar penyusunan RKPD 2023 yang dipertajam pada Perubahan RKPD 2023 adalah :

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi;

   Sesuai dengan Arah Kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2023 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka pemberdayaan ekonomi kreatif, dan pembatasan took-toko modern, pariwisata, ketahanan pangan dan UMKM perlu ditingkatkan.

   Berbagai perkembangan harus terus diantisipasi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di Kota Salatiga. Perubahan RKPD Tahun 2023 diharapkan mengacu pada kegiatan-kegiatan antisipasi adanya ketidakpastian pemulihan ekonomi nasional, volatilitas harga komoditas pasar, perubahan tatanan nasional, serta stabilitas di sektor keuangan.
2. Perencanaan Program-program Non Fisik;
   a. Pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat dalam bidang keagamaan;
   b. Pembangunan dan pemberdayaan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
   c. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban; serta
   d. Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap urusan masyarakat.
3. Pengendalian dan Penajaman Program-program Strategis, terutamapada program :
   a. Pembangunan infrastruktur dsar yang berdampak lansung pada perekonomian masyarakat;
   b. Pembangunan bagi industri;
   c. Pengembangan pariwisata;
   d. Ketahanan pangan dan UMKM.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Salatiga tersebut diukur secara kuantitatif dengan menetapkan indikator target

kinerja yang akan menjadi acuan dalam penilaian keberhasilan pembangunan. Indikator Kinerja Pembangunan meliputi indikator tujuan (IKU) dan indikator sasaran pembangunan daerah.

Target indikator tujuan atau indikator kinerja utama (IKU) tahun 2023 tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Target Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja 2023		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Penetapan 2023	Perubahan Tahun 2023	
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,66	10,5	10,67	10,67	10,70
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,42	15,43	15,43	15,43	15,46
3.	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	51,56	NA	52,06	52,06	53,26
4.	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	15,5	15,5	19,0	19,0	52,0
5.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	23	23	15	15	16
6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	20,59	20,59	20,59	20,59	21,00
7.	Angka Harapan Hidup	Angka	77,55	77,72	77,67	77,67	77,98
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,18	1,17	1,34	1,34	1,30
9.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	5,53	4,86-5,44	4,86-5,44	4,86-5,44
10.	Pendapatan per kapita **PDRB ADHK*	Juta	50,74	53,11	54,11	54,11	59,16

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja 2023		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Penetapan 2023	Perubahan Tahun 2023	
11.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	-68,21	-0,7	10,00	10,00	10,55
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,26	5,58	6,46-5,51	6,46-5,51	6,46-5,51
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,36	71,00	69,71	69,71	70,10
14.	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	93,30	93,30	94,50	94,50	96,00
15.	Pola Pangan Harapan	Nilai	90,70	95,10	92,20	92,20	97,00
16.	Persentase Peminat Transmigrasi	%	1,00	1,00	3,30	3,30	4,60
17.	Score Capaian KLA	Nilai	607,25	607,35	615,00	615,00	630,00
18.	IDG	Nilai	79,08	95,37	80,00	80,00	81,50
19.	IPG	Nilai	95,37	95,44	95,00	95,00	96,50
20.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,99	66,85	65,50	65,50	70,00
21.	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	100	100
22.	Penanggulangan Potensi Konflik	%	NA	NA	100	100	100
23.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	NA	3,82	3,84	3,84	3,90
24.	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	%	50,00	50,00	52,50	52,50	60,00
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	58,65	61,34	56,20	56,20	56,80
26.	Rasio	%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja 2023		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Penetapan 2023	Perubahan Tahun 2023	
	Konektivitas Kota						
27.	Rasio Lalu Lintas Kota	Rasio	0,30	0,30	0,35	0,35	0,50
28.	Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	9,8	10,00	10,20	10,20	11,00
29.	Pemukiman yang Tertata	%	6,19	6,22	6,26	6,26	6,49

Sedangkan penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023		
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84,7	84,75	84,75	85	SETDA
2.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28	32,30	37	37	65	DINAS PKP
3.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,42	1,42	1,64	DISPANGTAN
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	83.58	84.03	84.50	84.50	85.87	DISDIK
5.	Angka Kemiskinan	%	4,95	4,73	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59	DINSOS
6.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,02	0,09	0,09	0,06	DINKES
7.	PDRB per kapita	Juta Rp	84,61	84.7	84,75	84,75	85	SETDA
B	**Aspek Daya Saing Daerah**							
1.	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,40	3,84	3,90	BPBD
2.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,21	96,21	96,5	2,7	3	DISKOMINFO
C	**Aspek Pelayanan Umum**							
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							DISDIK

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
1)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,81	84.81	84,82	84,82	84,85	
2)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,22	99.22	99,23	99,23	99,26	
3)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,72	96.72	96,73	96,73	96,76	
4)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,95	61,95	61,96	61,96	61,99	
	Kesehatan							DINKES
5)	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	429,55	117	172	172	129	
6)	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	13,55	10,75	12,89	12,89	10,31	
7)	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,09	0,02	0,09	0,09	0,07	
8)	Success Rate TB	%	92	85	92	92	95	
9)	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	39,33	38,54	37,76	37,76	35,4	
10)	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	50	50	66	66	82	
11)	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							DPU PR
12)	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	96	96	97	97	97	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
13)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	0	50	65	65	91	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							DINAS PKP
14)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,31	2,26	2,23	2,23	2,02	
15)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28	32.30	37	37	65	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							SATPOL PP, KESBANGPOL, BPBD
16)	Presentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	
17)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	
18)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,73	1,73	1,72	1,72	1,69	
19)	Prosentase Kelurahan tanggap Bencana	%	0	0	17,39	17,39	26,09	
	Sosial							DINAS SOSIAL
20)	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	64,72	70	70	70	85	
	Tenaga kerja							DISPERINAKER

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
21)	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	0	15	70	70	100	
22)	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,2	50	50	50	
23)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	95,76	95,76	99,72	
24)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	46,15	46,15	53,8	53,8	76,9	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							DP3APPKB
25)	Prosentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	25	32,14	28,57	28,57	39,29	
26)	Prosentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	
27)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	39,66	41,89	40	40	40	
	Pangan							DISPANGTAN
28)	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,35	1,42	1,42	1,64	
29)	Ketersediaan informasi pasokan harga	%	94	94	95,7	95,7	96,6	
30)	Ketersediaan pangan utama (beras)	ton	20.783	20.783	20.783	20.783	27.662	
31)	Ketersediaan energi per kapita	Kkal	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
		perkapita						
32)	Ketersediaan protein per kapita	Gram perkapita	79	79	81	81	86	
	Pertanahan							DINAS PKP
33)	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	10	90	25	25	75	
34)	Persentase luas lahan bersertifikat	%	10		20	20	100	
	Lingkungan Hidup							DLH
35)	Indeks Kualitas Air	Nilai	42,50	47,87	41,20	41,20	41,80	
36)	Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,82	84,57	79,80	79,80	80,40	
37)	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47,21	59,38	47	47	47	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							DISDUKCAPIL
38)	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	97,63	98,67	98,7	98,7	99,00	
39)	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	94,32	95,53	95,6	95,6	96,5	
40)	Persentase anak 0-17$^{th\ kurang\ 1\ hari}$ yg memiliki KIA	%	75,12	79,01	79,2	79,2	80	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
41)	Persentase peningkatan swadaya masarakat	%/th	-	2	-	-	-	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							DP3APPKB

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
42)	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,9	2,40	2,4	2,4	2,1	
	Perhubungan							DISHUB
43)	Rasio Ijin Trayek	%	24,37	24,37	24,37	24,37	21,87	
44)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	24,79	24,79	22,79	
45)	Pemasangan Rambu rambu	%	71	77	77	77	95	
46)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	82	82	83	
47)	Persentase layanan angkutan darat	%	27,53	27,53	27,53	27,53	29	
	Komunikasi dan Informatika							DISKOMINFO
48)	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,7	2,7	3	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							DINKOP UKM
49)	Persentase usaha mikro dan kecil	%	96	99	96	96	96	
50)	Persentase Koperasi Aktif	%	70	69,83	70,56	70,56	72,22	
	Penanaman Modal							DPMPTSP
51)	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Proyek	61	61	63	63	69	
52)	Kenaikan nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	61,36	166,578	67,49	67,49	89,83	
53)	Kenaikan nilai investasi PMA	Milyar Rupiah	440,9	314,749	484,99	484,99	645,52	
	Kepemudaan dan olah raga							DISPORA

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
54)	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,45	2,5	2,5	3,25	
55)	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	8,12	38	8	8	10	
56)	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	80	80	80	80	80	
	Statistik							DISKOMINFO
57)	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	85	100	90	90	95	
	Persandian							DISKOMINFO
58)	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	90	100	90	90	95	
	Kebudayaan							DISBUDPAR
59)	Presentase obyek pemajuan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	14,71	14,71	14,71	14,71	58,82	
60)	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	16,43	10,2	24	24	45	
	Perpustakaan							DINPERSIPDA
61)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,45		5,95	5,95	7,45	
	Kearsipan							DINPERSIPDA
62)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas	%	75		75,5	75,5	77	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
	kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional							
	Kelautan dan Perikanan							DISPANGTAN
63)	Produktifitas ikan budidaya	ton	750	1000	775	775	850	
64)	Produktifitas benih ikan	juta ekor	2		2,5	2,5	4	
	Pariwisata							DISBUDPAR
65)	Jumlah wisatawan nusantara	Orang	182.743	99.745	232.7430	232.7430	382.743	
66)	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	467	255	967	967	2.967	
67)	Tingkat hunian akomodasi	%	17,42	17,42	15	15	15	
68)	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8	8	8	8	8	
69)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	Pertanian							DISPANGTAN
70)	Produktivitas Pertanian Padi	%	5,87	6,73	5,99	5,99	6,35	
71)	Jumlah tanaman Perkebunan dan holtikultura/florikultura	batang	9.000		9.900	9.900	13.000	
72)	Produksi Peternakan							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
	• Daging	Kg	1.018.000		1.018.000	1.018.000	1.131.000	
	• Susu	liter	4.939.939		4.976.731	4.976.731	5.087.107	
	• Daging ayam	kg	464.000		547.500	547.500	584.000	
	• Telur	kg	171.360		174.787	174.787	185.486	
73)	Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	kasus	0	-	0	0	0	
	Perdagangan							DISDAG
74)	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	-3,76	4,72	4,77	4,77	4,89	
	Perindustrian							DISPERINAKER
75)	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	0,30	0,30	0,31	0,31	0,49	
76)	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73		31,00	31,00	31,15	
	Transmigrasi							DISPERINAKER
77)	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	-	-	3,3	3,3	6,09	
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan							BAPPEDA
78)	Indeks Inovasi	Nilai	46,28	46,28	46,30	46,30	46,36	
79)	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam	%	73,33	70	20	20	46,67	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023		
	Perencanaan Pembangunan							
80)	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	85,71	100	75	75	100	
81)	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	
	Keuangan							BPKPD
82)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
83)	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	3,13	4,12	2,5	2,5	10	
	Kepegawaian							BKPSDM
84)	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,04	52,04	55	55	65	
85)	Nilai Sistem Merit	Nilai	Data belum tersedia	Data belum tersedia	275	275	326	
	Pengawasan							IRDA
86)	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	
87)	QA SPIP	Nilai	3	3	3,04	3,04	3,10	
88)	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,91	2,92	2,94	2,94	3	
89)	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,70	2,74	2,78	2,78	3	
	Sekretariat DPRD							SETWAN

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
90)	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	88		100	100	100	
	Sekretariat Daerah							SETDA
91)	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	66,06		81	81	81,75	
92)	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34,37		34,47	34,47	35	
93)	Indeks PMPRB	Nilai	70,95	65	72	72	74	
94)	Nilai SAKIP	Nilai	64,50		65	65	70	
	Kecamatan Sidomukti							KEC. SIDOMUKTI
95)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,11	80	89,20	89,20	89,50	
96)	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	59,13	70	60	60	63	
97)	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,71	45	79,75	79,75	79,90	
98)	Prosentase PKK Aktif	%	0	0	50	50	65	
	Kecamatan Sidorejo							KEC. SIDOREJO
99)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,83	92	86	86	89	
100)	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,51	88	93,52	93,52	93,55	
101)	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	41,322	60	58	58	60	
102)	Prosentase PKK Aktif	%	0	0	50	50	65	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Peruba-han Tahun 2023		
	Kecamatan Tingkir							KEC. TINGKIR
103)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,94	92	92,05	92,05	92,2	
104)	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	95,62	88	71	71	74	
105)	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	40,39	60	60	60	60,15	
106)	Prosentase PKK Aktif	%	0	0	72	72	73,5	
	Kecamatan Argomulyo							KEC. ARGOMULYO
107)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,06	81	82	82	88	
108)	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60	60	60,05	60,05	62	
109)	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60	61	62	62	68	
110)	Prosentase PKK Aktif	%	0	0	50	50	65	

Tabel 4. 5 Target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD 2023

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84.7	84,75	84,75	85	**SETDA**
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28	32.30	37	37	65	**DINAS PKP**
3	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,42	1,42	1,64	**DISPANGTAN**
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	83.58	84.03	84.50	84.50	85.87	**DISDIK**
5	Angka Kemiskinan	%	4,95	4,73	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59	**DINSOS**
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,02	0,09	0,09	0,06	**DINKES**
B	**Aspek Daya Saing Daerah**							
1	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,4	2,4	2,7	**DISKOMINFO**
2	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,21	96,21	96,5	96,5	98	**DPU PR**
C	**Aspek Pelayanan Umum**							
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							**DISDIK**
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,81	84.81	84,82	84,82	84,85	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,22	99.22	99,23	99,23	99,26	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,72	96.72	96,73	96,73	96,76	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,95	61,95	61,96	61,96	61,99	
	Kesehatan							**DINKES**
5	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	429,55	117	172	172	129	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
6	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	13,55	10,75	12,89	12,89	10,31	
7	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,09	0,02	0,09	0,09	0,06	
8	Success Rate TB	%	92	85	92	92	95	
9	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	39,33	38,54	37,76	37,76	35,40	
10	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	50	50	66	66	82	
11	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	**RSUD**
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							**DPU PR**
12	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	96	96	97	97	98	
13	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	0	50	65	65	91	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							**DINAS PKP**
14	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,31	2,26	2,23	2,23	2,02	
15	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28	32.30	37	37	65	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							**SATPOL PP, KESBANGPOL, BPBD**
16	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	
17	Cakupan pelayanan kebakaran	%	66.9	66.9	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
	kabupaten/kota							
18	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,73	1,73	1,72	1,72	1,69	
19	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.	%	NA	NA	100	100	100	
20	Kelurahan Tangguh Bencana	%	NA	15	17	17	26	
21	Indeks Risiko Bencana	%	91.20	91.00	90,80	90,80	90,00	
	Sosial							**DINAS SOSIAL**
22	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	64,72	64.72	70	70	85	
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar							
	Tenaga kerja							**DISPERINAKER**
23	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	NA	40	70	70	100	
24	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,20	50	50	50	
25	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	95,76	95,76	99,72	
26	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	46,15	46,15	53,8	53,8	76,9	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							**DP3APPKB**
27	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	25	32,14	28,57	28,57	39,29	
28	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	39,66	40	40	40	41	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
	Pangan							**DISPANGTAN**
29	Ketersediaan beras	%	70	70	70	70	70	
30	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	
31	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita	106	107	108	108	111	
32	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,42	1,42	1,64	
	Pertanahan							**DINAS PKP**
33	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	10	90	25	25	75	
34	Persentase luas lahan bersertifikat	%	10	20	20	20	100	
	Lingkungan Hidup							**DLH**
35	Indeks Kualitas Air	Nilai	42,50	47,87	41,20	41,20	41,80	
36	Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,82	84,57	79,80	79,80	80,40	
37	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47,21	59,38	47	47	47	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							**DISDUKCAPIL**
38	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	97,63	98,67	98,70	98,70	99,00	
39	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	94,32	95,53	95,60	95,60	96,50	
40	Persentase anak 0-17$^{th\ kurang\ 1\ hari}$ yg memiliki KIA	%	75,12	79,01	79,2	79,2	80	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							**DP3APPKB**
41	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,90	2,40	2,40	2,40	2,10	
42	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	20	20	24	24	24	
	Perhubungan							**DISHUB**

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
43	Rasio Ijin Trayek	%	24,37	24,37	24,37	24,37	21,87	
44	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	24,79	24,79	22,79	
45	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	82	82	83	
	Komunikasi dan Informatika							**DISKOMINFO**
46	Tingkat keterbukaan informasi publik	%	94	95	96	96	100	
47	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,4	2,4	2,7	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							**DINKOP UKM**
48	Persentase koperasi aktif	%	70.00	70.00	70.56	70.56	72.22	
49	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	96	96	96	
	Penanaman Modal							**DPMPTSP**
50	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	tad	-18,13	3,00	3,00	5,00	
51	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	tad	tad	10,00	10,00	10,35	
52	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	tad	tad	10,00	10,00	10,75	
	Kepemudaan dan olah raga							**DISPORA**
53	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,45	2.45	2.45	2.50	
54	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73	38.73	38.73	38.73	39.50	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
55	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	
	Statistik							**DISKOMINFO**
56	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	92	93	94	94	95	
	Persandian							**DISKOMINFO**
57	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	75	78	80	80	89	
	Kebudayaan							**DISBUDPAR**
58	Persentase obyek pemajuan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	14,71	14,71	14,71	14,71	58,82	
59	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	16,43	16.43	24	24	45	
	Perpustakaan							**DINPERSIPDA**
60	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,45	5.45	5,95	5,95	7,45	
	Kearsipan							**DINPERSIPDA**
62	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75	75	75,5	75,5	77	
	Urusan Pemerintahan Pilihan							
	Kelautan dan Perikanan							**DISPANGTAN**
62	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6	6	6	
63	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	5	5	5	
	Pariwisata							**DISBUDPAR**
64	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	%	106,07	106,07	107,31	107,31	110,13	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
	nusantara							
65	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-37,06	-37,06	45	45	79	
66	Tingkat hunian akomodasi	%	17,42	17,42	20	20	28	
67	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8	8	8,5	8,5	10	
68	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,06	0,06	0,11	0,11	0,16	
	Pertanian							**DISPANGTAN**
69	Produktivitas padi	%	6.1	6.1	6.1	6.1	6.15	
70	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	7	7	10	10	10	
71	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	NA	0.01	0.02	0.02	0.04	
72	Produktivitas Sapi Perah	%	0.05	0.05	0.72	0.72	0.82	
73	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	
	Perdagangan							**DISDAG**
74	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	-3,76	4,72	4,77	4,77	4,89	
	Perindustrian							**DISPERINAKER**
75	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,30	0,30	0,31	0,31	0,49	
76	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73	30.00	31,00	31,00	31,15	
	Transmigrasi							**DISPERINAKER**
77	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	1.00	NA	3,30	3,30	4.60	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan							**BAPPEDA**
78	Indeks Inovasi	Nilai	46,28	46,28	46,30	46,30	46,36	
79	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	NA	NA	20	20	46,67	
80	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	100	100	75	75	90	
	Keuangan							**BPKPD**
81	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
82	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	4,12	10,00	2,50	2,50	10,00	
	Kepegawaian							**BKPSDM**
83	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,04	54,40	55	55	61	
84	Nilai Sistem Merit	Nilai	242	255	275	275	326	
	Fungsi Penunjang Lainnya							
	Pengawasan							**IRDA**
85	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	
86	QA SPIP	Nilai	3	3	3,04	3,04	3,10	
87	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,91	2,92	2,94	2,94	3	
88	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,70	2,74	2,78	2,78	3	
	Sekretariat DPRD							**SETWAN**
89	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	88	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
	Sekretariat Daerah							**SETDA**
90	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	66.06	70.00	81.00	81.00	81.75	
91	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34.37	34,40	34.47	34.47	35.00	
92	Indeks PMPRB	Nilai	70.95	71	71	71	74	
93	Nilai SAKIP	Angka	64.50	64,50	65.00	65.00	70.00	
94	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84.7	84,75	84,75	85	
	Kecamatan							
	Kecamatan Sidomukti							**KEC. SIDOMUKTI**
95	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,11	80	89,20	89,20	89,50	
96	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	59,13	70	60	60	63	
97	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,71	45	79,75	79,75	79,90	
98	Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	50	50	65	
	Kecamatan Sidorejo							**KEC. SIDOREJO**
99	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,83	92	86	86	89	
100	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,51	88	93,52	93,52	93,55	
101	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	41,32	60	58	58	60	
102	Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	50	50	65	
	Kecamatan Tingkir							**KEC. TINGKIR**
103	Nilai Indeks Kepuasan	%	85,94	92	92,05	92,05	92,2	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	Perubahan 2023		
	Masyarakat							
104	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	95,62	88	71	71	74	
105	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	40,39	60	60	60	60,15	
106	Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	72	72	73,5	
	Kecamatan Argomulyo							**KEC. ARGOMULYO**
107	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,06	81	82	82	88	
108	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60	60	60,05	60,05	62	
109	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60	61	62	62	68	
110	Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	50	50	65	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor perekonomian dan sosial mengakibatkan menurunnya pendapatan dan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan membutuhkan pendanaan yang diproyeksikan meningkat. Dengan adanya kondisi tersebut maka target yang telah ditetapkan dalam RPD diupayakan dapat tercapai dengan memprioritaskan pendanaan pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 serta peningkatan pemulihan dampak Covid-19, serta penurunan angka kemiskinan yang menjadi inti tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Efisiensi belanja daerah dilakukan dalam perencanaan program kegiatan perangkat daerah untuk mengatasi kesenjangan antara pendapatan dan belanja sebagaimana diproyeksikan pada Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya kebijakan pemerintah dan juga sehubungan dengan pagu definitif bantuan keuangan dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 diterima setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta untuk penyesuaian penggunaan DAK 2023 dan Hibah KPU tahun 2023, APBD Tahun 2023 telah mengalami dua kali perubahan APBD. APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp978.098.220.600,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp12.024.146.000,00 (dua belas miliar dua puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp990.122.366.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan pada perubahan terakhir APBD tersebut mengalami pergeseran penggunaan untuk penyesuaian DAK 2023 dan Hibah KPU 2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 1.072 trilyun, terdiri atas pendapatan daerah sebesar 935,7 milyar, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar 127,2 milyar dan belanja daerah sebesar 1.070,5 trilyun. Perubahan RKPD tahun 2023 diprioritaskan pada pemenuhan gaji - TPP ASN dan non ASN, kekurangan pembayaran LPJU, pemenuhan mandatory spending dan juga kebutuhan rutin OPD.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 1 Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	226.789.700.000	252.412.921.235	25.623.221.235
4.1.01	Pajak Daerah	65.509.415.000	74.009.500.000	8.500.085.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.597.916.000	14.535.218.365	2.937.302.365
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.303.718.000	21.280.674.000	976.956.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	129.378.651.000	142.587.528.870	13.208.877.870
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	691.627.221.000	693.120.002.456	1.492.781.456
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	620.331.356.000	621.185.352.000	853.996.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71.295.865.000	71.934.650.456	638.785.456
	Jumlah Pendapatan	**918.416.921.000**	**945.532.923.691**	**27.116.002.691**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	881.734.519.718	974.925.667.411	93.191.147.693
5.1.01	Belanja Pegawai	406.080.095.946	435.288.179.172	29.208.083.226
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.012.777.970	504.627.242.437	62.614.464.467
5.1.04	Belanja Subsidi	96.000.000	96.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	32.245.645.802	34.076.445.802	1.830.800.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.300.000.000	837.800.000	-462.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**	93.458.251.282	95.320.680.226	1.862.428.944
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.131.581.125	1.124.210.200	-10.007.370.925
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.110.042.097	35.885.167.262	6.775.125.165

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.569.769.745	18.408.911.431	-160.858.314
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	32.147.617.065	37.502.400.183	5.354.783.118
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.499.241.250	2.399.991.150	-99.250.100
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14.929.595.600**	**1.000.000.000**	**-13.929.595.600**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.929.595.600	1.000.000.000	-13.929.595.600
	Jumlah Belanja	**990.122.366.600**	**1.071.246.347.637**	**81.123.981.037**
	Total Surplus/(Defisit)	**-71.705.445.600**	**-125.713.423.946**	**-54.007.978.346**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	73.205.445.600	127.213.423.946	54.007.978.346
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.205.445.600	127.213.423.946	54.007.978.346
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**73.205.445.600**	**127.213.423.946**	**54.007.978.346**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	1.500.000.000	1.500.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	Pembiayaan Netto	**71.705.445.600**	**125.713.423.946**	**54.007.978.346**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	**991.622.366.600**	**1.072.746.347.637**	**81.123.981.037**

Penjabaran prioritas pembangunan dalam program kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dalam tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5. 2 Penjabaran Rencana Program Prioritas Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
1	Pemantapan usaha ekonomi kerakyatan terutama dalam mendukung UMKM, industri kecil dan menengah untuk menciptakan produk kreatif yang berdaya saing	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	17,92%	475.000.000	414.225.000	DINKOP UKM	Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan berbagai kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pemantapan UMKM dalam upaya peningkatan persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan menjadi salah satu indikator keberhasilan program ini.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	51,00%	48.000.000	48.000.000	DINKOP UKM	Koperasi yang merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi kerakyatan perlu dilakukan peningkatan kualitas organisasi untuk mewujudkan produk koperasi yang kreatif dan berdaya saing. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota menuju peningkatan persentase koperasi yang berkualitas
		Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	26,32%	50.000.000	50.000.000	DINKOP UKM	Salah satu bentuk pembiayaan yang mendukung ekonomi kerakyatan adalah melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan upaya peningkatan persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	36,34%	263.000.000	263.000.000	DINKOP UKM	Pendidikan perkoperasian adalah salah satu upaya terbaik untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota tentang besarnya manfaat yang diberikan oleh koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan berbagai kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dengan upaya peningkatan persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase akses pasar anggota koperasi	25,00%	620.000.000	597.850.000	DINKOP UKM	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan usaha untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasidalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan adanya berbagai kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan upaya peningkatan persentase akses pasar anggota koperasi.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wira usaha	30,64%	1.225.570.000	1.219.735.000	DINKOP UKM	UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan upaya peningkatan persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah peran serta Masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	10 kelompok	404.980.500	428.563.700	DISBUDPAR	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan membantu pelaku ekonomi kreatif untuk lebih kreatif dan berdaya saing. Selain itu, bidang pariwisata dan ekonomi kerakyatan di sekitar destinasi wisata menjadi lebih kreatid berdaya saing menuju ekonomi berkelanjutan. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan upaya peningkatan jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Obyek Wisata	30 buah	3.070.846.000	2.844.740.000	DISBUDPAR	Pariwisata merupakan salah satu kunci pendongkrak perekonomian kerakyatan karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat daerah wisata. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan upaya peningkatan jumlah objek wisata.
		Program pemasaran pariwisata	Jumlah Kegiatan/fasilitasi Pemasaran	3 kegiatan	1.057.838.230	1.177.510.630	DISBUDPAR	Pemasaran pariwisata berperan sebagai penghubung atau jembatan yang menghubungkan wisatawan dengan objek wisata yang ada. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan upaya peningkatan jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	0.3%	1.151.380.000	1.151.380.000	DISPERINAKER	Pemantapan usaha ekonomi kerakyatan guna mendukung industri kecil dan menengah untuk menciptakan produk kreatif yang berdaya saing dilaksanakan dengan Pengembangan Industri. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang, dan mengawasi atau merangsang berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan industri yang baru. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri dengan upaya peningkatan persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,70%	20.000.000	17.899.000	DISPERINAKER	Sesuai Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri, karena kewajiban tersebut, upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang di keluarkan oleh instansi terkait	25%				Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kinerja dari pelaksanaan programtersebut adalah tercapainya peningkatan persentase pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah serta pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan target yang ditetapkan.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase jumlah usaha industry yang memiliki akun SIINAS dan atau melaporkan data industri	4,70%	20.000.000	17.899.000	DISPERINAKER	Dengan menggunakan system digitalisasi SIINas berbasis data, semua data tentang industri maupun kawasan industri dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan sehingga memudahkan melakukan mobilitas dengan menggunakan system digitalisasi ini tanpa harus melakukan pertemuan langsung. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan berbagai kegiatan penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. dengan upaya peningkatan persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri. Dukungan program ini untuk memantapkan usaha industri Kota Salatiga guna memantapkan usaha ekonomi kerakyatan.
2	Pemantapan program-program	Program Pemberdayaan Dan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	80%	1.525.937.000	1.607.959.642	DP3APPKB	Keluarga merupakan hal yang sangat mendasar dimana semua kehidupan berawal dari rumah

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
	penanggulangan kemiskinan dan Stunting	Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Balita/Anak dengan tumbuh kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	90%				dengan pengawasan dari keluarga sehingga kebiasaan dan nilai-nilai ditransformasi dengan baik. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan kegiatan : 1. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan upaya peningkatan Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina.
			Cakupan Kader BKB yang Terlatih	83,00%				
			Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 Tahun	1,90%				
			Persentase Baduta Stunting	26%				
			Rasio Pembantu Pembian Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1:2 rasio				
		Program	Persentase PKK Aktif	100%	486.291.000	553.400.600	DP3APPKB	Keluarga merupakan lingkungan

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Peningkatan kualitas keluarga	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	25,00%				utama tempat terbentuknya kepribadian sekaligus pranata sosial pertama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu upaya penurunan stuntingadalah dengan peningkatan konvergensi intervensi sensifit melalui Program peningkatan kualitas keluarga. Uupaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan berbagai kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja persentase PKK Aktif terutama untuk penurunan stunting dan terbentuknya PPKS.
		Program Perlindungan Dan Jaminan	Persentase Data Faskir Miskin yang divalidasi	94,50%	2.941.852.000	2.941.852.000	DINSOS	Perlindungan sosial dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	97,00%				ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan melalui penanganan data fakir miskin serta pemenuhan kebutuhan anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan berbagai kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota serta peningkatan peningkatan pemenuhan kebutuhan bagipenyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentasea nak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%	896.419.500	945.296.052	DINSOS	Salah satu upaya penurunan angka kemiskinan yang perlu dilaksanakan Pemerintah Kota Salatig adalah pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
			Presentase warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosisal dasar tuna social di luar panti	100%				
			Presentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Presentase warga negara penyandang disablitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%				
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	34,61%	1.117.004.200	1.117.004.200	DINSOS	Pemberdayaan sosial merupakan strategi peningkatan "daya" atau kekuatan (power) individu, lembaga dan komunitas. Selanjutnya Daya dan kekuatan ini digunakan untuk upaya yang dilakukan untuk pemantapan programprogram penurunan angka kemiskinan. Upaya dalam mendukung program ini adalah dengan kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosialdalam rangka peningkatanpersentase terbentuknya Lembaga Puskesos, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, serta peningkatan persentase PSKS yang dibina.
			Persentase PSKS yang dibina	70,00%				
			Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	45,30%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	95%	1.059.600.600	1.094.256.600	DISPANGTAN	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, merupakan salah satu strategi dalam penurunan stunting. Upaya pemenuhan strategi tersebut dengan dilaksanakannya program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Program ini bertujuan untuk menggali dan meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan sehingga terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut berupakegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. dengan upaya peningkatan Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER).

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
3	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur yang mengarah pada penyelesaian penataan wajah kota dan penyediaan transportasi yang murah dan ramah lingkungan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	86%	10.465.238.000	10.565.238.000	DPU PR	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur dasar menjadi hal yang perlu dilaksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur Air Minum. Selain sebagai bagian dari infrastruktur dasar yang wajib dipenuhi pemerintah untuk masyarakat, SPAM merupakan salah satu indikator SPM menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah. Upaya pendukung prioritas tersebut adalah pelaksanaan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan tersebut adalah dengan berbagai kegiatan untuk pemenuhan target seluruh rumah tangga mendapatkan akses air minum.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	95,28%	5.409.507.000	5.659.507.000	DPU PR	Penyediaan pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu layanan infrastruktur yang menjadi indikator Standar Pelayanan Minimum. Prioritas pemantapan dan pemerataan infrastruktur dasar menjadi salah satu upaya pemenuhan SPM infrastruktur. Upaya-upaya pendukung untuk program tersebut adalah dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dengan upaya peningkatan Penambahan SR IPAL dan sanitasi setempat.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	76,51%	14.221.924.277	14.319.478.277	DPU PR	Pemeliharaan infrastruktur menjadi salah satu upaya dalam pemantapan infrastruktur dasar. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan infrastruktur, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase ertujuan untuk mewujudkan jaringan drainase kondisi baik menuju infrastruktur dasar yang mantap bagi masyarakat Kota Salatiga. Upaya pendukung untuk program tersebut adalah dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan, dengan upaya peningkatan persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	80%	753.010.000	753.010.000	DPU PR	Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Prosestase rekomtek IMB yang terbit. Dengan tercapainya kinerja program ini diharapkan Penataan Wajah Kota yang belum optimal bisa terealisasi sesuai target tang telah ditetapkan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan Kondisi mantap	93,90%	25.601.176.000	31.321.176.000	DPU PR	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur yang mengarah pada penyelesaian penataan wajah kota dan penyediaan transportasi yang murah dan ramah lingkungan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan tahun 2023 perlu didukung dengan pemeliharaan jalan dan jembatan yang berada di wilayah Kota Salatiga. Pekerjaan pemeliharaan konstruksi jalan merupakan

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	95,58%				pekerjaan yang penting untuk dilaksanakan karena konstruksi jalan merupakan investasi modal yang besar, sehingga apabila pelaksanaaannya diabaikan akan membutuhkan biaya rekonstruksi yang sangat mahal untuk bisa mempertahankan performance standard (perbaikan ke standar kondisi yang layak). Upaya dukungan untuk program adalah dengan berbagai kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Kinerja program ini adalah untuk mewujudkan peningkatan prosentase jalan Kondisi mantap serta prosentase jembatan dalam kondisi baik.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat Ketaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	97%	1.350.000.000	1.350.000.000	DPU PR	Penataan wajah kota yang merupakan salah satu kinerja yang belum tercapai pada periode sebelumnya perlu upaya nyata dalam pemenuhan target kinerja. Salah satu unsur penilai dalam penataan wajah kota adalah tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pprogram yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mendukung kinerja tersebut adalah program Penyelenggaraan Pentaan Ruang. Beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kebutuhan ruang, tanpa adanya pengaturan akan membahayakan ekosistem; bertambahnya manusia, akan meningkatkan kebutuhan akan ruang, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan ruang dari alamiah menjadi kawasan pertanian, bangunan, permukiman, dan tempat usaha. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan berbagai kegiatanpenetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
								pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah dengan upaya peningkatan Persentase rekomendasi Keterangan Rencana Kota.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,86%	8.242.602.001	8.544.826.001	DINAS PKP	Tidak hanya berpengaruh terhadap tata ruang dan mendorong degradasi lingkungan, kawasan kumuh juga menjadi sebuah gambaran yang menunjukkan kondisi ketimpangan, kemiskinan, maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Penataan Kawasan Permukiman menjadi salah satu alternatif untuk menata wajah kota menjadi lebih baik. Upaya dukungan untuk pelaksanan program tersebut adalah dengan berbagai kegiatan dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan
			Presentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	4,78%				
			Terfasilitasinya terbentuknya Masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	13,04%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
								pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).
		Program Pengembangan Perumahan	Failitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	25%	815.552.000	739.478.000	DINAS PKP	Masalah Rumah layak huni menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna menyediakan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	0%				
			Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	25%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
								relokasi program pemerintah kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	5,60%	8.166.209.999	8.142.356.147	DINAS PKP	PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Upaya dukungan untuk program ini adalah dengan berbagai kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dengan upaya peningkatan cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung
			Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	37%				
			Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatanya kapasitas TPU	17,26%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
								PSU.
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	100%	216.502.000	216.502.000	DLH	Perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya, serta dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan guna mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan upaya peningkatan dokumen IKPLHD dan dokumen KLHS.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	3 dokumen	359.434.512	359.434.512	DLH	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan salah satu program dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan merupakan sebuah hal penting yang merupakan tanggung jawab semua pihak karena pelestarian lingkungan dapat menjadi upaya dalam mencegah serta melindungi alam dari kemusnahan dan kerusakan sekaligus sebagai mitigasi bencana. Upaya dukungan untuk program ini adalah dengan berbagai kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota, dengan upaya peningkatan Pemantauan Status Mutu Air, Ketersediaan Laboratorium Pengujian Lingkungan, Presentase Konservasi Lahan, Persentase Konservasi Sumber Mata Air.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di keloka	321 Ha	5.451.182.837	5.451.182.837	DLH	Keanekaragaman hayati penting, terutama karena nilai/manfaat yang dapat disumbangkannya bagi kelangsungan hidup manusia baik secara jasmani maupun rohani, secara langsung maupun tidak langsung, serta bagi kelangsungan keberadaan keanekaragaman hayati itu sendiri. Dengan indikator kinerja pada pemenuhan Ruang Terbuka Hijau, menjadikan program ini strategis dalam mendukung prioritas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Upaya dukungan untuk program ini adalah dengan berbagai kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota, termasuk penambahan ruang terbuka hijau.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangan nya	1 dokumen	95.900.000	95.900.000	DLH	Sebagai bagian dari penciptaan lingkungan yang berkelanjutan dan penggunaan bahan-bahan/material yang ramah lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian bahan dan berbahaya dan beracun (B3). Limbah bahan berbahaya beracun (B3) perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari dan merusak lingkungan. Jika dibuang sembarangan, bahan kimia tersebut dapat mencemari tanah, air dan udara. Pada akhirnya, cepat atau lambat, pencemaran itu akan memengaruhi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia. Upaya untuk mendukung program tersebut adalah dengan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengelolaan Persampahan	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	0	3.15.155.867	3.317.218.267	DLH	Permasalahan sampah perkotaan yang menjadi salah satu isu untuk mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan, perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya. Manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada. Sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik. Upaya dukungan yang dilakukan untuk program ini dengan adanya kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. dengan upaya meningkatkan Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.
4	Pemantapan dan pemerataan	Program Pengelolaan	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.0005 %	45.672.711.270	45.577.621.226	DISDIK	Pemantapan dan pemerataan pendidikan serta pengembangan

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
	pendidikan dan kesehatan serta pengembangan teknologi yang berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	100%				teknologi yang berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dilaksanakan pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan /rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah.
			Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs	20%				
			Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	87,29%				
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,96 nilai				
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,78 nilai				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	50%	31.586.700	31.586.700	DISDIK	Program Pengembangan Kurikulum juga menjadi salah satu bentuk pemenuhan prioritas pembangunan untuk pemantapan dan pemerataan Pendidikan. Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.
			Prosentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	20%				
			Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	16%				
		Program Pendidik dan Tenaga	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	40%	19.909.436.000	21.351.379.988	DISDIK	Salah satu faktor pembentuk kualitas pendidikan demi pemantapan dan pemerataan

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Kependidikan	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	50%				pendidikan ddengan pengembangan teknologi yang berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
			Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	30%				
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	84,96%				
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	97,31%				
			Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	96,44%				
		Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	28,57%	39.700.800	39.700.800	DISDIK	Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk
			Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	58,34%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	97%				mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TK/RA yang terakreditasi, Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs.
			Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	97%				
			Persentase TK/RA yang terakreditasi	86,10%				
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	17%	87.150.000	131.781.200	DISDIK	Pelaksanaan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra menjadi salah satu bagian dalam pemantapan kualitas pendidikan. Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra.
			Persentase Sekolah Yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	10%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Persentase Sekolah Yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	10%				
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standart	100%	37.128.279.871	42.000.654.802	DINKES	Pemantapan dan pemerataan kesehatan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dilaksanakan dengan salah satunya penerapan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.
			Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	84%				
			Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	82%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	55%	923.177.000	923.177.000	DINKES	Tenaga Kesehatan yang berhubungan langsung dalam pelayanan kesehatan masyarakat, menjadi hal sangat penting dalam upaya pemantapan dan pemerataan kesehatan kepada masyarakat. Penerapan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan menjadi hal yang strategis dalam membantu mewujudkan tujuan tersebut. Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	62%	389.139.000	405.685.800	DINKES	Pelaksanaan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman bertujuan untuk peningkatan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan syarat perijinan sebagai upaya pemantapan dan pemerataan kesehatan bagi masyarakat. Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan desa siaga strata mandiri	95.6%	2.486.308.441	2.479.622.200	DINKES	Pemerataan dan pemantapan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari upaya mandiri masyarakat dalam bidang kesehatan. Pembentukan kelurahan siaga kesehatan menjadi salah satu cara dalam mewujudkan keswadayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan menjadi salah satu langkah strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5%	1.189.588.000	1.189.588.000	DISPORA	Pengembangan teknologi yang berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bisa diwujudkan melalui peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan. Sosok pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami pertumbuhan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda ikut berperan dalam pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini dengan adanya kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota. Tujuan utma program ini adalah peningkatan Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Prosentase Atlet yang mengikuti Pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	25%	9.180.001.620	9.180.001.620	DISPORA	Pengembangan keolahragaan bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat, dapat meningkatkan kapasitas, sinergitas dan produktivitas olahraga daerah yang akan meningkatkan potensi daerah dan prestasi nasional, dan terpenting dapat memajukan perekonomian berbasis olahraga. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan adalah dengan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Program ini diarahkan untuk pencapaian peningakatan Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	60%	1.312.927.000	1.312.927.000	DISPORA	Gerakan pramuka mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Program pengembangan kapasitas kepramukaan bertujuan untuk peningkatan persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.
		Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca	80,83 nilai	1.022.833.200	1.110.701.500	PERSIPDA	Perpustakaan berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang berbasis literasi dan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang bisa melahirkan inovasi maupun kreativitas. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan berbagai kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan peningkatan nilai tingkat kegemaran membaca.
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peserta yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	13,98%	2.674.918.000	2.674.918.000	BKPSDM	Sumberdaya aparatur bagi pemerintahadalah hal yang sangat vital. Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya. Upaya yang dilakukan untuk

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Persentase Peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis	4,15%				mendukung program ini adalah dengan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. dengan peningkatan persentase Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi.
5	Pemantapan dan Pemerataan kualitas pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik pemerintah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	95%	719.423.600	719.423.600	DISKOMINFO	Pemantapan dan pemerataan kualitas pelayanan publik bisa dicapai dengan terpenuhinya Keterbukaan informasi. Hal tersebut menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan berbagai kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan peningkatan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan progran prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Aplikasi Informatika	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	4.662.178.850	4.662.178.850	DISKOMINFO	Aplikasi informatika dapat membantu pemerintah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mempercepat inovasi untuk peningkatan pelayanan publik. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi menjadi acuan kinerja yang harus dipedomani pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan publik
			Prosentase pelayanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	95%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah	80%	200.619.200	200.619.200	DISKOMINFO	Statistik sektoral ditujukan untuk kepentingan pemerintah, instansi pemerintah yang membutuhkan acuan statistik, data yang terverifikasi dan tervalidasi untuk kepentingan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan berbagai kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk peningkatan presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.
			Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	80%				
		Program Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	100%	468.131.000	169.023.056	DISDUKCAPIL	Salah satu pelayanan publik yang perlu pemantapan dan pemerataan kualitas adalah pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan berbagai kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	77.322.000	302.488.000	DISDUKCAPIL	Bentuk pelayanan publik lainnya yang perlu dimantapkan dan diratakan adalah pencatatan sispil. Pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	107.841.000	95.744.000	DISDUKCAPIL	Administrasi kependudukan memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. Data kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan serta penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala Nasional (PMA/PMDN)	10%	259.203.000	259.203.000	DPMPTSP	Pemerintah terus mendorong investasi yang merupakan salah satu pemantik pertumbuhan ekonomi dan terbukannya lapangan kerja. Pelayanan publik pada sektor ini menjadi hal yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan berbagai kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan peningkatan jumlah promosi penanaman modal.
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	90%	158.989.700	76.578.438	DPMPTSP	Pelayanan investasi yang mudah dapat mendorong peningkatan investasi. upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan peningkatan Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Partisipasi Masyarakat dalam Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82%	505.235.500	505.235.500	KECAMATAN ARGOMULYO	Dalam era mewujudkan good governance, pelayanan publik menjadi bagian penting dan titik strategis. Pemerintah sebagai salah institusi penyelenggara pelayanan publik secara sederhana dapat disebut sebagai penyedia layanan publik dan harus memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan peningkatan adalah Persentase Peningkatan Skor IKM.
			Prosentase peningkatan skor indeks kepuasan masyarakat	0.85%	453.718.500	453.268.500	KECAMATAN SIDOMUKTI	
			Prosentase peningkatan skor indeks kepuasan masyarakat	0.82%	567.276.500	584.133.100	KECAMATAN SIDOREJO	
			Prosentase peningkatan skor IKM	83%	445.618.500	445.618.500	KECAMATAN TINGKIR	

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	24.352.147.837	8.252.152.237	BPKPD	Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash managenent (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.398.500.000	1.398.500.000	BPKPD	Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). upaya dukungan untuk program tersebut adalah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan upaya peningkatan Asset Management.
6		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1.074.906.700	1.074.906.700	BPKPD	Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. upaya dukungan untuk program tersebut adalah dengan kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan upaya peningkatan Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	95%	719.423.600	719.423.600	DISKOMINFO	Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan peningkatan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan progran prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase SDM di bidang persandian	30%	230.993.300	212.183.300	DISKOMINFO	Keamanan informasi terhadap layanan publik semakin dibutuhkan, hal ini dikarenakan tiap detik terdapat upaya serangan siber untuk mencuri informasi dari sistem komputer. upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan peningkatan Persentase SDM di

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
								bidang persandian.
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100%	3.410.424.000	2.958.810.400	SETDA	Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu persentase peningkatan evaluasi perkembangan kelurahan, Peningkatan fasilitasi forum asosiasi kepala daerah, Peningkatan kapasitas SDM LPMK, sarasehan awal tahun,
			Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	100%				
			Terlaksananya pengelolaan administrasi kewilayahan	100%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%				peningkatan Koordinasi administrasi pemerintahan, peningkatan koordinasi bidang administrasi kewilayahan, peningkatan kualitas laporan dana kelurahan, Peningkatan kualitas LPPD dan LKPJ, Peningkatan keterbukaan informasi publik terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, peningkatan skor LPPD, cakupan bidang kerja sama daerah, Tersusunnya produk hukum daerah, Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum, Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100%	1.085.634.600	1.118.533.700	SETDA	Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Dokumen PPRG Setda, Dokumen
			Prosentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP	100%				
			Tercapainya Realisasi Keuangan Sesuai Batas Minimal yang ditetapkan	100%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Terlaksananya Kebijakan TPAKD/KUR	70%				Rencana Kerja Setda, Dokumen Perjanjian Kinerja Setda, Dokumen Laporan Keuangan Setda, Dokumen LKJIP Setda, Juklak APBD, Standarisasi Harga Satuan, monev bankeu, Rakor POK Kota/Setda dan Pengembangan Simpok, Bintek Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Meningkatnya kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, Meningkatkan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT, Berkurangnya peredaran barang kena cukai ilegal, Berkurangnya peredaran barang kena cukai ilegal, Meningkatnya pengendalian inflasi daerah, Meningkatnya fasilitasi bidang ketenagakerjaan, Meningkatnya infrastruktur dan perhubungan, Meningkatnya Akses Keuangan Daerah bagi pelaku UMKM dan pelajar, Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam SIKP, Meningkatnya kinerja BUMD, Meningkatnya kinerja BLUD, Penyertaan Modal pada BUMD, Tercapainya laporan penghematan energi di institusi pemerintah, Terpenuhinya kebutuhan air sesuai dengan standar kesehatan.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	82%	591.644.900	496.768.200	PERSIPDA	Pengelolaan kearsipan merupakan sebuah elemen yang dapat membantu berjalannya roda organisasi dengan efektif dan efisien, dengan adanya pengelolaan kearsipan yang baik maka secara langsung akan membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan peningkatan Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip), Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang Kearsipan.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	80%	2.105.628.000	1.574.785.100	BAPPEDA	Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan melaksanakan serangkaian solusi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberdayakan potensi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan adanya kegiatanpenyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan peningkatan persentase kesesuaian Program RPD ke dalam RKPD.

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	75%	906.005.000	1.143.402.200	BAPPEDA	Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. upaya pendukung program tersebut adalah dengan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, dengan upaya peningkatan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang Melanjutkan Pendidikan	1,47%	1.408.860.000	1.334.461.300	BKPSDM	Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu pejabat Pembina kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. upaya untuk mendukung program
			Persentase PNS yang mengikuti assesment	10%				

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	93%				tersebut adalah dengan berbagai kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Persentase jumlah ASN yang menerima Pembinaan Disiplin, Persentase Jumlah ASN dengan Penilaian Kinerja Baik, Persentase pemenuhan dokumen perencanaan kebutuhan Pegawai, Persentase pelaksanaan pengadaan pegawai, Persentase PNS yang mengikuti assesment, Persentase pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi, Persentase Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
			Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	25,16%				
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	235%				
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	30%	77.462.000	285.462.000	IRDA	Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas

No	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program	Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		OPD	Penjabaran Rencana Program
			Indikator	Target	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023		
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	87%				penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. dengan peningkatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	79%				
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	83%	734.029.000	803.764.100	IRDA	Kebijakan pengawasan memiliki tujuan untuk mendorong perbaikan system dan regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini yaitu dengan berbagai kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. dengan upaya peningkatan nilai MCP Korsupgah KPK.

Selain rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023 berdasarkan penanganan permasalahan dan isu strategis, pelaksanaan rencana Pembangunan oleh perangkat daerah dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs, Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar

Holistik Integratif dengan kategori sedang, Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, SD, SMP dan Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, SD, dan SMP.

d. Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TK/RA yang terakreditasi, Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs.

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), Cakupan pembinaan remaja di sekolah, Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Ibu hamil KEK, Persentase Ibu Hamil yang Anemia, Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan, Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A, Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3), Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram), Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Cakupan pelayanan kesehatan balita, Angka Kematian balita (AKABA), Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, Prevalensi Stunting pada Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR), Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, Incident Rate DBD per 100.000 penduduk, Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, Angka Penemuan Pneumonia Balita, Deteksi Dini Hepatitis, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Cakupan UCI kelurahan, Cakupan BIAS DT/Td, Cakupan BIAS Campak Rubela, Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar, Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam, Penemuan kasus AFP, (Acute Flaccid Paralysis), Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi, Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar, Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, Cakupan kepesertaan JKN, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK, Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan yang terakreditasi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri

rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan, Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat, Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan, Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri, Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit, Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR), Average Length of Stay (Av LOS), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Internal (TOI), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1

(satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Jumlah talud yang di bangun.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penambahan SR SPAM dan pemeliharaan SPAM.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Penambahan SR IPAL dan sanitasi setempat.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Prosestase rekomtek IMB yang terbit.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja Jumlah paket Penataan Bangunan dan Lingkungan.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, *updating* kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja panjang jalan yang terbangun dan Persentase jumlah jembatan.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi jasa konstruksi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja Persentase rekomendasi Keterangan Rencana Kota.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan.

Program ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah

kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman.

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.

5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai indikator kinerja Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan juga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM), Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.

b. Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan

Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

d. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator kinerja cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan

swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemgesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Target kinerja dari program ini adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan target kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, Rasio Kekerasan terhadap perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Persentase PKK aktif, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusu yang memerlukan koordinasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja presentase anak korban kekerasan.

3. Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi

pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER).

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar.

4. Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/Kota untuk indikator kinerja presentase penyelesaian sengketa tanah.

b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

d. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong dan kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, dengan koordinasi sinkronisasi penyelesaian tanah kosong dan juga pelaksanaan investarisasi tanah kosong.

5. Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan indikator kinerja berupa dokuemen IKPLHD dan dokumen KLHS.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Ketersediaan Laboratorium Pengujian Lingkungan, Presentase Konservasi Lahan, Persentase Konservasi Sumber Mata Air.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan Persentase ruang terbuka hijau dan cakupan layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.

d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah Kegiatan penegakan hukum lingkungan, Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kab/Kota, Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan IGRK.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat propinsi. Indikator capaian program ini adalah Jumlah pernghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota, Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup.

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaandan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase penerbitan KIA usia 0-5 tahun.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Indikator program ini yaitu untuk mencapai ketersediaan database.

7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR), Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai Rasio akseptor KB baru, Cakupan peserta KB aktif, Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kegiatan pelaksanaan dan

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, Persentase Baduta Stunting.

8. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; pengujian berkala kendaraan bermotor; pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Rasio konektivitas kota dan Kinerja lalu lintas kota.

9. Komunikasi Dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan progran prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian progam Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

11. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program jumlah promosi penanaman modal.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.

12. Kepemudaan Dan Olahraga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian

program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.

13. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

14. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase SDM di bidang persandian.

15. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

b. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.

d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.

16. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

17. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip), Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang Kearsipan.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

a. Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program capaian bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan dan presentase kelompok kelompok pengelola dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

2. Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan cappaian program jumlah objek wisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindunggan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program jumlah kejadian bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

dengan capaian program Persentase penerbitan izin usaha pertanian.

f. Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

4. Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program adalah Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk dan Ketesediaan infromasi pasokan,harga dan akses pangan daerah.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota capaian program adalah Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai indikator program berupa Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah.

5. Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan indikator berupa Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri.

6. Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program Persentase pelaksanaan proses transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu persentase peningkatan evaluasi perkembangan kelurahan, Peningkatan fasilitasi forum asosiasi kepala daerah, Peningkatan kapasitas SDM LPMK, sarasehan awal tahun, peningkatan Koordinasi administrasi pemerintahan, peningkatan koordinasi bidang administrasi kewilayahan, peningkatan kualitas laporan dana kelurahan, Peningkatan

kualitas LPPD dan LKPJ, Peningkatan keterbukaan informasi publik terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, peningkatan skor LPPD, cakupan bidang kerja sama daerah, Tersusunnya produk hukum daerah, Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum, Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Dokumen PPRG Setda, Dokumen Rencana Kerja Setda, Dokumen Perjanjian Kinerja Setda, Dokumen Laporan Keuangan Setda, Dokumen LKJIP Setda, Juklak APBD, Standarisasi Harga Satuan, monev bankeu, Rakor POK Kota/Setda dan Pengembangan Simpok, Bintek Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Meningkatnya kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, Meningkatkan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT, Berkurangnya peredaran barang kena cukai ilegal, Berkurangnya peredaran barang kena cukai ilegal, Meningkatnya pengendalian inflasi daerah, Meningkatnya fasilitasi bidang ketenagakerjaan, Meningkatnya infrastruktur dan perhubungan, Meningkatnya Akses Keuangan Daerah bagi pelaku UMKM dan pelajar, Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam SIKP, Meningkatnya kinerja BUMD, Meningkatnya kinerja BLUD, Penyertaan Modal pada BUMD, Tercapainya laporan penghematan energi di institusi pemerintah, Terpenuhinya kebutuhan air sesuai dengan standar kesehatan.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang

Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Capaian program ini yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi, Persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD. Indikator kinerja program ini adalah Peningkatan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD), Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta fasilitasi kerumahtanggaan, Cakupan Administrasi Keuangan.

2. Sekretariat DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD. Capaian program ini adalah Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi, Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran, Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi

dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah persentase kesesuaian Program RPD ke dalam RKPD.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash managenent (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

3. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Persentase jumlah ASN yang menerima Pembinaan Disiplin, Persentase Jumlah ASN dengan Penilaian Kinerja Baik, Persentase pemenuhan dokumen perencanaan kebutuhan Pegawai, Persentase pelaksanaan pengadaan pegawai, Persentase PNS yang mengikuti assesment, Persentase pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi, Persentase Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi.

5. Penelitian Dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

6. Kecamatan

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah Persentase Peningkatan Skor IKM.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan, Persentase PKK aktif, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah dan Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian program Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2 dan Persentase penyampaiam SPPT PBB pada WP.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu nilai MCP Korsupgah KPK.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program presentase pendidikan Politik yang dilaksanakan.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian program Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian program yaitu Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial.

BAB VI
PENUTUP

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 dengan melakukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rancangan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2023 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023.

Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 akan terwujud bukan hanya dari hasil kerja pemerintah, namun juga berkat dukungan, kerja sama serta peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Pj. WALI KOTA SALATIGA

ttd

SINOENG N. RACHMADI